

**TATA KELOLA
LAYANAN
PENDIDIKAN
DI SEKOLAH INKLUSI**

Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd
Lalu Yulhaidir, M.Psi, Psikolog
Dr. Sri Susanti Tjahja Dini, M.Pd

Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi

Penulis

Yessy Yanita Sari
Lalu Yulhaidir
Sri Susanti Tjahja Dini

Editor

Rafita Arum Sari
Eka Lilik Nurindah Sari

ISBN

978-623-6707-07-4

Desain Cover

Wafa Arsyada Faqihuddin

Desain & Tata Letak Isi:

Muhammad Aziiz Tegar Bayu Utomo

Ilustrator

Nur Cahyono

Penerbit

JSIT Publishing Indonesia
Tahun Terbit: 1441 H/2020 M
Preliminary: viii
Halaman Isi: 200
Ukuran Buku: 17.6 x 25 cm

© HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini
serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Sambutan

Alḥamdulillāh, mari kita bersyukur kepada Allah Swt., yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw..

Pada usia yang ke-17, JSIT Indonesia terus berupaya untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh anggota. Buku Trilogi Pendidikan Inklusi ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Buku Trilogi Pendidikan Inklusi ini terdiri atas tiga jilid, yaitu Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi, Asesmen dan Diadnosa di Sekolah Inklusi, dan Adaptasi, Akomodasi, dan Modifikasi di Sekolah Inklusi.

Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi mengulas tentang ragam manajemen pendidikan inklusi secara umum ditambah dengan manajemen pengelolaan pendidikan inklusi sesuai standar kekhasan JSIT Indonesia. Asesmen dan Diadnosa di Sekolah Inklusi mengajak pembaca untuk memahami apa itu asesmen, bagaimana melakukan asesmen, aspek-aspek pendukung dalam proses asesmen, dilengkapi dengan beberapa format pelaksanaan asesmen. Adaptasi, Akomodasi, dan Modifikasi di Sekolah Inklusi menitikberatkan pada *treatment* pembelajaran diberikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Buku ini memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan pertama, bersifat praktis karena ditulis oleh para praktisi dari pengalaman dan praktik-praktik baik selama beberapa tahun. Kekuatan kedua, buku ini ditulis oleh tiga orang yang kompeten, baik dari aspek pengalaman maupun pendidikan yang dimiliki. Kekuatan ketiga, dalam buku ini telah diintegrasikan dengan kekhasan SIT dan nilai-nilai Islam. Semoga buku ini dapat menjadi panduan bagi para guru dalam membimbing dan melayani anak-anak kita yang membutuhkan, dan menjadi amal jariah bagi para penulisnya.

Āmīn

Surabaya, Agustus 2020

Moh. Zahri, M.Pd
Ketua Umum JSIT Indonesia

Kata Pengantar

Bermula dari mimpi

Dua puluhan tahun lalu bertemu dengan anak spesial, yang tidak bisa bersekolah di mana-mana. Mengapa? Kala itu belum banyak sekolah yang bersedia menerima anak yang dianggap 'berbeda'. Tersebab oleh ketidakmampuan atau ketidakmauan. *Bismillah*, memberanikan diri untuk kebersamai.

Hanya berpikir

Jika semua lembaga sekolah berlaku sama, lalu ke mana anak-anak ini akan mendapatkan haknya? Bukankah, UUD 1945 menjamin hak pendidikan bagi semua? Islam telah menjelaskan, bahwa setiap manusia dilahirkan dalam kesempurnaan ciptanya dan siapa pun berhak mendapat tarbiah.

Ini hanya tantangan

Tantangan untuk memahami lebih dalam tentang hakikat manusia. Bahwa, setiap insan punya kekhususan. Setiap orang berbeda. Setiap anak itu unik. Tentang memaknai hakikat pendidikan, sebuah upaya optimalisasi segala potensi yang telah dianugerahkan-Nya pada setiap manusia. Pendidikan yang akan memunculkan potensi itu, mengembangkannya hingga ia menjadi manusia sejati yang mandiri dan bermanfaat bagi orang lain dalam rangka taat pada Tuhannya. Tantangan yang indah, bukan?

Melakoni amanah langit

Tidak ada yang tidak mungkin, jika Sang Maha Berkehendak dilibatkan dalam segala gerak langkah upaya yang diikhtiarkan. Bermula dari langkah kecil yang bergetar, hingga ribuan langkah berjalan dengan semakin tegar. Jalan yang berkelok masih ditemui, namun terasa lebih familier dan makin banyak pertolongan. Demikianlah dinamika dunia inklusi.

Kini

Coretan sederhana ini adalah lanjutan mimpi. Mimpi yang akan berhenti, hingga sampai suatu saat nanti, tak ada seorang anak pun yang bersedih, karena tertolak sana sini. Tidak ada lagi orang tua dan guru yang bingung kebersamai.

Selamat menikmati

Semoga ada ilmu di dalamnya yang bisa diimplementasikan saat penunaian amanah kita sebagai pendidik di rumah maupun sekolah. Kemudian, bersama kita merajut cita hingga nyata.

Penulis

Daftar Isi

Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Pendidikan Adalah Panglima	1
A. Pendidikan untuk Semua	2
B. Pendidikan Merupakan Hak Asasi Manusia	4
C. Urgensi Pendidikan Inklusif.....	7
Bab 2 Pendidikan untuk Semua	11
A. Konsep Pendidikan Inklusif	12
B. Dampak Pendidikan Inklusif.....	14
Bab 3 Manajemen Sebuah Keniscayaan	17
A. Fungsi Manajemen.....	19
B. Konsep Manajemen Pendidikan	25
Bab 4 Manajemen dalam Perspektif Islam	27
A. Ruang Lingkup Manajemen	29
B. Prinsip Manajemen Perspektif Islami	36
Bab 5 Kepemimpinan Menjadi Kunci	41
A. Dasar-dasar Kepemimpinan dalam Islam	42
B. Kriteria Pemimpin yang Baik.....	44
Bab 6 Mengapa Inklusi?	51
Landasan Pendidikan Inklusif.....	52
Bab 7 Untuk Apa Inklusi?	61
A. Tujuan Pendidikan Inklusif	62
B. Fungsi Pendidikan Inklusif.....	63
C. Manfaat Pendidikan Inklusif	64
D. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif.....	66

Bab 8	Memahami Terminologi	69
	A. Pendidikan Inklusif.....	70
	B. Model Pendidikan Inklusif	73
	C. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).....	75
Bab 9	Jenis Kekhususan pada Anak	79
	Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus	80
Bab 10	Inklusi dari Masa ke Masa	105
	A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif Dunia	106
	B. Sejarah Pendidikan Inklusif di Indonesia	108
	C. Perkembangan Model Sekolah di Indonesia	110
	D. Sekolah Segregasi	111
	E. Sekolah Integrasi.....	112
	F. Sekolah Inklusif	113
Bab 11	Manajemen Pendidikan Inklusif	115
	A. Kekhasan Manajemen Pendidikan Inklusif.....	116
	B. Prinsip Pengelolaan Pendidikan Inklusif.....	117
Bab 12	Kurikulum Pendidikan Inklusi	119
	A. Kurikulum dalam Pendidikan Inklusi.....	120
	B. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Inklusi	125
	C. Pengawasan dan Evaluasi Kurikulum Inklusi	127
	D. Proses Pembelajaran	128
	E. Standar Isi Pendidikan Inklusi	128
	F. Penilaian Hasil Belajar.....	129
Bab 13	Manajemen Peserta Didik Pendidikan Inklusif.....	131
	A. Manajemen Peserta Didik dalam Sekolah Inklusif	132
	B. Evaluasi Peserta Didik Pendidikan Inklusif.....	139
Bab 14	Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Inklusif.....	143
	A. Perencanaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.....	144

B.	Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	148
C.	Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	153
Bab 15	Pengelolaan Sekolah Inklusif	157
A.	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	158
B.	Struktur Organisasi Sekolah Inklusi.....	159
C.	Sarana dan Prasarana	160
D.	Media Belajar Khusus untuk Intervensi	161
E.	Tanda-tanda Khusus Sekolah di Lingkungan Sekitar	161
F.	Sumber Pendanaan.....	162
G.	Strategi Pembiayaan	162
H.	Kerja Sama	163
Bab 16	Filsafat <i>School Well-Being</i>	165
Bab 17	Sinergi Orang Tua Membangun Sekolah Fitrah.....	169
Bab 18	Kajian Fikih Difabel, Apa Kata Ulama?.....	175
A.	Berbagai Tantangan bagi Difabel	177
B.	Pandangan Islam Mengenai Difabel	178
Daftar Pustaka	187

*Cukuplah terkisah kasih Rasulullah terhadap sahabat-sahabat
tercintanya yang dianggap berbeda di mata manusia,
namun mulia bagi-Nya, sebagai pelajaran bagi kita.
Tersebutlah mereka di antaranya Ibnu Ummi Maktum,
Amr Al-Jamuh, Abdullah Ibnu Mas'ud, Julaibi, dan Abu Qilabah.
Walau sarat dengan keterbatasan,
namun tak sedikitpun berkurang perjuangan.
Karena ada Rasul dan sahabat lain yang
menghargai dan menyayanginya lillah.*

Pendidikan diyakini memiliki peran penting dalam mengantarkan sebuah bangsa mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebuah bangsa akan maju, jika negara tersebut memiliki pendidikan yang maju. Pertumbuhan ekonomi bangsa akan berkembang dengan baik, seiring dengan membaiknya sistem pendidikan yang berlaku. Lestari dan mengakarnya budaya luhur dan karakter sebuah negeri didukung oleh terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah investasi berharga yang wajib ditanam agar dapat mencapai harkat dan martabat berbangsa dan bernegara. Tanpa pendidikan, mustahil kejayaan sebuah bangsa akan diraih. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Tilaar (2008), bahwa pendidikan merupakan sebagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai dinamisator masyarakat itu sendiri yang menjadi tiang sanggah dari kesinambungan masyarakat itu sendiri.

A. Pendidikan untuk Semua



Gambar 1.2 Pendidikan untuk semua.
Sumber: SDIT Nurul Fikri Lombok, NTB.

Melalui lembaga pendidikan, seseorang akan mendapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan serta keterampilan sebagai bekal hidup mereka kelak. Pendidikan merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Seseorang yang terdidik akan memiliki kemampuan dan keterampilan, yang membantunya hidup lebih baik. Dengan kata lain, melalui lembaga pendidikan akan dihasilkan sumber daya manusia berkualitas, mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Seiring dengan pemahaman akan urgensi pendidikan bagi siapa pun, fenomena yang ada menunjukkan, ternyata tidak semua anak dapat menikmati pendidikan di bumi tercinta ini. Sebagaimana yang dialami negara berkembang lainnya, anak-anak yang tidak dapat mengenyam bangku sekolah disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, tempat tinggal yang terpencil dan jauh dari lokasi pendidikan, anak-anak korban bencana alam, dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Terkait faktor ABK yang tidak dapat menikmati pendidikan, terdapat beberapa penyebab yang mendasarinya. Berikut beberapa faktor tersebut.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua yang Kurang Menunjang

Sebelum adanya kebijakan sekolah inklusi, ABK hanya dapat bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Faktanya, jumlah SLB tidak berbanding lurus dengan jumlah ABK yang ada, sehingga tidak mampu menampung semua ABK. Persoalan lainnya ialah kendala jarak. Lokasi SLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten belum mencapai kecamatan. Hal tersebut cukup berpengaruh, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

2. Masalah Sistem Sekolah Reguler yang Tidak dapat Memfasilitasi ABK

Orang tua ABK yang tetap ingin menyekolahkan anaknya, mencoba memasukkan anak mereka ke sekolah reguler. Namun, acap kali mereka ditolak. Sebagian lainnya diterima masuk ke sebuah sekolah. Namun, mereka 'dipaksa' untuk mengikuti sistem pendidikan yang ada, sehingga pada akhirnya mereka gagal beradaptasi dengan situasi tersebut. Sebagian dari mereka tetap mengikuti sistem yang ada dengan konsekuensi menjadi peserta didik terbelakang, yang acap kali dianggap peserta didik bermasalah, kurang pintar, atau kurang normal. Sebagian lainnya, memutuskan keluar dari sistem yang ada, hingga akhirnya tidak bersekolah dan masuk dalam golongan anak putus sekolah.

Kenyataan di atas menjadi ironi, apalagi berdasarkan data dari kemendikbud.go.id (7/11/2019), jumlah anak berkebutuhan khusus mencapai 1.544.184 anak, dengan 330.764 ABK (21,42%) berada dalam rentang usia 5-18 tahun. Dari jumlah tersebut, hanya 85.737 ABK yang bersekolah. Artinya, masih terdapat 245.027 ABK yang belum mengenyam pendidikan di sekolah, baik sekolah khusus/inklusif.

B. Pendidikan Merupakan Hak Asasi Manusia

Fenomena di atas tentu memprihatinkan, pada saat pendidikan diyakini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, tidak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1, “*Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.*” Pernyataan itu menjamin, bahwa setiap anak bangsa berhak mendapatkan layanan di bidang pendidikan, termasuk anak-anak yang dengan kelebihan dan kebutuhan khusus, seperti *gifted child* (CIBI), autisme, hiperaktif, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, *down syndrome*, dan anak-anak berkesulitan belajar yang memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pendidikan, apalagi jika dikaitkan dengan konsep *school well-being* menuju GDS.



Gambar 1.3 Pendidikan merupakan hak asasi manusia.
Sumber: SIT Ummul Quro Depok.

Paradigma bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia juga ditegaskan dalam deklarasi internasional. Pada tahun 1948, Deklarasi Hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan, bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang paling dasar (*basic human right*). Begitu pula,

deklarasi yang disepakati dalam *Convention on The Rights of The Child* yang diselenggarakan oleh PBB (1989) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dalam *The World Convention on Education for All* di Jomtien, Thailand (1990), yang kemudian dikenal dengan *The Jomtien Declaration*, antara lain juga ditegaskan perlunya memperluas akses pendidikan kepada semua anak, remaja dan dewasa, juga memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak perempuan.

Pada tahun 1994, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* menjadi ajang yang fonemenal bagi berkembangnya pemahaman pendidikan inklusif. Dalam forum ini dinyatakan secara lebih tegas menuntut, agar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bersifat inklusif, tidak lagi eksklusif. Secara tegas pula dinyatakan, bahwa merupakan pelanggaran hak asasi manusia, jika terdapat sistem pendidikan yang memisahkan individu dan komunitasnya (Dellors, 1998). Dalam dokumen tersebut dinyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. Prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogianya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para peserta didiknya, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, dan penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Seyogianya, terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.
2. Di dalam sekolah inklusif, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogianya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus

dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa, kelas khusus, atau bagian khusus di sebuah sekolah regular, seyogianya merupakan suatu kekecualian yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu dengan adanya bukti jelas. Seperti, pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Selanjutnya, pada tahun 2000 di Dakar diselenggarakan *The World Education Forum*. Forum tersebut diserukan akan perlunya memberikan perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif. Berdasarkan komitmen internasional tersebut, pendidikan inklusif menjadi keniscayaan diberlakukan di setiap negara. Komitmen ini dilakukan dengan kesadaran, bahwa pendidikan inklusif akan banyak memberi pengaruh positif bagi kemajuan suatu bangsa. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Dari sudut pendidikan, pendidikan inklusif memandang semua anak sama, yang berhak mendapatkan penghargaan dan kesempatan berkembang. Dengan kata lain, tidak ada lagi anak bangsa yang tidak mendapat layanan pendidikan yang baik. Dari sisi ekonomi, pendidikan inklusif akan mampu melahirkan anak-anak yang berkualitas, karena setiap anak dilayani berdasarkan keunikan masing-masing. Melalui sumber daya yang berkualitas inilah, perekonomian suatu bangsa akan maju dan berkembang. Dari sudut sosial, dimulai dari sistem pendidikan inklusif akan berimbas pada terbangunnya nilai-nilai dan perilaku inklusif di masyarakat. Perilaku inklusif hakikatnya sarat dengan muatan humanistik dan penegakkan hak asasi manusia. *Trend* dunia internasional menunjukkan, bahwa semakin maju sebuah bangsa, semakin besar perhatiannya pada warga yang berkebutuhan khusus (Suyanto dan Mudjito, 2012). Hal tersebut dapat dilihat bukan hanya dari model pendidikan yang diterapkan, namun fasilitas umum yang dapat diakses dan dinikmati masyarakat berkebutuhan khusus. Sehingga, menggambarkan kepedulian pemerintah negara maju terhadap mereka.

C. Urgensi Pendidikan Inklusif



Gambar 1.4 Urgensi pendidikan inklusif.
Sumber: SDIT Insan Mulia Jakarta.

Pada dasarnya, pendidikan inklusif berlandaskan pemahaman *education for all*, yang dimaknai bahwa pendidikan itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini dapat diterjemahkan, bahwa sebuah lembaga pendidikan sepatutnya mampu memberikan layanan pendidikan bagi siapa saja. Model sekolah inklusif menghargai adanya perbedaan individu dan keunikan setiap anak. Sistem sekolah inklusif juga dibangun untuk dapat menyesuaikan diri dengan setiap keunikan anak. Bukan sebaliknya, anak yang diminta menyesuaikan diri dengan sistem yang berlaku. Melalui model pendidikan inklusif diharapkan setiap anak selain mendapatkan haknya atas layanan pendidikan, juga dapat mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga tidak menjadi beban masyarakat akan tetapi sebaliknya, mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsanya.

Sejak tahun 2005, pendidikan inklusif sudah mulai dikenal secara lebih luas di Indonesia. Kebijakan sekolah inklusif secara resmi dikeluarkan melalui

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Secara formal, pendidikan inklusif di Indonesia sendiri sebenarnya telah diawali dengan deklarasi sekolah inklusif pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa dan Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003, pun sesungguhnya telah menyinggung secara umum mengenai sekolah inklusif. Namun, keluarnya Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 ini, membawa angin segar bagi para praktisi pendidikan yang peduli dengan *education for all* dan begitu pula dengan para orang tua siswa yang tergolong anak berkebutuhan khusus.

Jika melihat perjalanan kebijakan sekolah inklusif yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, memang belum dapat dikatakan lama, apalagi bila dibandingkan dengan penerapan sistem sekolah inklusif di negara maju yang sudah puluhan tahun. Walau terhitung belum lama sistem ini diberlakukan, namun bukan berarti menjadi apologi lambatnya progres dari pelaksanaan Permendiknas tersebut.

Tindak lanjut dari Permendiknas tersebut adalah mulai mendorong sekolah-sekolah reguler berubah menjadi sekolah inklusif. Namun, jumlah sekolah inklusif yang ada sampai saat ini belum sesuai kebutuhan. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, belum dapat memenuhi standar minimal adanya satu sekolah inklusif di tiap kecamatan. Sebaliknya, jumlah ABK di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Angka tersebut baru berdasarkan jumlah ABK yang terdata, dapat dipastikan jumlah sebenarnya dapat mencapai dua kali lipatnya bahkan lebih, mengingat kurang sempurnanya sistem pendataan di negara ini.

Secara kuantitatif telah terpenuhi jumlah sekolah inklusif dengan banyaknya sekolah yang mendeklarasikan insitusinya sebagai sekolah inklusif. Namun, secara kualitatif tidak banyak sekolah inklusif yang sesuai dengan standar minimal Permendiknas tersebut. Mengapa hal ini terjadi? Berdasarkan informasi dari para pimpinan sekolah selama ini, banyak sekolah yang belum dapat melaksanakan pendidikan inklusif di sekolahnya,

karena hambatan pengetahuan tentang manajemen sekolah inklusif. Para pimpinan sekolah kesulitan mengejawantahkan filosofi pendidikan inklusif, khususnya mengenai kemampuan sekolah untuk melayani siswa secara individual sesuai keunikannya. Dengan kata lain, sekolah harus siap untuk tidak menyeragamkan sistem sekolah bagi semua siswa, seperti yang selama ini diberlakukan.

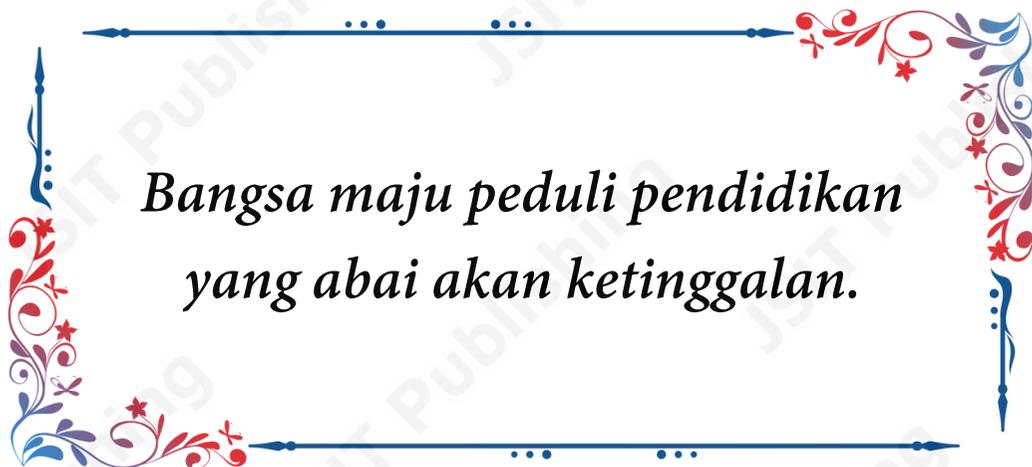
Hal di atas menunjukkan, bahwa kesadaran terhadap urgensi pendidikan inklusif saja belum cukup menjawab terlayannya Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Fenomena yang tampak adalah kegagalan sekolah inklusif dalam mengimplementasikan konsep pendidikan inklusi. Akibatnya, ABK baru dapat ditampung di sekolah tersebut, namun potensi dan keunikan mereka belum dapat dioptimalkan. Kendala yang muncul disebabkan ketidakpahaman para penyelenggara pendidikan inklusif mengenai bagaimana menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan tepat dan benar, karena untuk menyelenggarakan sekolah inklusif tentu berbeda dengan sekolah reguler.

Dalam tataran operasional di sekolah, sekalipun sudah banyak sekolah yang mendeklarasikan sebagai sekolah inklusif, tetapi dalam implementasinya masih banyak yang belum sesuai dengan konsep-konsep yang mendasarinya. Bahkan, tidak jarang ditemukan kesalahan-kesalahan praktik, terutama terkait dengan aspek pemahaman, kebijakan internal sekolah, dan kurikulum serta pembelajaran. Pada umumnya, sekolah inklusif menghadapi beberapa tantangan, di antaranya minimnya sumber daya guru yang mampu menangani siswa yang berkebutuhan khusus, sulitnya mendapatkan tenaga khusus, seperti psikolog, terapis, dan *teacher's aide*, rancangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran ABK, serta persepsi masyarakat pada umumnya tentang keberadaan ABK di sekolah dikhawatirkan mengganggu peserta didik lainnya.

Seluruh permasalahan di atas, sesungguhnya terkait dengan kemampuan manajerial sebuah sekolah. Dalam manajemen sekolah, efektifitas dan efisiensi akan didapatkan, apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan

tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik, kemampuan dan *task commitment* (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana yang memadai, serta partisipasi masyarakat, khususnya orang tua peserta didik. Dalam panduan yang dikeluarkan Depdiknas dinyatakan, bahwa manajemen sekolah memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah yang meliputi input peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar mengajar.

Bagi sekolah inklusif dibutuhkan kemampuan manajerial pendidikan inklusif yang berbeda dengan model manajemen pendidikan pada umumnya. Untuk itulah, dibutuhkan sosialisasi aplikasi manajemen sekolah inklusif ke setiap sekolah. *Modelling* dari sekolah-sekolah yang telah menjalankan sistem inklusif juga dapat membantu sekolah inklusif lainnya untuk dapat melaksanakan amanah bangsa dengan baik.



BAB 2

Pendidikan untuk Semua



Gambar 2.1 Bhinneka Tunggal Ika.
Sumber: Dokumen penerbit.

Saat ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berupaya mensosialisasikan konsep pendidikan inklusif di seluruh wilayah. Beberapa wilayah sudah diwajibkan untuk pelaksanaannya, seperti wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Di setiap sekolah dihimbau untuk melaksanakan konsep ini, bahkan khusus sekolah pemerintah, telah diwajibkan 20% kuota bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Fakta lainnya, keberadaan individu atau anak-anak berkebutuhan khusus, secara riil ada di sekolah umum tidak hanya ada di sekolah luar biasa. Semangat melayani ABK di sekolah, ternyata tidak cukup menjawab tantangan para guru di sekolah. Mereka dihadapkan berbagai permasalahan, ketika mencoba menerapkan konsep pendidikan inklusif di sekolah. Di antara permasalahan yang ada, yakni kesulitan mengidentifikasi ABK, ketidakpahaman menangani ABK di kelas, mendesain kurikulum yang sesuai, membuat sistem dan lingkungan belajar yang kondusif, serta lain sebagainya. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bubpha dkk (2012), bahwa masih banyak masalah dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusif termasuk pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengenali kebutuhan khusus siswa. Semua permasalahan ini, jika tidak dicari solusinya akan berdampak pada kualitas layanan pendidikan di sekolah yang pada akhirnya akan berdampak dalam pengembangan potensi peserta didik.

A. Konsep Pendidikan Inklusif

Pada prinsipnya, setiap anak adalah unik, mempunyai kekhasan masing-masing. Model layanan berbasis konsep pendidikan inklusif diharapkan menjawab kebutuhan setiap anak. Model pendidikan inklusif memungkinkan keunikan anak terakomodir dalam kurikulum termasuk keunikan pada diri ABK, sehingga setiap anak mendapat kesempatan untuk berkembang dengan maksimal (Yasa dan Julianto, 2017). Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik.

Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memegang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik, maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula.



*Gambar 2.2 Konsep pendidikan inklusif.
Sumber: SDIT Latansa Cendikia Tangerang.*

Keterlibatan manajemen sekolah tersebut, antara lain sebagai berikut.

1. Penyesuaian persepsi oleh warga sekolah yang dimotori oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan manajemen inklusif di sekolah tersebut.
2. Membangun sistem yang mendukung pengelolaan pendidikan inklusif.
3. Menyusun program sekolah.
4. Melakukan pendampingan.
5. Melakukan sosialisasi ataupun publikasi.

Dengan adanya keseriusan dalam keterlibatan manajemen sekolah, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut dapat terselenggara dengan baik. Sekolah pendidikan inklusif tersebut dapat memberikan keramahan dan keberterimaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

B. Dampak Pendidikan Inklusif



Gambar 2.3 Dampak pendidikan inklusif.
Sumber: SMPIT Darul Abidin Depok.

Pada tahun 1994, *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* menjadi ajang yang fonemenal bagi berkembangnya pemahaman pendidikan inklusif. Pada dasarnya, pendidikan inklusif berlandaskan pemahaman *education for all*, bahwa pendidikan itu untuk semua orang tanpa terkecuali (Dellors, 1998). Bangsa Indonesia melalui filsafat Bhinneka Tunggal Ika telah memberi pengakuan akan adanya keanekaragaman di masyarakat. Namun, tetap dalam satu kesatuan. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya hingga potensi setiap individu dianggap sebagai kekayaan dan aset bangsa, inilah sebagai filosofi inklusif (Suyanto dan Mudjito, 2012). Melalui model pendidikan inklusif diharapkan setiap anak selain mendapatkan haknya atas layanan pendidikan, juga dapat mengoptimalkan potensi dirinya, sehingga tidak menjadi beban masyarakat dan sebaliknya mampu memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsanya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia mencapai 1,6 juta anak. Terdapat sekitar 115.000 ABK yang bersekolah di SLB dan 288.000 (18%) ABK yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusif. Artinya, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah, baik di sekolah khusus maupun di sekolah inklusif. Pendidikan inklusif di Indonesia, sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1986 dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan tersebut dinamakan Pendidikan Terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Terpadu di Indonesia. Pada pendidikan terpadu, ABK ditempatkan di sekolah umum atau sekolah reguler. Namun, mereka harus menyesuaikan diri pada sistem sekolah tersebut.

Menurut Depdiknas, dalam buku pedoman sekolah inklusif, landasan empiris penelitian tentang pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun, penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas, atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregasi hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat. Beberapa peneliti kemudian melakukan meta analisis yang dilakukan oleh Calberg dan Kavale (1980) terhadap 50 penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.

Tiap jiwa punya hak yang sama.

*Terlahir sempurna,
walau tampilan berbeda.*

*Bukankah, pelangi indah karena
beraneka warna?*

BAB 3

Manajemen Sebuah Keniscayaan



Gambar 3.1 Manajemen yang kokoh.
Sumber: Dokumen penerbit.

Secara bahasa, kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu *'ménagement'* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Secara defenitif, pengertian manajemen memiliki bermacam-macam definisi. Menurut Terry (2005), manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata.

Berikut pengertian manajemen menurut beberapa ahli (Hikmat, 2011).

1. Menurut Mary Parker Follet, manajemen ialah seni melakukan pekerjaan melalui orang lain yang membutuhkan keterampilan khusus (mengarahkan, memengaruhi, dan membina).
2. Menurut Horold Koonz dan Cyriil O'Donnel, manajemen adalah usaha untuk melakukan tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.
3. Menurut GR Terry, manajemen adalah proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan, melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain.
4. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen ialah seni dan ilmu yang keduanya dipadukan dalam rangka mengarahkan dan memengaruhi orang lain untuk melaksanakan rencana pimpinan dan mencapai tujuan.
5. Menurut Malayu S. P Hasibuan, manajemen ialah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan tenaga dan profesionalitas orang lain.
6. Menurut A. F. Stoner, manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pengoordinasian berbagai unsur yang ada dalam sebuah sistem organisasi untuk menghasilkan sebuah sinergi yang baik. Melalui sinergi yang baik tersebut, akan tercapailah tujuan organisasi. Manajemen adalah sebuah kegiatan, pelaksanaannya disebut *'managing'* atau pengelolaan dalam bahasa Indonesia. Pelaksana kegiatan manajemen ini diistilahkan dengan manajer atau pengelola. Seorang manajer dituntut untuk dapat mengetahui ilmu manajerial, sekaligus seni mengelola. Manajemen merupakan perpaduan ilmu pengetahuan dan seni (Terry, 2005). Selain

memiliki ilmu manajemen, seorang manajer harus memiliki kecakapan yang akan diperolehnya dari pengalaman, pengamatan, maupun kemampuan dalam menggunakan ilmu manajerial yang ada. Kreativitas manajer dalam hal ini mutlak dibutuhkan pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari manajemen. Pertama, melihat proses-proses administratif, terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Kedua, mempelajari komponen sistem organisasi, meliputi tugas-tugas strategi, koordinasi, dan operasi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut dibutuhkan sistem lingkungan, perspektif waktu, pendapat, proses umum, dan teknik membuat keputusan. Melalui ilmu manajemen yang ada, kemudian dibangunlah sebuah sistem manajerial. Peranan utama sistem manajerial adalah mengintegrasikan kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Untuk mempelajari sistem manajerial dapat dilakukan dengan cara menganalisis peranan manajer dalam bermacam-macam keadaan institusional dan melakukan analisis secara rinci terhadap proses manajemen.

Cara pertama, ialah melakukan analisis perbandingan dan mempertentangkan peranan manajerial sesuai dengan fungsi-fungsi dalam berbagai organisasi, seperti organisasi perusahaan, pemerintahan, lembaga pendidikan, dan sebagainya. Dengan cara ini akan diperoleh informasi yang berharga tentang penyebaran dan universalitas tentang sistem manajerial. Cara kedua, mempelajari proses manajemen sesuai dengan tahap-tahap pada fungsi-fungsi manajemen, yakni perencanaan, *assembling resources*, pengorganisasian, motivasi, dan kontrol; dapat disederhanakan menjadi perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol; lebih disederhanakan lagi, yakni perencanaan dan pelaksanaan (implementasi).

A. Fungsi Manajemen

Beberapa ahli manajemen mencoba menjabarkan fungsi manajemen. Berikut simpulan dari beberapa pendapat beberapa ahli (Terry, 2005).

Tabel 3.1 Fungsi Manajemen Menurut Pakar

No.	Ahli	Fungsi Manajemen
1.	Louis A. Allen	<i>Leading, planning, organizing, dan controlling.</i>

2.	Prajudi Atmosudirjo	<i>Planning, organizing, directing, actuating, dan controlling.</i>
3.	Jhon R Beishine	<i>Planning, organizing, commanding, dan controlling.</i>
4.	Henry Fayol	<i>Planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling.</i>
5.	Luther Gullich	<i>Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting.</i>
6.	Kontz dan O'donnel	<i>Organizing, staffing, directing, planning, dan controlling.</i>
7.	William H. Newman	<i>Planning, organizing, assembling resources, directing, dan controlling.</i>
8.	Sondang P. Siagian	<i>Planning, organizing, motivating, dan controlling.</i>
9.	R. Terry	<i>Planning, organizing, acting, dan controlling.</i>

Pendapat para pakar manajemen di atas menunjukkan, selain Terry, sebagian besar pakar mengganti istilah *acting* dengan *directing*. Istilah *directing* lebih mengarahkan bukan sekedar melakukan. Berdasarkan penjabaran di atas, mengenai fungsi manajemen dapat dijelaskan lebih lanjut dari beberapa fungsi yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut.

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah langkah awal dalam melakukan sebuah kegiatan. Bahkan menurut pakar manajemen, perencanaan yang baik memiliki kontribusi hingga 50% dalam menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan berguna untuk memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan dan memudahkan pencapaian tujuan. Perencanaan yang baik akan memberi dampak pada hasil yang baik pula. Melalui perencanaan yang baik akan dapat membantu manajemen

menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, sekaligus mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang akan dilakukan seseorang dalam sebuah pekerjaan.

Terry dan Rue (2005) merinci kegiatan yang dilakukan dalam proses perencanaan melalui beberapa kegiatan, seperti berikut.

- a. *Self audit*, yang ditujukan untuk mengetahui keadaan sesungguhnya suatu organisasi pada saat itu.
- b. Survei lingkungan.
- c. Menentukan tujuan (*objectives*).
- d. Memprediksi keadaan yang akan datang (*forecast*).
- e. Melakukan tindakan-tindakan dan sumber pengerahan.
- f. Mengevaluasi sebagai pertimbangan tindakan yang diusulkan.
- g. *Revise and adjust*, sebuah rencana mungkin untuk diubah dan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pada saat itu.
- h. *Communicate*, yang berhubungan terus selama proses perencanaan.

Perencanaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut.

- a. Rencana global, merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang.
- b. Rencana strategis, merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang.
- c. Rencana operasional, merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, perencanaan global maupun perencanaan strategis.

Sebagaimana institusi yang lain, institusi pendidikan saat ini mencoba mentransformasikan konsep perencanaan strategis yang telah diaplikasikan di dunia bisnis dan industri. Pesatnya perkembangan dunia global dalam era globalisasi, menjadi alasan paling utama bagi institusi pendidikan untuk membuat rencana strategis.

Berikut ini sekilas tentang langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan strategis menurut Bryson (2004).

- a. Penentuan misi dan tujuan, yang mencakup pernyataan umum tentang misi, falsafah, dan tujuan. Perumusan misi dan tujuan ini

merupakan tanggung jawab kunci manajer puncak. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibawakan manajer. Nilai-nilai ini dapat mencakup masalah-masalah sosial dan etika, atau masalah-masalah umum, seperti macam produk atau jasa yang akan diproduksi atau cara pengoperasian perusahaan.

- b. Pengembangan profil perusahaan, yang mencerminkan kondisi internal dan kemampuan perusahaan merupakan hasil analisis internal untuk mengidentifikasi tujuan dan strategi sekarang, serta merinci kuantitas dan kualitas sumber daya perusahaan yang tersedia. Profil perusahaan menunjukkan kesuksesan perusahaan di masa lalu dan kemampuannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagai implementasi strategi dalam pencapaian tujuan di masa datang.
- c. Analisa lingkungan eksternal, dengan maksud untuk mengidentifikasi cara-cara dan dalam apa perubahan-perubahan lingkungan dapat memengaruhi organisasi. Di samping itu, perusahaan perlu mengidentifikasi lingkungan lebih khusus, seperti para penyedia, pasar organisasi, para pesaing, pasar tenaga kerja, dan lembaga-lembaga keuangan, di mana kekuatan-kekuatan ini akan memengaruhi operasi perusahaan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut (Terry, 2005). Secara sederhana dapat diartikan pula sebagai suatu upaya menghubungkan satu orang dan yang lainnya agar dihasilkan kerja sama yang efisien dan tercapainya tujuan organisasi maupun kepuasan tiap individu. Pengorganisasian adalah proses mempekerjakan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dengan cara terstruktur guna mencapai sasaran yang spesifik. Dalam melakukan tindakan pengorganisasian, hal yang perlu adalah setiap kegiatan harus jelas siapa saja yang akan mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa target dari pekerjaan tersebut.

Menurut Terry (2005), dalam proses pengorganisasian dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti berikut.

- a. *Identity* yaitu menetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- b. *Break work down* yaitu membagi kegiatan kepada setiap anggota organisasi.
- c. Tugas-tugas kelompok menjadi posisi-posisi.
- d. Tentukan persyaratan setiap posisi.
- e. Kelompok-kelompok posisi menjadi satuan-satuan yang dapat dipimpin dan saling berhubungan dengan baik.
- f. Membagi pekerjaan, pertanggungjawaban, dan luas kekuasaan yang akan dilaksanakan.
- g. Ubah dan sesuaikan organisasi sehubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi yang berubah-ubah.
- h. Berhubungan selalu selama proses pengorganisasian.

Menurut Rivai (2009), asas dalam organisasi ialah sebagai berikut.

- a. Organisasi harus profesional, yaitu dengan pembagian satuan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan pembagian kerja.
- c. Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.
- d. Organisasi harus mencerminkan rentangan kontrol.
- e. Organisasi harus mengandung kesatuan perintah.
- f. Organisasi harus fleksibel dan seimbang.

Pada prinsipnya pengorganisasian ditujukan untuk menghimpun semua kekuatan yang ada dalam organisasi tersebut agar terjadi sinergi positif, sehingga tercipta penyelenggaraan manajemen yang optimal di organisasi.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Menurut George R. Terry (2005), *actuating* atau diistilahkan pula dengan *motivating* merupakan usaha menggerakkan seluruh anggota kelompok, sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan pribadi anggota. Jika fungsi perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen lebih dititikberatkan pada aspek-aspek abstrak proses manajemen, maka

dalam proses ini lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi, dengan kata lain merupakan tindakan konkret atau merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi nyata. Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui berbagai pengarahan, agar tiap anggota dapat melaksanakannya secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya.

Dalam proses pelaksanaan *actuating*, ada beberapa hal yang dapat memotivasi anggota melewati tahapan ini dengan baik seperti berikut.

- a. Meyakinkan tiap individu, bahwa ia mampu mengerjakan.
- b. Pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- c. Memastikan bahwa tiap anggota tidak sedang dibebani oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak.
- d. Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan.
- e. Harmonisnya hubungan antar satu sama lain.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, berikutnya masuk dalam tahapan pengawasan (*controlling*). Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Hal yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan menjadi efektif, jika dilakukan fungsi pengawasan.

Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin, bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Terry, 2005). Dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi

tercapai. Apabila, terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Lima tahapan dalam proses pengawasan, yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisisan berbagai penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

Fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan saling berinteraksi dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen. Empat fungsi di atas merupakan empat fungsi yang dianggap paling esensi berdasarkan rumusan para ahli (Terry, 2005).

B. Konsep Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan mentransformasi konsep manajemen umum yang lahir dari dunia bisnis. Manajemen pendidikan atau manajemen sekolah terkadang dimaknai berbeda dengan istilah administrasi sekolah. Namun, dalam kajian ini manajemen diartikan sama dengan administrasi atau pengelolaan (Direktorat PLB, 2004). Dalam manajemen pendidikan mengandung dua dimensi yang konsisten dan saling terkait, yakni dimensi yang berdasarkan konsep-konsep manajemen dan dimensi yang berdasarkan pada konsep-konsep pendidikan.

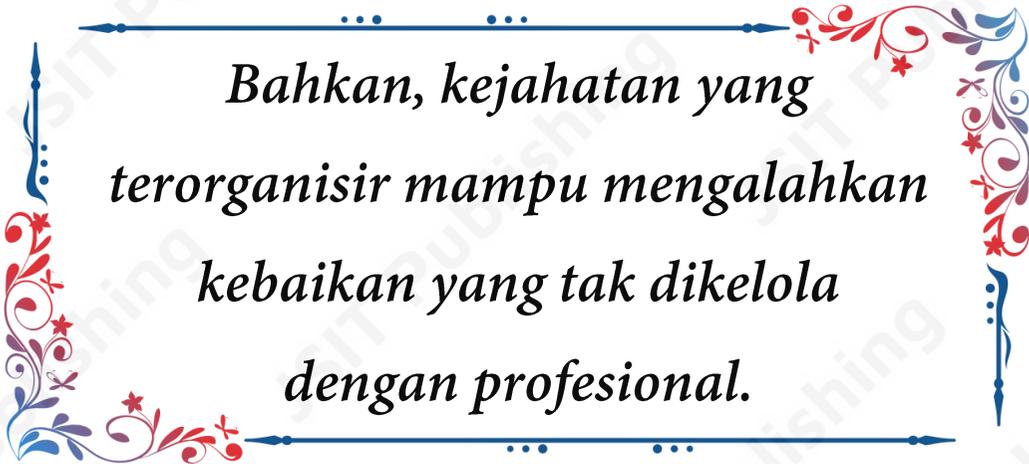
Dalam buku "Administrasi Pendidikan" karya Uhar Suharsaputra (2010), berikut beberapa ahli mendefinisikan manajemen pendidikan.

1. Menurut Djam'an Satori, manajemen pendidikan ialah keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan materiil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
2. Menurut Made Pidarta, manajemen pendidikan ialah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan, agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Menurut Caster, *the management is a social process that takes place within the context of social system.*
4. Menurut Soebagio Atmodiwirio, manajemen pendidikan ialah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, dan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.
5. Menurut Engkoswara, manajemen pendidikan ialah proses menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia urut serta di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hikmat (2011), fungsi manajerial dalam pendidikan dapat dilihat dari beberapa fungsi. Pertama fungsi edukatif, yaitu mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan. Kedua, pengembangan kedewasaan berpikir melalui proses transmisi ilmu pengetahuan. Ketiga, penguatan keyakinan terhadap kebenaran yang diyakini dengan pemahaman ilmiah. Terakhir *religious*, bagian dari pengabdian hamba kepada Sang Pencipta.

Di lain pihak, Direktorat Pendidikan Menengah Umum telah menerbitkan buku Panduan Manajemen Sekolah, yang di dalamnya menyetengahkan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan, meliputi manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen sarana serta prasarana sekolah.



*Bahkan, kejahatan yang
terorganisir mampu mengalahkan
kebaikan yang tak dikelola
dengan profesional.*

BAB 4

Manajemen dalam Perspektif Islam



Gambar 4.1 Manajemen islamiah.
Sumber: Dokumen penerbit.

Terkait dengan pembahasan manajemen, maknanya membahas tentang keteraturan dalam melaksanakan sebuah pekerjaan atau amal, dimulai dari awal hingga akhir. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu bermula dari niat, bergerak dalam proses, dan hingga menuju pencapaian tujuan. Niat, proses, dan tujuan, ketiga hal tersebut harus sejalan dengan kebaikan.

Dalam beramal, Islam mengajarkan totalitas, tidak dianjurkan untuk melaksanakannya dengan seadanya ataupun semaunya. Tidak sah juga beramal tanpa bekal ilmu atau bergerak tanpa memiliki tujuan yang jelas, karena setiap amal akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Sekecil apa pun urusan diselesaikan dengan teratur dan terarah, mulai urusan pribadi apalagi menyangkut organisasi.

Mengelola atau mengatur (*dabbara–yudabbiru*), tersirat dalam salah satu ayat Al-Qur'an surah as-Sajdah ayat 5 berikut.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya:

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.”

Allah Swt. mengatur alam semesta. Dia adalah Sang Pengatur (*Mudabbir*) atau bisa dikatakan Sang Manajer. Dia yang mengatur bumi, langit, dan seisinya. Keteraturan alam raya merupakan bukti kebesaran Allah Swt. dalam mengelola semua. Manusia yang dicipta sebagai *khalifah fil arḍ*, khalifah di muka bumi, mempunyai tugas untuk menjaga dunia ini dengan baik.

Rasulullah sebagai sosok manusia yang dijadikan contoh, termasuk peran beliau sebagai super manajer (Antonio dkk, 2007). Sesungguhnya, manajemen sudah ada, ketika manusia ada, dan tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari di dalam mengatur hidupnya. Adapun tuntunan dan acuan manajemen di dalam Islam ialah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis. Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad saw. sebagai salah seorang yang sangat ahli manajemen dalam agama, politik, sosial, maupun ekonomi. Beliau adalah pemimpin yang wajib dicontoh dan diteladani oleh umat Islam.

Dalam Islam, diajarkan tentang makna *ihsan*. Yakni, melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, mulai dari niat, rencana, pelaksanaan, hingga evaluasi atas apa yang sudah dikerjakan.

Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (*Al-Idarah*) ialah,

الإدارة هي معرفة إلى أين تذهب ومعرفة المشاكل التي تجنبها ومعرفة القوي والعوامل التي تنعرض لها معرفة كيفية التصرف لك ولبا خرتك والطاغم الباحرة وبكفاءة وبدون ضياع في مرحلة الذهاب إلى هناك.

Artinya:

“Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal serta anggota dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya (efesien dan efektif).”

Dari definisi di atas, manajemen merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara optimal (sesuai dengan upaya yang bisa dilakukan sebaik-baiknya) melalui kolaborasi dengan berbagai pihak sesuai dengan kapasitas dan perannya.

Pernyataan yang pernah disampaikan Ali bin Abi Thalib relevan dengan berbagai teori manajemen yang muncul di abad ini.

أَلْحَقُّ بِلَا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

Artinya:

“Kebenaran yang tidak terorganisasi dengan rapi, dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik.”

A. Ruang Lingkup Manajemen

Ruang lingkup manajemen yang dipahami secara umum, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Mari kita kaji dari sumber Al-Qur'an dan hadis!

1. التخطيط atau *Planning*

Perencanaan adalah gambaran dari sesuatu kegiatan yang akan datang dengan waktu dan metode tertentu. Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya:

“Sesungguhnya, Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itqan yakni tepat, terarah, jelas, tuntas.” (H.R. Thabrani)

Allah Swt. berfirman dalam surah al-Insyirah ayat 7-8 berikut.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya:

“Maka, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.”

Nabi Muhammad saw. bersabda, *“Allah menulis kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hamba-Nya, barangsiapa yang berencana melakukan kebaikan tapi tidak melaksanakan, maka tetap ditulis sebagai satu amal yang baik yang sempurna baginya oleh Allah, tetapi barangsiapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul dilaksanakan, maka oleh Allah ditulis 10 kebaikan dan 700 lipat/cabang sampai cabang yang banyak, sebaliknya barangsiapa yang berencana melakukan kejelekan tetapi tidak dilakukan, maka ia dianggap melakukan kebaikan yang sempurna, jika ia berencana melakukan kejelekan dan melaksanakannya maka ditulis sebagai satu kejelekan.”* (H.R. Bukhari Muslim)

Maka dari itu, *plan your work, work your plan*. Buatlah perencanaan sebelum melakukan sesuatu. Perencanaan hanya menjadi rencana saja, jika tidak dilaksanakan.

2. التنظيم atau Organization

Manusia sebagai makhluk individual yang memiliki keunikan sendiri, berbeda antara manusia satu dengan lain, dan mempunyai kebutuhan untuk menjadi manusia sosial. Manusia bertumbuh dan berkembang dengan manusia lainnya. Tidak ada satu manusia hebat sekalipun yang bisa hidup seorang diri, satu sama lain saling membutuhkan. Apalagi, jika sekumpulan manusia tersebut mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, maka dibutuhkan pengorganisasian yang baik. Islam mengajarkan bangunan yang kokoh sebagai perumpamaan sebuah organisasi yang tersusun dari saf-saf

yang rapi terorganisir, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah as-Shaff ayat 4 berikut.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.”

Manajemen diumpamakan seperti sebuah bangunan yang dibangun atas pondasi yang kuat, tiang-tiang yang kokoh, dan atap yang melindungi. Dalam organisasi, manajemen merupakan kegiatan bersama. Dalam individu, manajemen diri merupakan sinergi antara anggota tubuh sesuai dengan perannya masing-masing. Pendelegasian tugas dan kewenangan bagi masing-masing anggota harus dipahami bersama, sehingga terwujud koordinasi yang baik. Dalam Al-Qur’an, surah Ali ‘Imran ayat 103 dikatakan pentingnya koordinasi dan kekompakan, serta kesamaan pijak dalam bergerak.

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا^ج وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya:

“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”

Hal yang perlu digarisbawahi dalam berorganisasi adalah tiap jiwa memiliki potensi yang berbeda. Keberbedaan inilah yang

mengharmonisasi, jika sinergi bisa dijalani. Kembali ayat yang terkait tentang keunikan tiap insan ditampilkan pada bab ini.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya” (Q.S. al-Baqarah: 286)

Dalam sebuah organisasi, masing-masing individu berkontribusi sesuai dengan kompetensinya, seperti terdapat pemimpin, konseptor, pelaksana teknis, dan lain sebagainya. Semua bahu-membahu menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Perbedaan potensi ini secara fitrah mengharuskan manusia melakukan kerja sama antara mereka untuk mencapai tujuan kebaikan bersama, seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2.

Kerja sama dalam organisasi, manusia tentu menerapkan sistem pendelegasian. Objek yang didelegasikan terdiri dari tugas pekerjaan, kekuasaan, atau amanah. Pendelegasian ini harus memperhatikan hal berikut.

- a. Penerima delegasi harus mempunyai kapasitas dan potensi yang mumpuni berkaitan dengan objek yang didelegasikan.
- b. Penerima delegasi harus memiliki intelektual *skill* yang cocok dan baik atau kompeten.
- c. Penerima delegasi harus benar terbukti memiliki reputasi jujur.
- d. Penerima delegasi harus kredibel (*ṣiddiq*).
- e. Penerima delegasi mampu melaksanaan tugas yang diberikan secara fisik dan batin.
- f. Adanya kejelasan tanggung jawab pada pendelegasian.
- g. Pemberian hak sesuai potensi dan tanggung jawab.

3. العمل atau *Actuating*

Aksi adalah amal nyata, yang merupakan bukti terlaksananya apa yang telah direncanakan. Bagus dalam perencanaan tanpa

dilaksanakan, maka akan menjadi sia-sia. Hal tersebut ibarat orang yang hanya bisa bicara atau berteori, namun tidak melakukan aksi apa-apa. Dalam Islam, orang yang demikian diancam dengan kemurkaan Allah Swt.. Allah Swt. berfirman dalam surah as-Shaff ayat 2 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?”

Ketika merealisasikan rencana dalam bentuk berbagai kegiatan, maka yang perlu diperhatikan adalah fokus pada proses bukan hasil, apalagi berharap penilaian manusia. Lakukan seoptimal mungkin sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, telah dijaminakan bagi mereka, bahwa yang bekerja atau beramal akan dilihat langsung oleh Allah Swt., Rasulullah, dan orang beriman.

وَقُلْ اْعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” (Q.S. at-Taubah: 105)

4. الرقابة atau Controlling

Tahap keempat ini acap kali terlewat, setelah membuat perencanaan, kemudian mengatur tata laksananya, lalu pelaksanaan. Sejak awal pengontrolan perlu dilakukan. Ketika melakukan perencanaan, pengontrolan dibutuhkan untuk dapat merancang rencana yang baik dan realistis. Ketika mulai mengorganisir perencanaan tersebut, kembali dikontrol apa yang sudah sesuai dengan tata laksana yang berlaku. Ketika melakukan pelaksanaan, pengontrolan, atau pengawasan sangat diperlukan agar dijaminakan pelaksanaan tersebut berjalan sesuai rencana. Setelah selesai

aktivitas, semua hasil pengontrolan tersebut menjadi bahan evaluasi sebagai pijakan tindak lanjut berikutnya. Terkait pengontrolan dan pengawasan, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan hal tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. at-Tahrim: 6)

Dalam manajemen, seorang manajer yang paling bertanggung jawab. Manajer bertugas menjaga dan mengawasi. Dimulai dari manajemen diri sendiri dengan baik, kemudian organisasinya. Islam mengajarkan untuk senantiasa melakukan evaluasi diri (*muhasabah*). Evaluasi bertujuan sebagai alat kontrol atas perilaku dan amal yang dilakukan. Pengontrolan menjadi penting untuk mengetahui ketercapaian sebuah tujuan. Melalui pengontrolan akan diketahui pula faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan. Acap kali perencanaan bagus dirancang, namun tidak dijalankan sehingga menjadi sia-sia. Rencana harus ditindaklanjuti dengan aksi. Aksi harus dievaluasi, apakah sudah sesuai dengan rencana yang disepakati.

Dalam ayat yang lain, Allah Swt. menjelaskan bahwa kontrol yang utama ialah dari Allah Swt..

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

“Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Mujadalah: 7)

Para pelaksana institusi akan melaksanakan tugasnya dengan konsisten sesuai dengan yang diembannya, bahkan lebih-lebih meningkatkan spirit, karena mereka menganggap setiap tugas merupakan pertanggungjawaban yang paling utama kepada Sang Khaliq yang mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluk-Nya.

Jarir bin Abdillah berkata, *“Aku baiat pada Rasulullah untuk menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara sesama muslim.”*

Menasihati sesama teman atau saudara lebih mudah daripada menasihati atasan atau pimpinan, ini tidak mudah dilakukan, karena itu Nabi Muhammad saw. dalam hadis berikut menyampaikan imbalan yang lebih banyak bagi orang yang mau dan mampu melakukan pengawasan kepada atasannya. Nabi bersabda, *“Seorang hamba apabila melakukan dengan baik dalam ibadah kepada Tuhannya, maka akan diberkahi, dan yang menasihati tuannya akan diberi pahala dua kali.”*

Pengawasan bermanfaat untuk saling menasihati, mengingatkan, mengoreksi, dan memperbaiki. Sistem pengawasan ini akan efektif, jika dilengkapi dengan *reward* dan konsekuensi hingga pemberian hukuman.

B. Prinsip Manajemen Perspektif Islami

Di bawah ini merupakan prinsip-prinsip manajemen perspektif islami.

1. Bersungguh-sungguh

Kinerja dan etos kerja seseorang akan baik, jika ia melaksanakan dengan sungguh-sungguh di setiap pekerjaannya. Dengan bersungguh-

sebenarnya, yang tampak sulit akan menjadi lebih mudah. Melalui kesungguhan, tujuan akan mudah tercapai. Sebagaimana janji Allah Swt., bahwa siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka mereka akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Ankabut ayat 69 berikut.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.”

2. Berkesinambungan

Dalam Al-Qur’an surah al-Insyirah ayat 7 dijelaskan seperti berikut.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya:

“Maka, apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain).”

3. Efisiensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efisiensi adalah ketepatan cara (usaha atau kerja) dalam menjalankan sesuatu (tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya), kedayagunaan, ketepatangunaan, serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Efisiensi dalam organisasi yang paling utama adalah tentang waktu. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-‘Asr ayat 1-3.

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝٣ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٤

Artinya:

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran.”

Jika Allah Swt. bersumpah terhadap sesuatu, maknanya ada hal luar biasa penting untuk diperhatikan. Demi waktu, kerugian bagi yang tak mampu memanfaatkan waktu dengan baik.

Perintah efisien dari sisi penggunaan sumber daya atau fasilitas tersirat dalam firman Allah Swt. surah al-A'raf ayat 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

"Hai anak Adam, pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat di atas, menganjurkan bagi setiap muslim haruslah mempergunakan apa pun yang perlu dipergunakan, tetapi Allah sangat membenci orang-orang yang melampaui batas. *Israf* adalah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak disukai Allah Swt.. Jangan mengeluarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan.

4. Musyawarah

Pemikiran bersama jauh lebih baik daripada pemikiran seorang, walau ia paling pandai sekalipun dalam sebuah kelompok. Untuk itu, musyawarah perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan penting. Seluruh anggota harus memahami kondisi dan masalah organisasi, agar musyawarah dapat dilakukan dengan baik. Allah Swt. berfirman,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. asy-Syura: 38)

5. Bekerja Sama

Bekerja sama ialah bukan sekedar sama-sama bekerja. Namun, masing-masing bekerja sesuai uraian kerja dan kapasitasnya,

kemudian saling memberi kontribusi dan bersinergi untuk mewujudkan tujuan organisasi.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Q.S. al-Maidah: 2)

6. Disiplin

Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan yang telah disepakati dalam sebuah kelompok, berguna untuk menjaga roda organisasi tersebut berjalan ke arah mimpi bersama. Melalui disiplin, seseorang akan melakukan sesuatu dengan tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan ini dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Disiplin masing-masing anggotanya akan membuat program berjalan dengan baik, karena setiap orang melaksanakan hal yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, tanpa kedisiplinan berbagai perencanaan tidak akan berjalan optimal, artinya tujuan organisasi yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai. Disiplin itu salah satu kunci pembangunan adab. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Naquib al-Attas, *“Knowledge includes moral purpose is right action that springs from self-discipline founded upon knowledge whose source is wisdom.”*

7. Husnuzan

Berada di lingkungan sosial, bekerja sama dengan banyak orang membutuhkan pikiran yang positif. Husnuzan atau berbaik sangka menjadi modalnya. Jika yang berkembang sebaliknya, yakni suuzan antar sesama anggota organisasi, maka bisa dipastikan kondisi organisasi akan sangat tidak harmonis. Prasangka tidak baik akan menimbulkan aura negatif yang menyebar di dalam organisasi. Islam mengajarkan husnuzan dan melarang suuzan. Berprasangka buruk merupakan suatu dosa yang wajib dihindari oleh setiap bagian dari suatu organisasi tertentu. Dikarenakan hal tersebut dapat

menimbulkan suatu perpecahan antarsesama. Hal ini diingatkan dalam Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 12 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَمْ تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

8. Akhlak Menjadi Panglima

Seseorang dilihat dari perilakunya. Sepintar apapun ia, setinggi apapun jabatannya, yang membuat orang merasa nyaman dengannya adalah akhlaknya. Dalam kehidupan sosial, manusia bertemu dengan banyak orang dengan banyak perbedaan. Kunci diterimanya seseorang dalam sosial ialah ketika ia memiliki akhlak yang baik. Akhlak adalah buah dari keimanan dan keistikamahan seseorang dalam menjalankan ibadah secara benar. Ibnu Miskawaih menyebutkan, bahwa akhlak adalah keadaan jiwa atau sifat seseorang yang mendorong melakukan sesuatu tanpa perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Akhlak sebagaimana ciri karakter adalah spontan.

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

Artinya:

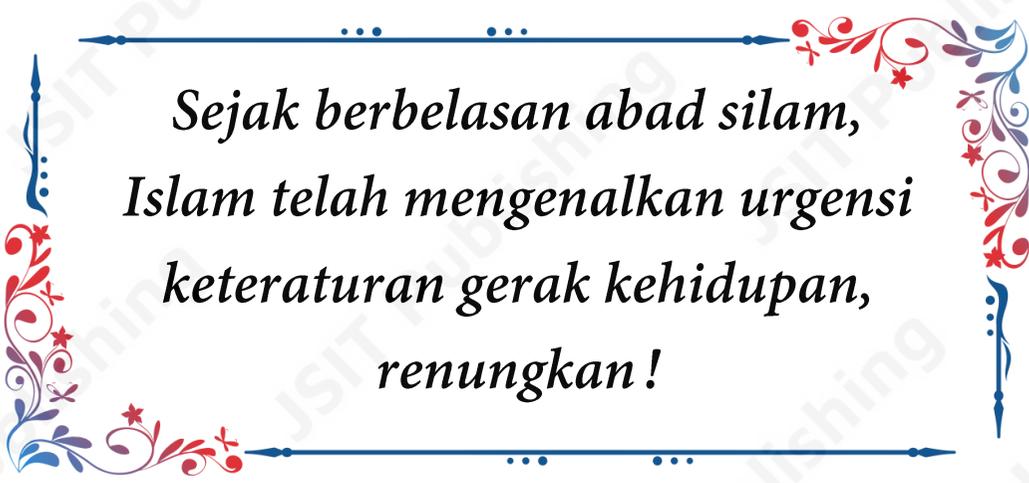
“Sesungguhnya Kami telah mensucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akhirat.” (Q.S. Sad: 46)

Di antara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, derwaman, rendah

hati, tutur kata yang lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, tawakal, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu menjaga sikap dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa dirinya diawasi oleh Allah Swt..

Seseorang yang memiliki akhlak terpuji telah disebutkan dalam hadis, bahwa ia akan memiliki timbangan yang berat kelak di hari kiamat, di mana semua amal manusia akan ditimbang. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, *“Tidak ada sesuatu yang diletakkan pada timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat.”* (H.R. Tirmidzi)

Demikianlah, beberapa hal terkait manajemen dalam pandangan Islam. Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki empat sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Seorang manajer sebagai penggerak roda organisasi harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen.



*Sejak berbelasan abad silam,
Islam telah mengenalkan urgensi
keteraturan gerak kehidupan,
renungkan!*

BAB 5

Kepemimpinan Menjadi Kunci



*Gambar 5.1 Lokakarya pendidikan inklusi SIT se-Indonesia.
Sumber: Divisi pendidikan inklusi JSIT Indonesia.*

JSIT Indonesia
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi

Leader atau pemimpin memiliki tugas untuk mengatur dan memimpin segala aktivitas pada tujuan. Dalam Al-Qur'an dan hadis banyak membahas tentang kepemimpinan. Di antaranya dalam surah al-An'am ayat 165 berikut.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

"Dialah yang menetapkan kamu menjadi penguasa di muka bumi, dan ditinggikan-Nya sebagaimana kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, sebagai cobaan bagimu tentang semua yang diberikannya kepadamu."

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga banyak yang membahas tentang kepemimpinan, di antaranya seperti berikut.

... أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ...

Artinya:

"... Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban mengenai orang yang kamu pimpin" (H.R. Muslim)

Pada hakikatnya, tugas kepemimpinan itu ada di pundak tiap individu. Setiap orang setidaknya harus mampu memimpin dirinya sendiri. Tidak ada pemimpin yang sukses memimpin orang lain, sebelum ia mampu memimpin dirinya sendiri. Memimpin diri sendiri ialah dengan cara mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada Sang Pencipta.

Kepemimpinan itu amanah atau kepercayaan. Kepemimpinan merupakan kontrak antara seorang pemimpin dan pengikutnya, di mana ia akan berusaha melakukan yang terbaik dalam rangka mendampingi pengikutnya, melindungi, dan melayani dengan *'fair'*, adil, dan bijaksana. Fokus kepemimpinan dalam Islam adalah *doing the good*.

A. Dasar-dasar Kepemimpinan dalam Islam

Tidak mengambil orang kafir atau orang yang tidak beriman sebagai pemimpin bagi orang-orang muslim, karena bagaimanapun akan mempengaruhi kualitas keberagamaan rakyat yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah an-Nisa ayat 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ أَتُرِيدُونَ أَنْ
تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?”

Tidak mengangkat pemimpin dari orang-orang yang mempermainkan agama Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah ayat 57.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِمَّنْ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya dan orang-orang kafir (orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.”

Pemimpin harus mempunyai keahlian di bidangnya, pemberian tugas atau wewenang kepada yang tidak berkompeten akan mengakibatkan rusaknya pekerjaan bahkan organisasi yang menaunginya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, *“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Pemimpin harus bisa diterima (*acceptable*), mencintai dan dicintai umatnya, mendoakan dan didoakan oleh umatnya, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya, *“Sebaik-baiknya pemimpin adalah mereka yang kamu cintai dan mencintai kamu, kamu berdoa untuk mereka dan mereka berdoa untuk kamu. Seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknati mereka dan mereka melaknati kamu.”* (H.R. Muslim)

Kepentingan umat, menegakkan keadilan, melaksanakan syariat, berjuang menghilangkan segala bentuk kemungkar, kekufuran, kekacauan, dan fitnah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Pemimpin harus memiliki bayangan sifat-sifat Allah Swt. yang terkumpul dalam Asmaul Husna dan sifat-sifat Rasul-rasul-Nya. Hal tersebut sebagaimana hadis berikut yang artinya, *“Sesungguhnya kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada seseorang yang memintanya, tidak pula kepada orang yang sangat berambisi untuk mendapatkannya.”* (H.R. Muslim)

Dalam hadis lain juga disebutkan yang artinya, *“Sesungguhnya engkau ini lemah (ketika Abu Dzar meminta jabatan dijawab demikian oleh Rasulullah), sementara jabatan adalah amanah, di hari kiamat dia akan mendatangkan penyesalan dan kerugian, kecuali bagi mereka yang menunaikannya dengan baik dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban atas dirinya.”* (H.R. Muslim)

B. Kriteria Pemimpin yang Baik

Di bawah ini merupakan kriteria pemimpin yang baik.

1. Niat yang Lurus

Hendaklah saat menerima suatu tanggung jawab, dilandasi dengan niat sesuai dengan apa yang telah Allah Swt. perintahkan. Lalu,

iringi hal itu dengan mengharapkan keridaan-Nya saja. Kepemimpinan atau jabatan adalah tanggung jawab dan beban, bukan kesempatan dan kemuliaan.

2. Profesional

Profesional dengan tidak aji mumpung karena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), sebagaimana dalam hadis yang artinya, *“Sesungguhnya Allah sangat senang pada pekerjaan salah seorang di antara kalian jika dilakukan dengan profesional.”* (H.R. Baihaqi)

Rasulullah saw. bersabda yang artinya, *“Barangsiapa yang menempatkan seseorang karena hubungan kerabat, sedangkan masih ada orang yang lebih Allah ridai, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan orang mukmin.”* (H.R. Al-Hakim)

Umar bin Khattab berkata, *“Siapa yang menempatkan seseorang pada jabatan tertentu, karena rasa cinta atau karena hubungan kekerabatan, dia melakukannya hanya atas pertimbangan itu, maka sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin.”*

Rasulullah saw. bersabda yang artinya, *“Jika sebuah perkara telah diberikan kepada orang yang tidak semestinya (bukan ahlinya), maka tunggulah kiamat (kehancurannya).”* (H.R. Bukhari)

3. Berpegang pada Hukum Allah Swt.

Ini salah satu kewajiban utama seorang pemimpin. Allah Swt. berfirman dalam surah al-Maidah ayat 49 yang artinya, *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”* Jika ia meninggalkan hukum Allah Swt., maka seharusnya dicopot dari jabatannya.

4. Memutuskan Perkara dengan Adil

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda yang artinya, *“Tidaklah seorang pemimpin mempunyai perkara, kecuali ia akan datang dengannya pada hari kiamat dengan kondisi terikat, entah ia akan diselamatkan oleh keadilan atau akan dijurusmuskan oleh kezalimannya.”* (H.R. Baihaqi)

5. Tidak Menutup Diri ketika Diperlukan

Hendaklah selalu membuka pintu untuk setiap pengaduan dan permasalahan rakyat. Rasulullah bersabda yang artinya, *“Tidaklah seorang pemimpin atau pemerintah yang menutup pintunya terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinan, kecuali Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap kebutuhan, hajat, dan kemiskinannya.”* (H.R. Ahmad dan Tirmidzi)

Rasulullah bersabda yang artinya, *“Tidaklah seorang pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, lalu ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak menasehati mereka, kecuali pemimpin itu tidak akan masuk surga bersama mereka (rakyatnya).”* (H.R. Nasa’i)

6. Tidak Menerima Hadiah

Seorang rakyat yang memberikan hadiah kepada pemimpin pasti mempunyai maksud tersembunyi, boleh jadi ingin mendekati atau mengambil hati. Oleh karena itu, hendaklah seorang pemimpin menolak pemberian hadiah dari rakyatnya. Rasulullah bersabda yang artinya, *“Pemberian hadiah kepada pemimpin adalah pengkhianatan.”* (H.R. Thabrani)

7. Pemimpin yang Baik

Rasulullah bersabda yang artinya, *“Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau menjadikan seorang khalifah, kecuali ada bersama mereka itu golongan pejabat (pembantu). Yaitu pejabat yang menyuruh kepada kebaikan dan mendorongnya ke sana, dan pejabat yang menyuruh kepada kemungkaran dan mendorongnya ke sana. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah.”* (H.R. Bukhari)

8. Lemah Lembut

Rasulullah saw bersabda, *“Ya Allah, barang siapa yang berlemah-lembut terhadap umatku maka berlemah-lembutlah terhadapnya, dan barang siapa yang mempersulit umatku maka persulitlah ia.”* (HR. Ahmad)

9. Tidak Meragukan dan Memata-Matai atau Curiga pada Pengikut

Rasulullah bersabda yang artinya, *“Jika seorang pemimpin menyebarkan keraguan dalam masyarakat, ia akan merusak mereka,”*

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Al-Hakim). Dalam implementasinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berstrategi yang baik dalam memimpin.

10. Menjalani Proses sebagai Tantangan yang Menarik

Menikmati proses yang ada, dan meyakini hasil menjadi konsekuensi logis dari perjalanan ikhtiar yang optimal. Berbagai kendala yang ada dalam perjalanan, dimaknai sebagai tantangan yang membuat semakin bersemangat belajar dan berjuang.

11. Berbagi Visi untuk Menginspirasi

Sang pemimpin menyampaikan visi kepada semua anggota organisasi. Selanjutnya, mengajak semua berkontribusi membangun mimpi bersama menjadi visi organisasi. Visi bukan hanya dipahami pemimpin, namun hakikatnya dimiliki oleh semua anggota.

12. Delegasi: Mengajak Semua Terlibat

Memberikan peran ke masing-masing anggota secara proposional dan sesuai kapasitasnya, akan membuat semua orang merasa terlibat dan dilibatkan. *One man show*, bukanlah kehebatan, namun kekurangan.

13. Menjadi Panutan

Berbicara tentang akhlak, pastinya sedikit menyinggung masalah bagaimana sikap atau tata cara seorang pemimpin menghadapi bawahannya. Hal ini jelas disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 44.

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya:

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka, tidaklah kamu berpikir?"

Hampir semua atasan adalah yang lebih mengetahui dibandingkan bawahan, meskipun tidak secara kafah, akan tetapi hendaknya seorang atasan ada baiknya mengemukakan terdahulu apa yang ia inginkan dan menjelaskan tujuannya sekaligus memberikan contoh kepada bawahannya. Artinya, jika seseorang atasan menyuruh

bawahannya, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri, tidak mungkin kita menyuruh bawahan kita bersikap baik, sedangkan kita tidak.

14. Sentuhlah Hatinya

Bicara dari hati akan sampai ke hati. Pastikan kondisi spiritual (*ruhiyah*) seorang pemimpin terjaga, agar tingkah laku yang terpancar buah dari iman dan ibadah yang benar. Terus berupaya untuk meluruskan niat, membersihkan hati akan menghasilkan hubungan yang baik antar manusia.

Dalam manajemen tugas seorang pemimpin salah satunya adalah sebagai supervisor. Berikut kisah yang bisa kita ambil ibrah dan hikmahnya tentang peran supervisor.

Umar bin Khattab r.a. Sang Supervisor

Saat mengkaji tentang urgensi supervisi pimpinan sekolah dalam dunia pendidikan, tiba-tiba saja teringat kembali tentang kisah Sahabat Umar bin Khattab r.a. dan seorang ibu pemasak batu. Ya, kisah ini menginspirasi akan sesosok model supervisor yang profesional. Saya pun mencoba kembali mengurai episode demi episode.

Berawal dari rutinitas Umar sebagai seorang pemimpin yang senantiasa blusukan, masuk kampung ke luar kampung. Setiap malam secara sembunyi-sembunyi, ia berkeliling negeri, apalagi pada masa paceklik saat itu. Ia berusaha memastikan kondisi rakyatnya dalam keadaan tidak berkekurangan. (Sebuah rutinitas yang wajib dilakukan seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya. Terkadang supervisi dapat pula dilakukan tidak terjadwal dan mendadak atau bahkan diam-diam, sehingga dapat melihat realita yang ada, bukan sesuatu yang telah dipersiapkan).

Suatu malam, Umar dan ajudannya, Aslam, meninjau sebuah kampung yang letaknya di pelosok negeri. Dalam perjalanan, tampak di kejauhan seberkas cahaya api yang muncul dari sebuah rumah. Seperti ada magnet tertentu, Umar tertarik untuk mendekati rumah itu (Feeling seorang supervisor yang sudah terasah, akan dapat menangkap sinyal yang 'berbeda', sehingga ia akan peka untuk dapat merasakan adanya sebuah masalah). Umar pun mengajak Aslam untuk menyambangi rumah itu.

Saat mereka telah berada di sekitar gubuk tersebut, didengarnya suara

tangisan anak. Umar mencoba mengetahui lebih jauh. Ia pun dipersilahkan masuk oleh sang tuan rumah, setelah sebelumnya meminta izin untuk bertandang. Sesaat di dalam gubuk, tampak olehnya seorang ibu yang sedang memasak, dan di belakangnya anak-anak yang menangis. Rasa ingin tahu Umar semakin bertambah, ia pun semakin mendekat. Betapa terkejutnya Umar dan Aslam saat mengetahui apa yang sedang dimasak si ibu, seongkah batu. (Supervisor berusaha melakukan observasi sedalam mungkin, untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap dan akurat).

Umar bertanya perihal apa yang dimasaknya dan mengapa anaknya menangis. Berceritalah si ibu atas pertanyaan Umar r.a.. Ia terpaksa mengelabui anak-anaknya dengan pura-pura memasak sesuatu, padahal ia hanya memasak batu. Si ibu berharap, anak-anaknya akan tertidur saat menunggu matangnya masakan dan tidak lagi menangis meminta makan. (Observasi tidak cukup sekedar mengandalkan pengamatan, dibutuhkan klarifikasi melalui interviu, khususnya pada orang yang sedang diobservasi).

Ibu itu melanjutkan ceritanya. Di antara ceritanya itu, si ibu menyinggung tentang pemimpin negerinya, yang dirasa kurang peka terhadap permasalahan sosial. Umar mendengarkan dengan saksama, tidak terbesit sedikit pun wajah tersinggung atas ucapan si ibu, apalagi marah. Sebaliknya, rasa bersalah dan penuh empati yang muncul di

wajahnya. (Supervisor adalah orang 'atas' yang melihat ke 'bawah'. Walaupun orang yang lebih tinggi jabatannya, supervisor harus siap menerima kritikan dan berusaha merespon positif kritikan tersebut sebagai masukan konstruktif).

Umar pun pamit sebentar, ia mengajak Aslam untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Umar mengumpulkan berbagai persediaan pangan yang ada di rumahnya. Selanjutnya, ia bergegas pergi menuju rumah si ibu tadi. Dalam perjalanan, Aslam berusaha membantu Umar r.a.. Selain tugasnya sebagai ajudan untuk senantiasa membantu tuannya, ia pun tak tega melihat Umar tergopoh-gopoh dan sesekali tersuruk akibat bawaan yang berat. Namun, Umar menolaknya dengan halus seraya berkata, "*Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka. Engkau akan menggantikan aku memikul beban ini, apakah kau kira engkau mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?*" (Seorang pemimpin yang bertanggung jawab,

selalu berani mengatakan, *“Akulah yang paling bertanggung jawab atas kekurangan atau kesalahan yang terjadi dalam organisasi ini.”* Pemimpin pun manusia biasa yang mungkin berbuat khilaf. Sebaliknya, ia pun dengan rendah hati mengatakan, *“Semua keberhasilan ini adalah buah dari kerja sama semua pihak, bukan karena saya sendiri.”* Jika dalam supervisi tampak berbagai kekurangan atau hal-hal yang tidak sesuai yang dilakukan guru, yang pertama yang harus dimunculkan adalah evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan pemimpin selama ini, apakah ia telah melakukan pembinaan secara benar. Selanjutnya menjadi kewajiban supervisorlah untuk mengarahkan, membimbing, dan menunjukkan pada si guru apa yang seharusnya dilakukan. Fungsi supervisi bukan sekedar mengawasi namun menjamin proses sebuah pekerjaan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku).

Sesampainya di rumah itu, Umar segera memberikan semua sembako yang ia bawa. Betapa bahagia dan terharunya si ibu. Ucapan syukur dan terima kasih tidak putus diucapkannya, seraya mendoakan agar pemimpinnya pun bisa sebaik dan sedermawan bapak si pengasih tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah pemimpinnya sendiri. Umar membalasnya dengan janji, bahwa apa yang diharapkan si ibu, akan tersampaikan ke sang pemimpin. (Terkadang pembelaan diri, menonjolkan jati diri, dan mengklarifikasi kebenaran pribadi tidak lebih dibutuhkan seorang pemimpin. Aksi dan bukti nyata akan lebih bermakna dari sejuta argumentasi dan apologi).

*Pemimpin mengayomi
bukan menzalimi,
memotivasi bukan menakuti,
pasti akan diikuti tak ditinggali.*

BAB 6

Mengapa Inklusi?



Gambar 6.1 Kita semua saling menjaga.
Sumber: vectorstock.com

Landasan Pendidikan Inklusif



*Gambar 6.2 Negara menjamin pendidikan bagi difabel.
Sumber: SIT Sekolah Alam Palangkaraya.*

1. Landasan Filosofis

Negara Indonesia memiliki simbol keberagaman yang dilambangkan dengan lambang negara burung garuda yang berslogan *Bhinneka Tunggal Ika*. Filosofat *Bhinneka Tunggal Ika* dimaknai dengan pengakuan akan adanya keanekaragaman di masyarakat, namun tetap dalam satu kesatuan. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya, hingga potensi setiap individu dianggap sebagai kekayaan dan aset bangsa (Suyanto dan Mudjito, 2012). Keragaman akan menjadi aset, jika adanya keragaman tetap dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pengertian hak asasi manusia, setiap manusia berhak untuk hidup layak, berhak menikmati pendidikan, berhak menerima layanan kesehatan, dan berhak mendapatkan pekerjaan. Hal ini telah disepakati secara universal di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia pun sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia.

2. Landasan Spiritual

Jika ditilik dari sudut pandang agama (khususnya Islam) ditegaskan hal-hal sebagai berikut.

- a. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah.
- b. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan, bukan karena fisik tetapi takwanya.
- c. Allah Swt. tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri.
- d. Manusia diciptakan berbeda-beda (inklusif) untuk saling silaturahmi.
- e. PDBK (Peserta Didik Berkebutuhan Khusus) layak mendapatkan kesempatan belajar.

“*Kullu mauludin yūladu ‘alal fitrah,*” setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, demikian yang termaktub dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menekankan, bahwa pada dasarnya setiap anak itu suci, bersih, baik, dan sempurna, sebagaimana ditegaskan pula dalam surah at-Tin ayat 4 berikut.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya:

“*Sesungguhnya Kami ciptakan manusia dalam wujud yang sempurna.*”

Fitrah juga dimaknai dengan kelurusan dan kebaikan perilaku. Perubahan yang terjadi pada seseorang ditentukan dari siapa yang mendidiknya.

Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hujarat ayat 13 berikut.

... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ...

Artinya:

“*... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu ...*”

Seseorang dinilai mulia atau hebat, bukan dari rupa yang bagus, bukan pula dari kekayaannya, bukan juga dari kecerdasannya. Kemuliaan seseorang itu dilihat dari kebaikan perilaku dan tingkah lakunya.

Semangat untuk senantiasa berusaha berubah menjadi lebih baik, semakin dimotivasi dengan turunnya ayat 11 dalam surah ar-Ra’ad yang

artinya, *“Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga kaum itu merubah dirinya.”* Allah Swt. memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berikhtiar mengubah nasibnya. Misalnya, seseorang yang dikaruniakan keterbatasan dalam hal fisik, tetap dapat hidup dengan layak, bahkan bermanfaat bagi orang lain dengan cara berusaha melihat kekurangannya menjadi potensi, melalui pendidikan hal tersebut dapat diwujudkan.

Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling mengenal dan bekerja sama. Konsep tersebut disinyalir dalam Al-Qur’an surah al-Hujarat ayat 12. Pada hakikatnya, keberbedaan itu ada untuk memberi warna bagi kehidupan. Masing-masing individu dengan kekhasannya diperintahkan untuk saling berinteraksi. Melalui interaksi inilah akan tercipta sinergi kebersamaan yang dalam bahasa Islam dikenal dengan istilah ukhuwah.

Dikisahkan tentang seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang kepada Nabi Muhammad saw. yang pada saat itu sedang bercengkerama dengan para pejabat Quraisy dalam rangka dakwah memperkenalkan Islam. Dalam kondisi yang begitu serius dan berharap para pejabat Quraisy itu mendapat hidayah hingga memeluk Islam, Rasulullah sempat mengabaikan kedatangan Abdullah dengan memalingkan wajah dan bermuka masam. Kisah ini diabadikan dalam surah ‘Abasa (Ia Bermuka Masam) ayat 1-4 yang artinya, *“Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu bermanfaat kepadanya?”*

Surah tersebut diturunkan dalam rangka teguran Allah Swt. terhadap sikap Rasulullah saw. kepada Abdullah bin Ummi Maktum, yang merupakan seorang penyandang tunanetra. Teguran ini pun bukan sekedar ditujukan kepada Rasulullah saw., namun sekaligus pelajaran berharga bagi umat manusia, khususnya muslim. Islam menegaskan dalam surah ini, bahwa seorang cacat sekalipun layak diberi kesempatan belajar.

Hal ini dipertegas pula dalam surah an-Nur ayat 61 yang artinya, *“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan*

(bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu”

Dalam surat an-Nisa ayat 9 hal senada juga dijelaskan, *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.”*

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis formal, pemerintah telah membuat landasan pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2), *“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”* Selanjutnya, landasan formal lainnya termaktub dalam bentuk undang-undang, yakni sebagai berikut.

a. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal (48), *“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.”*

b. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5, Ayat (1), *“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”*

Ayat (2), *“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Ayat (3), *“Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.”*

Ayat (4), *“Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”*

Pasal 11 Ayat (1) dan (2), *“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”*

“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”

Pasal 12 Ayat (1), *“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:*

(b) *“mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;*

(e) *setiap peserta didik berhak pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara.”*

Pasal 32 Ayat (1), *“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa.”*

Ayat (2), *“Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”*

Dalam Pasal 15 alinea terakhir dijelaskan bahwa, *“Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”*

Pasal 45 Ayat (1), *“Setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”*

Berikutnya, landasan yuridis pelaksanaan pendidikan inklusif dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 2 Ayat (1) Lingkungan Standar Nasional Pendidikan, meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Kependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, serta Standar Penilaian Pendidikan.

Dalam peraturan pemerintah tersebut, juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Kekuatan landasan pelaksanaannya dapat dilihat pula dari Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif, menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

4. Landasan Empiris

Berikut adalah landasan empiris dalam pelaksanaan konsep pendidikan inklusif.

- a. Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 (*Declaration of Human Rights*).
- b. Konvensi Hak Anak tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*).
- c. Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990 (*World Conference on Education for All*).
- d. Resolusi PBB Nomor 48/96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*The Standard Rules on The Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities*).
- e. Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, tahun 1994 (*The Salamanca Statement on Inclusive Education*).
- f. Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua tahun 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*).
- g. Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen 'Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif'.
- h. Rekomendasi Bukittinggi tahun 2005 yang menyatakan, bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai berikut (Suyanto dan Mudjito, 2010).
 - 1) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin, bahwa strategi nasional untuk 'pendidikan untuk semua' adalah benar-benar untuk semua.
 - 2) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak, pra sekolah, pendidikan dasar, dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh

pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi.

- 3) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara.

Di samping itu, juga menyepakati rekomendasi berikut ini untuk lebih meningkatkan kualitas sistem pendidikan di Asia dan benua-benua lainnya (Acedo, 2011).

- a. Inklusi seyogianya dipandang sebagai sebuah prinsip fundamental yang mendasari semua kebijakan nasional.
- b. Konsep kualitas seyogianya difokuskan pada perkembangan nasional, emosi dan fisik, maupun pencapaian akademik lainnya.
- c. Sistem asesmen dan evaluasi nasional perlu direvisi agar sesuai dengan prinsip-prinsip nondiskriminasi dan inklusi serta konsep kualitas sebagaimana telah disebutkan di atas.
- d. Orang dewasa seyogianya menghargai dan menghormati semua anak, tanpa memandang perbedaan karakteristik maupun keadaan individu, serta seharusnya pula memperhatikan pandangan mereka.
- e. Semua kementerian seyogianya berkoordinasi untuk mengembangkan strategi bersama menuju inklusi.
- f. Demi menjamin pendidikan untuk semua melalui kerangka sekolah yang ramah terhadap anak (SRA), maka masalah nondiskriminasi dan inklusi harus diatasi dari semua dimensi SRA, dengan upaya bersama yang terkoordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah, donor, masyarakat, berbagai kelompok lokal, orang tua, anak, maupun sektor swasta.
- g. Semua pemerintah dan organisasi internasional serta organisasi nonpemerintah, seyogianya berkolaborasi dan berkoordinasi dalam setiap upaya untuk mencapai keberlangsungan pengembangan masyarakat inklusif dan lingkungan yang ramah terhadap pembelajaran bagi semua anak.
- h. Pemerintah seyogianya mempertimbangkan implikasi sosial maupun ekonomi bila tidak mendidik semua anak, dan oleh karena itu dalam manajemen sistem informasi sekolah harus mencakup semua anak usia sekolah.

- i. Program pendidikan prajabatan maupun pendidikan dalam jabatan guru, seyogianya direvisi guna mendukung pengembangan praktik inklusi sejak pada tingkat usia prasekolah hingga usia-usia di atasnya dengan menekankan pada pemahaman secara holistik tentang perkembangan dan belajar anak termasuk pada intervensi dini.
- j. Pemerintah (pusat, propinsi, dan lokal) dan sekolah seyogianya membangun dan memelihara dialog dengan masyarakat, termasuk orang tua, tentang nilai-nilai sistem pendidikan yang nondiskriminatif dan inklusif.

5. Landasan Pedagogis

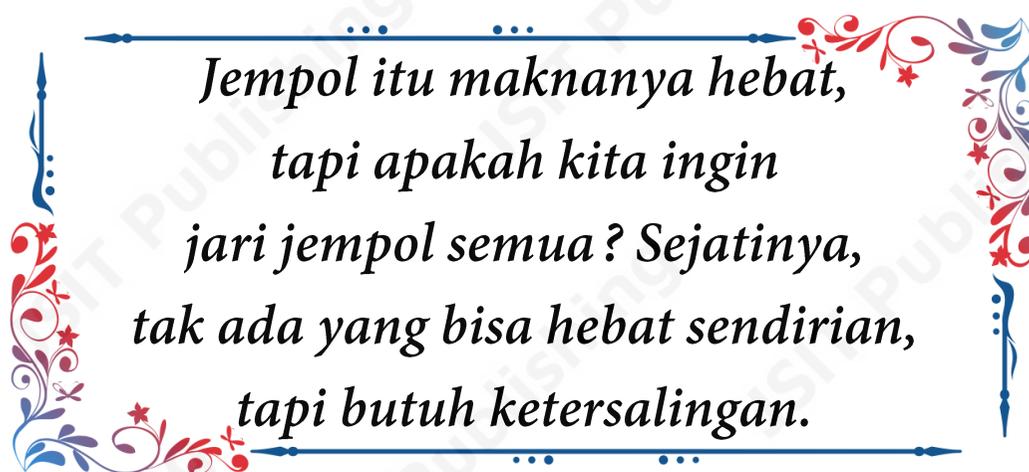


*Gambar 6.3 Setiap warga negara berhak untuk berkembang potensinya.
Sumber: Sekolah Baruku Malang Jawa Timur.*

Landasan pedagogis manajemen pendidikan inklusif adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Suyanto, 2012). Tujuan pendidikan nasional tersebut menyiratkan, bahwa setiap warga negara berhak untuk berkembang potensinya seoptimal mungkin melalui pendidikan. Pada kalimat ‘menjadi warga negara yang demokratis’

mengandung makna, bahwa setiap individu dibentuk agar mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini sulit tercapai, jika sedari awal telah ada pembedaan dan pendiskriminasian bagi PDBK, sehingga mereka tidak berkesempatan bersekolah bersama dengan anak umum lainnya di lingkungannya.

Berlandaskan pemahaman bahwa semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang menjadi hak asasi setiap manusia, maka atas dasar itulah pendidikan inklusif dibangun. Pendidikan inklusif merupakan suatu bentuk komitmen bersama para pendidik di dunia, untuk memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk dapat menikmati layanan pendidikan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melalui kementrian pendidikan nasional, merumuskan konsep pendidikan inklusi yang menjadi komitmen bersama tersebut disesuaikan dengan kondisi situasional dunia pendidikan nasional.



*Jempol itu maknanya hebat,
tapi apakah kita ingin
jari jempol semua? Sejatinya,
tak ada yang bisa hebat sendirian,
tapi butuh ketersalingan.*

BAB 7

Untuk Apa Inklusi?



*Gambar 7.1 Salah satu hasil karya anak difabel.
Sumber: SIT Insan Mulia Jakarta.*

JSIT Indonesia
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi

A. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 2 termaktub tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif, yakni sebagai berikut.

1. *“Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.”*
2. *“Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keaneka-ragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.”*

Dari tujuan pertama, terdapat beberapa poin penting yang perlu digarisbawahi, yaitu sebagai berikut.

1. Memberi kesempatan bagi siapa pun, tanpa terkecuali anak-anak yang memiliki kelainan atau dianggap berbeda dari anak lain pada umumnya, untuk mendapatkan layanan pendidikan.
2. Poin kedua adalah bukan sekedar dapat mengenyam pendidikan seadanya, namun pendidikan yang bermutu. Bermutu yang dimaksud yaitu sesuai standar yang berlaku di dunia pendidikan tanah air sekaligus yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

Tujuan kedua mengandung pesan yang dalam untuk mewujudkan lingkungan lembaga pendidikan yang ramah dan humanis. Lingkungan yang membuat setiap anak bisa berinteraksi dengan baik. Saling memahami dan menghargai keunikan tiap individu. Bersinergi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Belajar dan bekerja sama dengan saling menghormati perbedaan yang ada. Suasana yang demikian, akan meniadakan perilaku diskriminatif yang acap kali terjadi pada peserta didik yang memiliki kelainan.

Sebelum ditetapkannya kebijakan sekolah inklusif, masih banyak anak yang tidak dapat mengenyam dunia pendidikan, yang seharusnya menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tujuan pendidikan inklusif dapat menjadi acuan bagi setiap sekolah untuk memberi kesempatan bagi setiap warga negara mendapatkan pendidikan di sekolah tersebut. Tujuan ini pun

menjamin tidak ada lagi anak Indonesia yang tidak dapat menikmati layanan pendidikan. Selain itu, tujuan di atas diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah diskriminasi yang masih terjadi di dunia pendidikan tanah air.

B. Fungsi Pendidikan Inklusif

Fungsi pendidikan inklusif adalah sebagai berikut.

1. Menjamin semua peserta didik mendapat kesempatan dan akses yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan bermutu di berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi semua individu untuk mengembangkan potensinya secara optimal.

Fungsi penjaminan bagi semua peserta didik agar memiliki kesempatan mengenyam pendidikan sangat dibutuhkan. Realita yang ada, banyak anak berkebutuhan khusus acap kali tidak dapat diterima di sekolah reguler, menjadi salah satu alasan yang memunculkan konsep pendidikan inklusif. Sebelum adanya pendidikan inklusif, seakan tidak ada kewajiban lembaga pendidikan untuk dapat memberi kesempatan PDBK untuk berkembang. Akses yang ada hanya satu pintu, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), yang seperti telah dibahas sebelumnya memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pendidikan inklusif pun diharapkan berfungsi menciptakan suasana kondusif, yang memungkinkan setiap anak, termasuk PDBK belajar dengan nyaman. Kenyamanan sangat diperlukan peserta didik, agar dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Melalui model pendidikan inklusif, setiap anak akan mendapatkan pelayanan pendidikan yang bersifat individual. Pengertian pelayanan individual yang paling esensi adalah, bahwa setiap anak dipandang unik yang memiliki karakter khas masing-masing yang harus dihargai. Penghargaan atas keunikan setiap anak, akan menjadi landasan bagi setiap pendidik untuk dapat memberi *treatment* sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. *Treatment* yang demikian akan membuat potensi setiap anak akan berkembang secara optimal.

C. Manfaat Pendidikan Inklusif



Gambar 7.2 Lokakarya pendidikan inklusi.
Sumber: JSIT Indonesia.

Model pendidikan inklusif banyak memberi manfaat bagi banyak pihak. Bagi peserta didik khususnya PDBK, di antaranya menumbuhkan rasa percaya diri, lebih mudah beradaptasi, tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan pemberian label negatif, merasa diterima di masyarakat, terlatih untuk dapat hidup secara mandiri, serta siap menghadapi dunia nyata. Suasana belajar yang penuh dengan nuansa keberterimaan membuat setiap anak merasa nyaman. Mereka akan lebih percaya diri dan berani bereksplorasi. Menurut pakar neuropsikologi, otak berpikir seorang anak akan bekerja secara efektif ketika belajar dalam kondisi nyaman dan rileks (Syahrul, 2012).

Bagi peserta didik non-PDBK, mereka diajar untuk dapat mengenal kelebihan maupun keterbatasan diri dan orang lain, dengan demikian mereka akan dapat menghargai perbedaan dan berempati, yang berimbas pada pengasahan kecerdasan intrapersonal anak. Keterampilan sosial mereka pun semakin diasah dan dikembangkan dengan terbiasa membantu teman yang membutuhkan. Hal tersebut juga dapat dikatakan, bahwa lingkungan sekolah yang memungkinkan seorang anak sering

merasakan atau mengalami penderitaan orang lain, akan menstimulasi perilaku prososial pada anak tersebut (Syahrul, 2012).

Keunikan yang ada pada masing-masing peserta didik akan memotivasi guru untuk lebih memahami dan belajar menangani mereka. Hal tersebut memacu guru untuk senantiasa memperluas wawasan mereka, khususnya tentang psikologi perkembangan anak, berbagai karakter anak, dan penanganannya. Kreatifitas guru pun akan terus meningkat seiring dengan adanya kebutuhan untuk dapat melayani berbagai karakteristik peserta didik. Peningkatan pun terjadi pada kompetensi dan keterampilan para guru sekolah inklusif.

Bagi para orang tua, khususnya orang tua PDBK, manfaat yang paling mendasar adalah memberi semangat orang tua untuk dapat menerima keunikan anaknya dengan sepenuh hati dan lebih menerima dan menghargai perbedaan tersebut. Selain itu, orang tua akan merasa bahagia, karena dapat membantu anaknya mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak lainnya tanpa adanya diskriminasi. Orang tua juga belajar untuk dapat mengenal dan menangani anaknya sesuai dengan apa yang dilakukan di sekolah, melalui konsultasi, *sharing*, maupun program yang diberikan sekolah untuk dilakukan di rumah.

Manfaat pendidikan inklusif juga dirasakan oleh sekolah itu sendiri dan pemerintah pada umumnya. Masyarakat akan menghargai sekolah dan pemerintah yang telah melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah. Tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya di bidang pendidikan. Selain itu, pemerintah dapat mempercepat pencaangan wajib belajar sembilan tahun. Mutu pendidikan pun akan lebih meningkat secara komprehensif, di mana setiap anak mendapat kesempatan menikmati layanan pendidikan, guru-guru menjadi lebih kreatif, inovatif, dan manusiawi, serta masyarakat pun terbiasa menghargai perbedaan. Secara internasional, Indonesia akan diakui sebagai negara yang menghargai hak asasi warga negaranya. Indonesia dianggap negara yang komit terhadap komitmen bersama mengenai *education for all*.

D. Prinsip Dasar Pendidikan Inklusif



Gambar 7.3 Pendidikan inklusi menghendaki semua anak belajar bersama-sama.
Sumber: SDIT Insan Mulia Jakarta.

Prinsip dasar pelaksanaan pendidikan inklusif di berbagai belahan dunia saat ini mengacu kepada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi pada Pendidikan Kebutuhan Khusus pada tahun 1994. Prinsip dasar yang pertama dari sekolah inklusif adalah selama memungkinkan semua anak sepatutnya belajar bersama-sama, tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka.

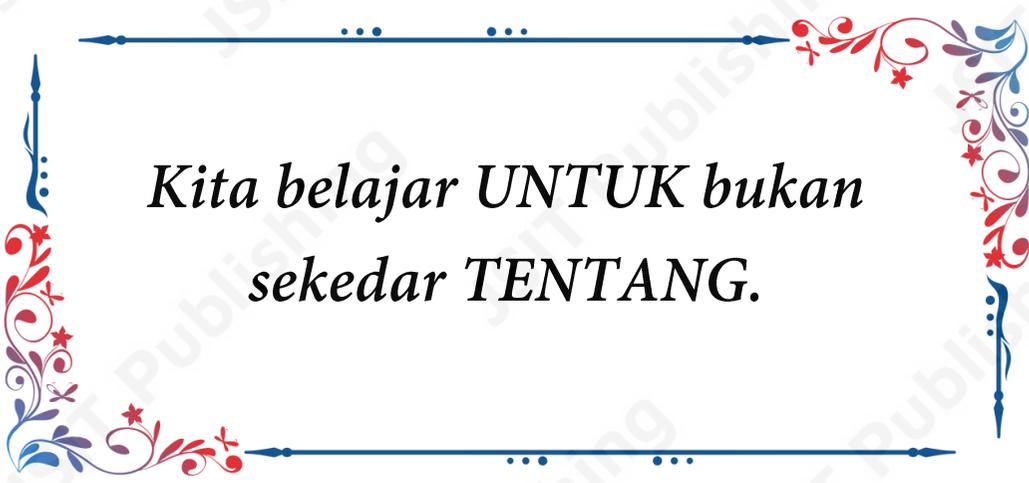
Sekolah inklusif harus mengenal dan merespon terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari para peserta didik, mengakomodasi berbagai macam gaya dan kecepatan belajarnya, menjamin diberikannya pendidikan yang berkualitas kepada semua peserta didik melalui penyusunan kurikulum yang tepat, pengorganisasian yang baik, pemilihan strategi pengajaran yang tepat, pemanfaatan sumber dengan sebaik-baiknya, serta penggalangan kemitraan dengan masyarakat sekitarnya. Selayaknya terdapat dukungan dan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan sinambungnya kebutuhan khusus yang dijumpai di tiap sekolah.

Prinsip yang kedua, yakni anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seharusnya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Pendidikan inklusif merupakan alat yang paling efektif untuk membangun solidaritas antara anak penyandang kebutuhan khusus dengan teman-teman sebayanya. Pengiriman anak secara permanen ke sekolah luar biasa, kelas khusus, atau bagian khusus di sebuah sekolah reguler seyogianya merupakan suatu pengecualian, yang direkomendasikan hanya pada kasus-kasus tertentu, di mana terdapat bukti yang jelas, bahwa pendidikan di kelas reguler tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan atau sosial anak, atau bila hal tersebut diperlukan demi kesejahteraan anak yang bersangkutan atau kesejahteraan anak-anak lain di sekolah itu.

Dalam dokumen di atas, juga dikemukakan beberapa prinsip dasar inklusi yang fundamental yang belum dibahas dalam dokumen-dokumen internasional sebelumnya. Beberapa konsep inti inklusi yang tercantum dalam Pernyataan Salamanca tahun 1994, di antaranya sebagai berikut.

1. Anak-anak memiliki keberagaman yang luas dalam karakteristik dan kebutuhannya.
2. Perbedaan itu normal adanya, oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.
3. Sekolah perlu mengakomodasi semua anak.
4. Anak penyandang cacat seyogianya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
5. Partisipasi masyarakat itu sangat penting bagi inklusi.
6. Pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi.
7. Kurikulum yang fleksibel seyogianya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya.
8. Inklusi memerlukan sumber-sumber dan dukungan yang tepat.
9. Inklusi penting bagi harga diri manusia dan pelaksanaan hak asasi manusia secara penuh.
10. Sekolah inklusif memberikan manfaat untuk semua anak, karena membantu menciptakan masyarakat yang inklusif.
11. Inklusi meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya pendidikan.

Sekolah reguler dengan orientasi inklusif merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat yang terbuka, membangun suatu masyarakat inklusif, dan mencapai pendidikan untuk semua. Sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada mayoritas anak dan meningkatkan efisiensi, sehingga menekan biaya keseluruhan sistem pendidikan.



*Kita belajar **UNTUK** bukan
sekedar **TENTANG**.*

BAB 8

Memahami Terminologi



*Gambar 8.1 Arti penting pendidikan inklusif.
Sumber: clipartart.com*

A. Pendidikan Inklusif



Gambar 8.2 Pendidikan inklusif.

Sumber: SDIT Lentera Insan Depok, Jawa Barat.

Inklusif berasal dari bahasa Inggris dari kata *'inclusive'*. Istilah pendidikan inklusif sendiri di Indonesia masih merupakan istilah baru yang belum terlalu akrab di telinga masyarakat. Banyak pendapat para ahli pendidikan tentang definisi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler (Widodo, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler harus menjadi tempat belajar yang representatif bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya, dan bagaimanapun gradasinya. Pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Dengan demikian, sekolah harus siap menampung semua siswa tanpa terkecuali dan menyiapkan berbagai hal untuk dapat menjawab kebutuhan dari para peserta didik. Fitriani menyebutkan dalam bukunya, pendidikan inklusif

adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali (Syahrul, 2012).

Definisi-definisi yang dikemukakan para ahli tersebut, sejalan dengan pandangan UNESCO, yakni pendidikan inklusif melibatkan perubahan dan modifikasi isi, pendekatan, struktur, dan strategi dengan visi bersama, meliputi semua anak yang berada pada rentangan usia yang sama dan suatu keyakinan bahwa inklusi adalah tanggung jawab sistem regular yang mendidik semua. Pendidikan inklusif berkenaan dengan aktivitas memberikan respon yang sesuai pada spektrum yang luas dari kebutuhan belajar, dalam *setting* pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan, sehingga mampu merespon keragaman peserta didik. Pendidikan inklusif bertujuan agar guru dan peserta didik merasa nyaman dengan keberagaman dan melihatnya sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar.

Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur, dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif juga dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian dalam merespon spektrum kebutuhan belajar peserta didik yang lebih luas, dengan maksud agar baik guru maupun peserta didik, keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif juga akan terus berubah secara pelan-pelan sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan, dan bahkan harus terus berubah, jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Meskipun, definisi tentang pendidikan inklusif bersifat progresif dan terus berubah, namun tetap diperlukan kejelasan konsep yang terkandung di dalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/PLB (*special education*). Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus. Inklusif atau pendidikan

inklusif bukanlah istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*) dan konsep tentang perbaikan sekolah (*schools improvement*) (Acedo, 2011).

Dari pendapat para ahli di atas mengenai pengertian pendidikan inklusif terdapat kesamaan pandangan, yakni pendidikan inklusif adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat menikmati layanan pendidikan yang sama dengan anak lainnya di sekolah inklusif. Dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa dinyatakan dalam Pasal 1, "*Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.*"

Definisi pendidikan inklusif dapat dijabarkan lebih dalam berdasarkan hasil seminar pendidikan inklusif di Agra tahun 1988 (Zimba, 2011), seperti berikut.

1. Pendidikan inklusif tidak terbatas pada pendidikan formal saja, namun juga mencakup pendidikan nonformal.
2. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar.
3. Memungkinkan struktur, sistem, dan metodologi dapat memenuhi kebutuhan belajar semua anak.
4. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan-perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, kecacatan, status sosial ekonomi, potensi, dan kemampuan hingga status penyakit, seperti HIV/AIDS.
5. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya.
6. Merupakan strategi untuk membangun dan mewujudkan masyarakat inklusif.

B. Model Pendidikan Inklusif



Gambar 8.3 Model pendidikan inklusif.
Sumber: SIT Ummul Quro Depok, Jawa Barat.

Definisi di atas sebelumnya, menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang anak, sistem pendidikan, keragaman dan diskriminasi, proses memajukan inklusi, serta konsep tentang sumber daya. Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

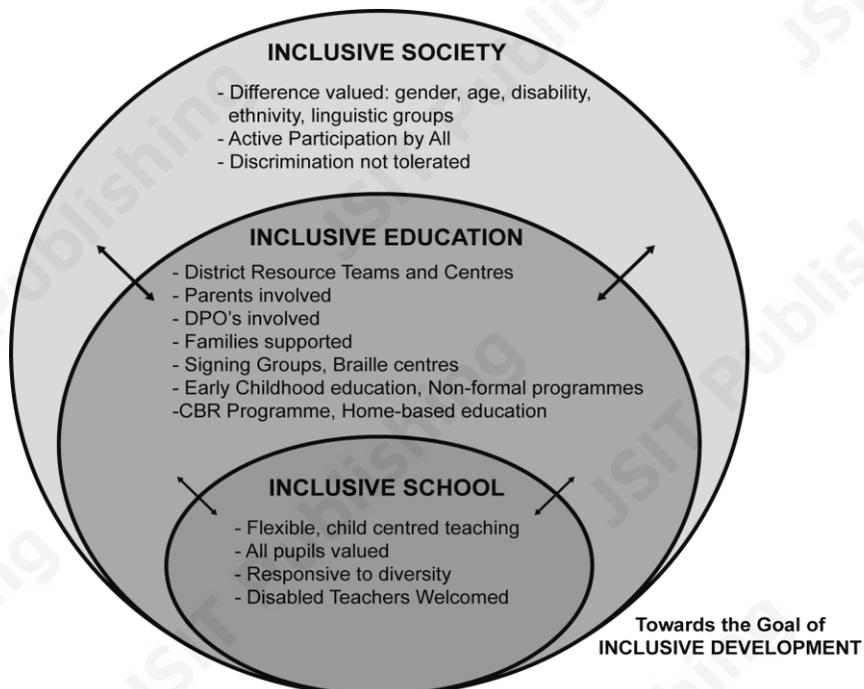
1. Konsep tentang Anak

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, khususnya di daerah di mana ia tinggal. Mereka tidak harus mencari sekolah yang jauh untuk dapat bersekolah, dengan kata lain semua anak dapat belajar. Dari semua anak yang belajar di sekolah akan dapat ditemui anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal tersebut merupakan fenomena yang biasa dan wajar terjadi di dunia pendidikan. Anak-anak yang berkesulitan belajar berhak dibantu untuk mengatasi masalahnya. Bahkan, pada dasarnya semua anak pun membutuhkan dukungan dalam belajar. Dukungan yang bersifat fisik, seperti sarana atau media belajar yang memadai, maupun dukungan psikis seperti pendekatan belajar yang tepat atau dorongan semangat belajar. Anak-anak pun butuh diakui. Dalam proses pembelajaran, anak tidak selalu harus menjadi objek. Sebaliknya, pembelajaran dibangun dengan berpusat pada anak, sehingga mereka bisa menjadi subjek belajar itu sendiri.

2. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah

Pengertian pendidikan dimaknai secara lebih luas tidak sebatas pendidikan formal di sekolah (*formal education*). Pendidikan dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan tempat. Pendidikan bisa didapatkan di rumah, tempat ibadah, komunitas, bahkan di area bermain atau berekreasi. Pendidikan harus fleksibel dan bersifat responsif, yakni mampu menjawab kebutuhan yang ada. Lingkungan pendidikan pun dirancang ramah terhadap anak, menyamankan, dan tidak membahayakan. Sistem pendidikan yang baik akan terus memperhatikan perbaikan mutu sekolah dan berupaya untuk membuat sekolah yang efektif. Pendekatan yang dilakukan dibangun menyeluruh dan berkolaborasi dengan mitra kerja.

Menurut UNESCO dalam Rochyadi dan Alimin (2005), secara konseptual terdapat perbedaan dan kaitan yang erat antara pengertian sekolah inklusif, pendidikan inklusif, dan masyarakat inklusif, seperti berikut.



Gambar 8.4 Hubungan sekolah inklusif, pendidikan inklusif, dan masyarakat inklusif.

Sumber: Dokumen penerbit.

3. Konsep tentang Keberagaman dan Diskriminasi

Dalam dunia pendidikan isu adanya diskriminasi dan pengucilan (*exclusion*) adalah hal yang harus sudah diiadakan. Setiap individu diharapkan memiliki cara pandang yang sama dalam melihat keberagaman. Memandang keragaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif menyiapkan semua individu, guru, peserta didik, maupun orang tua untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan.

C. Definisi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) atau *Special Needs Children* (SN) sering disebut dengan anak lambat (*slow*) atau mengalami gangguan (*retarded*). Ada beberapa istilah yang dipakai untuk ABK, seperti *disability*, *impairment*, dan *handicaped*. Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi masing-masing istilah adalah sebagai berikut.



Gambar 8.5 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
Sumber: SIT Lentera Insan Depok, Jawa Barat.

1. *Impairment*

Suatu kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologis, fisiologis, atau fungsi struktur anatomis secara umum pada tingkat organ tubuh. Contohnya, seseorang yang mengalami amputasi kakinya, maka dia mengalami kecacatan tangan.

2. *Disability*

Suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan yang dimungkinkan karena adanya keadaan *impairment*, seperti kecacatan pada organ tubuh. Contohnya, pada orang yang cacat tangannya, maka dia akan merasakan berkurangnya fungsi kakinya untuk melakukan mobilitas.

3. *Handicapped*

Ketidakberuntungan individu yang dihasilkan dari *impairment* atau *disability* yang membatasi atau menghambat pemenuhan peran

yang normal pada individu. *Handicapped* juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Hal ini dimungkinkan karena adanya kelainan dan berkurangnya fungsi organ individu. Contohnya, orang yang mengalami amputasi kaki, sehingga untuk aktivitas mobilitas atau berinteraksi dengan lingkungannya dia memerlukan kursi roda.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV Pasal 5 Ayat (2), (3), dan (4) yang menyatakan bahwa, “(2) *Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial sehingga berhak memperoleh pendidikan khusus.* (3) *Warga negara di daerah terpecil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil sehingga berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.* (4) *Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sehingga berhak memperoleh pendidikan khusus.*”

Secara lebih luas, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional) dalam proses pertumbuhkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Anak-anak yang hidup di pelosok dengan berbagai keterbatasan akses, juga dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Sebagai contoh, anak yang hidup di daerah pedalaman, tidak diberikan standar pembelajaran yang sama dengan standar umum pendidikan Indonesia, baik dari sisi kurikulum dan standar lainnya apalagi bentuk evaluasi pembelajaran, semisal Ujian Nasional.

Sebutan anak berkebutuhan khusus biasanya lebih ditujukan bagi anak yang memiliki standar lebih rendah dibanding anak lain pada umumnya. Anak-anak yang memiliki kelebihan yang umum dimiliki anak lainnya pun dalam undang-undang tersebut dikategorikan anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut disebabkan, karena anak berkelebihan atau cerdas istimewa

secara psikologis membutuhkan penanganan yang berbeda. Penanganan yang tidak tepat atau menyamakan penanganan seperti anak lainnya, secara empiris ternyata membuat anak cerdas berbakat tersebut tidak dapat berprestasi sebagaimana harusnya.

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan kata Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki. ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contohnya, bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. ABK biasanya bersekolah di SLB sesuai dengan kekhususannya masing-masing, SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, dan SLB bagian G untuk tunaganda.

Anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ABK temporer (sementara) dan permanen (tetap) (Kustawan, 2012).

1. ABK Temporer

Anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer merupakan ABK yang memiliki masalah hambatan atau kesulitan belajar karena faktor luar atau lingkungan. Berikut yang termasuk kategori ABK temporer.

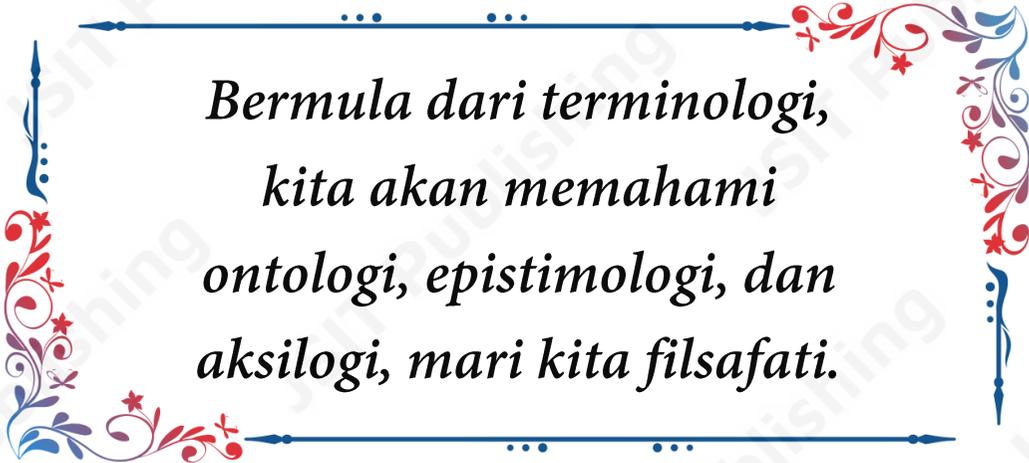
- a. Anak-anak yang berada di lapisan strata sosial ekonomi yang paling bawah.
- b. Anak-anak jalanan.
- c. Anak-anak korban bencana alam.
- d. Anak-anak di daerah perbatasan dan di pulau terpencil.
- e. Anak-anak yang menjadi korban HIV/AIDS.

2. ABK Permanen

ABK bersifat permanen merupakan bawaan dari dalam diri seorang anak, baik yang telah ada sejak lahir ataupun muncul pada masa tumbuh kembang mereka. Yang termasuk kategori ABK permanen, sebagai berikut.

- a. Anak-anak tunanetra.
- b. Anak-anak tunarungu.
- c. Anak-anak tunagrahita.
- d. Anak-anak tunadaksa.
- e. Anak-anak tunawicara.
- f. Anak-anak tunalaras.
- g. Anak-anak autis.
- h. Anak-anak ADHD (*Attention Deficiency and Hyperactivity Disorders*).
- i. Anak berkesulitan belajar (*learning disabilities*).
- j. anak berbakat dan sangat cerdas (*gifted*).

Penanganan ABK temporer yaitu dengan memberikan Pendidikan Layanan Khusus (PLK). PLK diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya untuk para korban bencana, didirikan sekolah-sekolah darurat yang menjamin tetap terselenggaranya layanan pendidikan bagi mereka. Bagi anak-anak yang tinggal di daerah pelosok dan terisolir, perlu dibangun lembaga-lembaga pendidikan yang memadai. Di beberapa daerah yang memiliki aturan adat tersendiri, maka perlu dijumpai bentuk atau model lembaga pendidikan yang bisa mereka terima. Sedangkan, ABK yang disebabkan faktor ekonomi, solusinya adalah memberikan beasiswa atau didirikannya sekolah-sekolah gratis di sekitar lingkungan mereka.



*Bermula dari terminologi,
kita akan memahami
ontologi, epistemologi, dan
aksiologi, mari kita filsafati.*

BAB 9

Jenis Kekhususan Anak



Gambar 9.1 Difabel.
Sumber: vecteezy.com

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus sesuai PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain.

Selain menggunakan pedoman peraturan pemerintah dalam mengklasifikasi kebutuhan khusus anak, kita juga dapat dibantu menggunakan DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) atau PPDGJ (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa), yang kerap kali digunakan oleh psikiater maupun psikolog untuk menegakkan diagnosa jenis kebutuhan khusus pada anak. Berikut beberapa pedoman diagnosa yang termuat dari berbagai literatur dan pedoman DSM IV untuk lebih memudahkan dalam menentukan jenis kekhususan pada anak.

1. Tunanetra

Anak dengan gangguan penglihatan (tunanetra) adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa, sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya.

Layanan khusus dalam pendidikan bagi mereka, yaitu dalam membaca, menulis, dan berhitung diperlukan huruf Braille bagi yang buta. Bagi yang sedikit penglihatan diperlukan kaca pembesar atau huruf cetak yang besar dan media yang dapat diraba dan didengar atau diperbesar. Di samping itu, diperlukan latihan orientasi dan mobilitas. Ciri anak dengan tunanetra seperti yang ditulis Delphie (2009) adalah sebagai berikut.

- a. Kurang melihat (kabur), tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 m.
- b. Kesulitan mengambil benda kecil di dekatnya.
- c. Tidak dapat menulis mengikuti garis lurus.
- d. Sering meraba-raba dan tersandung waktu berjalan.
- e. Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik kering.
- f. Tidak mampu melihat.
- g. Peradangan hebat pada kedua bola mata.

h. Mata bergoyang terus.

Selain ciri di atas, anak dengan tunanetra juga dapat dikelompokkan berdasarkan hal berikut.

- a. Ketajaman penglihatan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Mampu melihat dengan ketajaman penglihatan (*acuity*) 20/70, artinya anak tunanetra melihat dari jarak 20 *feet* (6 meter), sedangkan orang normal dari jarak 70 *feet* (21 meter). Mereka digolongkan ke dalam *low vision* (keterbatasan penglihatan).
 - 2) Mampu membaca huruf paling besar di Snellen Chart dari jarak 20 *feet* (*acuity* 20/200-*legal blind*) dikategorikan buta. Ini berarti anak tunanetra melihat huruf E dari jarak 6 meter, anak normal dari jarak 60 meter.
- b. Keterbatasan penglihatan (*low vision*) dibagi ke dalam 3 kelompok berikut.
 - 1) Mengenal bentuk atau objek dari berbagai jarak.
 - 2) Menghitung jari dari berbagai jarak.
 - 3) Tidak mengenal tangan yang digerakan.
- c. Keterbatasan penglihatan berat (buta) dibagi menjadi dua, sebagai berikut.
 - 1) Mempunyai persepsi cahaya (*light perception*).
 - 2) Tidak memiliki persepsi cahaya (*no light perception*).

Dalam perspektif pendidikan, tunanetra dikelompokkan menjadi 5 kelompok sebagai berikut.

- a. Mereka yang mampu membaca huruf cetak standar.
- b. Mampu membaca huruf cetak standar, tetapi dengan bantuan kaca pembesar.
- c. Mampu membaca huruf cetak dalam ukuran besar (ukuran huruf nomor 18).
- d. Mampu membaca huruf cetak secara kombinasi, cetakan reguler, dan cetakan besar.
- e. Menggunakan Braille tetapi masih bisa melihat cahaya.

2. Gangguan Kognitif *Down Syndrome* (Grahita A)

Anak dengan *down syndrome* memiliki hambatan kognitif yang mengganggu fungsi perkembangan lainnya pada anak. Terdapat beberapa ciri anak dengan *down syndrome* sebagai berikut.

- a. Memiliki wajah yang khas dengan ukuran kepala yang lebih kecil.
- b. Wajah yang cenderung lebar dengan tulang pipi yang agak tinggi.
- c. Bibir dan lidah lebih tebal dengan kecenderungan gangguan pada pertumbuhan gigi.
- d. Kulitnya lebih halus dibandingkan dengan anak-anak normal seusianya, juga terdapat lipatan pada bagian leher yang tampak seperti menumpuk.
- e. Apabila difoto dengan rontgen, tampak ada kelainan pada tulang jari dan kelingking yang lebih pendek dengan lengkungan yang menjurus ke bagian dalam. Jarak antara jari kaki yang satu dengan yang lainnya tampak lebih lebar, begitu juga jarak jari tangan yang nampak lebih lebar.
- f. Memiliki otot-otot yang cenderung lembek, sehingga membuat keterbatasan pada daya tahan penderita *down syndrome*, terutama ketika memukul, menendang, dan berlari.
- g. Pertumbuhan anak *down syndrome* semasa bayi berkembang relatif baik, meski seiring dengan bertambahnya usia tumbuh kembangnya mengalami beberapa hambatan.

Dalam literatur yang lain disebutkan oleh Mangunsong (2009), bahwa ciri anak dengan *down syndrome* adalah sebagai berikut.

- a. Telinga kecil (kurang *balance*).
- b. Tengkorak kepala pendek (kurang *balance*).
- c. Kepala bagian belakang rata.
- d. Leher yang pendek dengan lipatan yang cukup banyak.
- e. Bentuk tubuh pendek.
- f. Lidah tampak kuat.
- g. Memiliki satu garis horizontal pada bagian tangan.
- h. Jari kelingking kelihatan lebih pendek dan melengkung.
- i. Memiliki belahan antara jempol kaki dan jari yang lainnya lebih menjorok ke dalam.

- j. Mata tampak agak miring.
- k. Wajah yang rata, tidak tampak lekukan, terlalu menonjol pada bagian hidung, mulut, dan mata.
- l. Terdapat lipatan pada bagian mata yang membuat penderita *down syndrome* tampak memiliki mata yang sipit.
- m. Rambut kaku (jatuh dan lurus).
- n. Memiliki tubuh yang luwes, lentur, dan dilengkungkan dengan mudah.

3. Retardasi Mental

Anak dengan retardasi mental juga memiliki hambatan dalam hal kognitif. Level retardasi mental dibagi dalam kelompok sebagai berikut.

- a. Retardasi mental ringan (*mild*): tingkat IQ 50-55 hingga 70, dengan memiliki ciri dan kemungkinan perkembangan berikut.
 - 1) Mampu didik.
 - 2) Tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok (meski perkembangan fisiknya agak terlambat dari anak rata-rata).
 - 3) Tinggi dan berat sama dengan anak normal, namun kurang dalam hal kekuatan, kecepatan, dan koordinasi.
 - 4) Rentang perhatian pendek.
 - 5) Frustrasi, saat diminta berfungsi secara sosial dan akademik sesuai usia.
 - 6) Kadang menunjukkan rasa malu/pendiam.
- b. Retardasi mental sedang (*moderate*): tingkat IQ 35-40 hingga 50-55, dengan ciri khas dan kemungkinan perkembangan sebagai berikut.
 - 1) Termasuk mampu latih (untuk keterampilan tertentu, mampu mengurus diri, mampu membaca, dan menulis sederhana).
 - 2) Dapat dilatih untuk suatu pekerjaan dengan kemampuan tertentu di lingkungan kerja yang terlindungi dan memiliki pengawasan.
 - 3) Kurang mampu mengingat, menggeneralisasikan, bahasa, konseptual, perseptual, dan kreativitas, sehingga perlu diberi tugas yang simpel dan sederhana, singkat berurutan dan dibuat untuk keberhasilan mereka.
 - 4) Koordinasi fisik buruk dan banyak mengalami masalah situasi sosial.

- c. Retardasi mental berat (*severe*): tingkat IQ 20-25 hingga 35-40, dengan ciri khas dan kemungkinan perkembangan sebagai berikut.
 - 1) Menunjukkan banyak masalah dan kesulitan meski di sekolah khusus.
 - 2) Membutuhkan perlindungan, pengawasan, pelayanan, dan pemeliharaan terus menerus.
 - 3) Sedikit melakukan interaksi sosial.
 - 4) Mengalami gangguan bicara.
 - 5) Menunjukkan kelainan fisik (lidah sering kali menjulur keluar bersamaan dengan keluarnya air liur, kepala sedikit lebih besar dari biasanya, dan kondisi fisik lemah).
- d. Retardasi mental sangat berat (*profound*): tingkat IQ di bawah 20 atau 25.

4. Kesulitan Belajar

Masalah perseptual dan perseptual-motor dicirikan dengan kondisi berikut.

- a. Sulit menyelesaikan *puzzle* atau melihat bentuk-bentuk visual.
- b. Cenderung memutarbalik huruf, misalnya 'd' dibaca 'b'.
- c. Sulit membedakan dua kata yang berbunyi hampir sama, misalnya 'fit' dan 'fib'.
- d. Sulit mengikuti arahan lisan.
- e. Sulit dalam aktivitas fisik yang melibatkan kemampuan motorik.

Sedangkan masalah yang terkait dengan memori, kognitif, dan metakognitif ditandai dengan kondisi sebagai berikut.

- a. Anak mengalami kesulitan dalam mengingat.
- b. Sulit menyimpan informasi.
- c. Sulit dalam metakognisi, yaitu ketidakmampuan menilai sulit atau tidaknya sebuah tugas.

5. Disleksia

Disleksia merupakan gangguan dalam kemampuan untuk membaca dan mengeja yang secara bermakna mengganggu capaian akademis dan

kegiatan sehari-hari anak. Disleksia dicirikan dengan kondisi sebagai berikut.

- a. Sering kali terdeteksi ketika bersekolah.
- b. Kesulitan membaca dan mengeja.
- c. Lamban dalam mempelajari bunyi dan abjad.
- d. Sering salah/pelan saat membaca.
- f. Sulit membedakan huruf, misalnya 'd' dengan 'b' dan seterusnya.
- g. Kesulitan mengucapkan kata yang baru dikenal.
- h. Kesulitan dalam menyalin.
- i. Kesulitan mengingat urutan, seperti hari, tanggal, nomor telepon, dan lainnya.
- j. Cenderung menghindari kegiatan membaca dan menulis.
- k. Kesulitan mengingat.
- l. Enggan membuat kesimpulan.
- m. Skor kemampuan membaca yang baku termasuk rendah.
- n. Sulit membedakan kanan dan kiri.

6. Disgrafia

Disgrafia merupakan gangguan dalam kemampuan menulis, teridentifikasi dari tulisan tangan yang sangat buruk dibandingkan teman seusianya yang secara bermakna mengganggu capaian akademis dan kegiatan sehari-hari. Ciri anak dengan disgrafia sebagai berikut.

- a. Inkonsistensi dalam bentuk huruf dalam tulisan.
- b. Huruf besar dan kecil sering tercampur.
- c. Ukuran huruf tidak proporsional.
- d. Anak tampak berusaha keras untuk mengekspresikan ide dalam tulisan.
- e. Sulit memegang pulpen.
- f. Kesulitan menyalin.
- g. Kesulitan mengeja.
- h. Kesulitan memulai menulis.

7. Diskalkulia

Diskalkulia adalah gangguan aritmatika yang secara bermakna mengganggu capaian akademis dan kegiatan sehari-hari, dengan tambahan ciri sebagai berikut.

- a. Kesulitan berhitung.
- b. Kesulitan dalam operasi bilangan.
- c. Kesulitan dalam memahami konsep waktu.
- d. Kesulitan untuk fokus pada pelajaran matematika.
- e. Dalam aktivitas olahraga, anak kesulitan mengikuti aturan permainan yang melibatkan skor.
- f. Memberikan jawaban yang berubah-ubah pada persoalan matematika.
- g. Kesulitan melakukan hitungan matematis dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam berbelanja.

8. *Slow Learner*

Slow learner adalah anak dengan kondisi lamban belajar yang dicirikan dengan hal-hal sebagai berikut.

- a. Anak dengan prestasi belajar yang cenderung rendah (skor IQ antara 75-90).
- b. Nilai akademik buruk.
- c. Cenderung kesulitan mengikuti petunjuk yang kompleks.
- d. Sulit memahami instruksi secara abstrak dan lebih mudah dengan pembelajaran konkret.
- e. Kemampuan memori lemah.
- f. Sering terlambat dalam menyelesaikan tugas akademik.
- g. Pernah tidak naik kelas.

9. *Low Motivation*

Anak dengan *low motivation* ditandai dengan lemahnya semangat dalam belajar. Anak tidak memiliki orientasi dan dorongan belajar yang tinggi, serta tidak memiliki motivasi untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi. Ciri anak dengan *low motivation* digambarkan sebagai berikut (Djiwandono, 2002).

- a. Adanya kecenderungan siswa, seperti hanya mau merespon pekerjaan yang kurang menantang dan tidak mengandung kesulitan yang terlampau tinggi.
- b. Membutuhkan banyak penguat untuk dapat sukses, artinya individu yang bersangkutan membutuhkan berbagai stimulus yang lebih banyak untuk dapat menuntaskan pekerjaan atau tugas yang diberikan.
- c. Membuat langkah-langkah kecil dalam belajar serta memerlukan nilai-nilai yang toleran. Artinya, individu tersebut lebih banyak mendapatkan nilai dan penghargaan disebabkan karena pemakluman yang cukup tinggi dari guru.
- d. Menghindari orang lain mengetahui kesalahannya, artinya individu yang bersangkutan akan mencoba menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang ia lakukan agar tidak diketahui oleh orang lain.

10. *Gifted Under Achiever*

Whitmore (1980) dalam Munandar (2002) menyebutkan ciri anak dengan *gifted under achiever* memiliki 10 poin dari beberapa kondisi di bawah ini.

- a. Memiliki nilai rendah pada prestasi.
- b. Mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam keterampilan dasar.
- c. Pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk.
- d. Memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika berminat.
- e. Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan (secara lisan lebih baik).
- f. Pengetahuan *factual* sangat luas.
- g. Daya imajinasi kuat.
- h. Selalu tidak puas dengan pekerjaannya.
- i. Kecenderungan ke perfeksionisme dan mengkritik diri sendiri, menghindari kegiatan baru.
- j. Menunjukkan prakarsa dalam mengerjakan proyek di rumah yang dipilih sendiri.

Selain ciri yang disebutkan di atas, perlu juga kiranya sebuah perbandingan ciri yang lain, untuk dapat melengkapi pedoman dalam menegakkan kecenderungan arah diagnosa hambatan belajar anak. Adapun ciri lain dari disleksia adalah sebagai berikut.

- a. Mempunyai minat luas dan mungkin keahlian khusus dalam suatu bidang penelitian.
- b. Rasa harga diri rendah dan ada kecenderungan untuk menarik diri.
- c. Tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok.
- d. Menunjukkan kepekaan dalam persepsi terhadap diri sendiri, orang lain dan terhadap hidup pada umumnya.
- e. Menetapkan tujuan yang tidak realistis, yaitu terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- f. Tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan.
- g. Tidak mampu memusatkan perhatian atau berkonsentrasi pada tugas-tugas.
- h. Mempunyai sikap acuh atau negatif pada sekolah.
- i. Menolak upaya guru untuk memotivasi/mendisiplinkan diri di dalam kelas.
- j. Mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya dan kurang dapat mempertahankan persahabatan.

11. *Gifted*

Berbeda dengan *gifted under achiever*, anak dengan *gifted* memiliki beberapa kelebihan dan potensi positif yang dapat dikembangkan secara optimal. Perlu dipahami bersama, bahwa *gifted* tidak termasuk dalam kategori *disable*, melainkan *gifted* masuk dalam kategori *able*, yaitu anak dengan kemampuan yang optimal (Felopulos, 2014). Adapun beberapa ciri yang muncul pada anak dengan *gifted* adalah sebagai berikut.

- a. Kemampuan seseorang untuk bermanfaat bagi orang lain.
- b. Memiliki kreativitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh orang lain.
- c. Motivasi menghasilkan karya yang sangat bagus bagi orang lain.
- d. Pesat dalam perkembangan awal (bahasa, matematika, kreativitas, dan lain-lainnya).

- e. Memiliki bakat dalam bidang khusus.
- f. Motivasi belajar tinggi dan memiliki etika yang juga baik.
- g. Susah bergaul dengan sebaya (Mangunsong, 1998).
- h. *Hight ability including hight intelligence* (Renzulli, 1978).
- i. *Hight creativity for the solution of problem.*
- j. *Hight task commitment hight level motivation and ability to see a project throught.*

12. Gangguan Perpasif (C)

Gangguan perpasif cenderung terjadi di masa awal kehidupan anak (Kaplan, Sadock, 2010). Adapun gangguan perpasif terjadi pada 4 elemen, yaitu sosial, bahasa, komunikasi, dan perilaku.

13. Autisme

Anak dengan autisme dicirikan dengan beberapa kondisi sebagai berikut.

- a. Kelemahan kualitatif dalam interaksi sosial, yang termanifestasi dalam sedikitnya dua dari beberapa gejala berikut.
 - 1) Kelemahan dalam penggunaan perilaku nonverbal, seperti kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh, dan gerak tangan dalam interaksi sosial.
 - 2) Kegagalan dalam mengembangkan hubungan dengan teman sebaya sesuai dengan tingkat perkembangannya.
 - 3) Kurangnya kemampuan untuk berbagi perasaan dan empati dengan orang lain.
 - 4) Kurang mampu mengadakan hubungan sosial dan emosional yang timbal balik.
- b. Kelemahan kualitatif dalam bidang komunikasi. Minimal harus ada satu dari gejala berikut ini.
 - 1) Perkembangan bahasa lisan (bicara) terlambat atau sama sekali tidak berkembang dan anak tidak mencari jalan untuk berkomunikasi secara nonverbal.
 - 2) Bila anak bisa bicara, maka bicaranya tidak digunakan untuk berkomunikasi.

- 3) Sering menggunakan bahasa yang aneh, *stereotype* dan berulang-ulang.
 - 4) Kurang mampu bermain imajinatif (*make believe play*) atau permainan imitasi sosial lainnya sesuai dengan taraf perkembangannya.
- c. Pola perilaku serta minat dan kegiatan yang terbatas dan berulang. Minimal harus ada satu dari gejala berikut ini.
- 1) *Pre-okupasi* terhadap satu atau lebih kegiatan dengan fokus dan intensitas yang abnormal atau berlebihan.
 - 2) Terpaku pada suatu kegiatan ritualistik atau rutinitas.
 - 3) Gerakan-gerakan fisik yang aneh dan berulang-ulang seperti menggerak-gerakkan tangan, bertepuk tangan, dan menggerakkan tubuh.
 - 4) Sikap tertarik yang sangat kuat atau *pre-okupasi* dengan bagian-bagian tertentu dari objek.

14. Pervasif selain Autisme

Gangguan pervasif yang menghambat anak dalam perkembangan komunikasi dan interaksi sosial tidak hanya berupa autisme. Namun, ada beberapa bentuk gangguan pervasif yang kerap kali berkembang pada anak-anak sebagai berikut.

a. *Asperger's Disorder (AD)*

Gejala ini mirip seperti autisme. Namun, anak yang mengalami AD tidak mengalami masalah di area komunikasi.

b. *Childhood Disintegrative Disorder (CDD)*

Dalam usia 2 tahun anak-anak cenderung berkembang dengan normal, tanpa ada gangguan perkembangan yang terlalu berarti. Namun, usia di atas 2 tahun perkembangan komunikasi dan sosial anak-anak mulai terganggu hingga terpenuhi kriteria autisme. Pada 2 tahun ke atas, anak-anak dengan CDD mengalami kehilangan kemampuan bahasa, permainan, motorik, dan interaksi sosial.

c. *Rett's Disorder (RD)*

RD terjadi pada anak dengan perlambatan pertumbuhan kepala. Saat lahir hingga usia 5 bulan pertama, perkembangan kepala anak

cenderung normal. Anak dengan RD mengalami gangguan berbahasa reseptif dan ekspresif, kurang mampu dalam koordinasi gerak, memiliki masalah dalam gerak tangan (suka meremas-remas).

d. *PDD Nose*

PDD Nose merupakan kriteria gangguan perpasif dengan kriteria di luar kriteria yang di sebut di atas.

15. Gangguan Rate

Gangguan rate dicirikan dengan beberapa kondisi sebagai berikut.

- a. Perkembangan masa bayi nampak normal.
- b. Perkembangan psikomotor tampak normal dalam 5 bulan pertama.
- c. Lingkaran kepala yang normal saat lahir.

Tambahan kondisi lain setelah periode perkembangan, seperti berikut.

- a. Hilangnya keterampilan tangan dan memunculkan gerakan tangan stereotipik (gerakan tangan yang khas).
- b. Hilangnya keterlibatan sosial dalam awal perjalanan, walaupun sering kali interaksi sosial tumbuh kemudian.
- c. Koordinasi buruk pada gerak tangan dan gerakan tubuh.
- d. Gangguan perkembangan bahasa ekspresif (menyampaikan pesan) dan reseptif (menerima pesan) disertai gangguan psikomotorik yang parah.

16. Gangguan Disintegratif

Anak dengan gangguan disintegratif mengalami pertumbuhan yang normal pada 2 tahun pertama kehidupan. Anak memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal, hubungan sosial, permainan, dan perilaku adaptif sesuai dengan capaian usia. Anak dengan gangguan disintegratif kehilangan kemampuan yang telah dicapai (sebelum usia 10 tahun) dalam sekurangnya dua hal sebagai berikut.

- a. Bahasa ekspresif atau reseptif.
- b. Keterampilan sosial dan perilaku adaptif.
- c. Pengendalian usus atau kandung kemih.
- d. Kemampuan bermain.
- e. Keterampilan motorik.

17. Gangguan Disintegratif Masa Anak-Anak

Anak dengan gangguan disintegratif masa kanak-kanak mengalami kelainan fungsi sekurangnya dalam dua bidang berikut.

- a. Gangguan interaksi sosial
Tidak terbentuk dengan baik kemampuan dan perilaku nonverbal. Anak juga mengalami kegagalan dalam membangun hubungan pertemanan, dan tidak ada timbal balik dalam hubungan sosial emosi.
- b. Gangguan komunikasi
Tidak adanya bahasa ucapan, tidak mampu bercakap, bahasa stereotipik dan berulang, dan tidak ada permainan khayalan.
- c. Pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang dan stereotipik.

18. Asperger

Asperger merupakan jenis gangguan kualitatif dalam interaksi sosial anak. Anak dengan asperger menunjukkan sedikitnya dua hal dari kondisi berikut.

- a. Gangguan dalam penggunaan perilaku nonverbal multipel (tatap mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan interaksi sosial).
- b. Gagal dalam *peer interaction* (hubungan pertemanan sebaya) yang tidak sesuai dengan usia perkembangan.
- c. Gangguan jelas dalam ekspresi kesenangan dan kegembiraan orang lain.
- d. Tidak ada timbal balik sosial dan emosional.
Pola perilaku, minat, dan aktivitas yang terbatas, berulang, dan stereotipik, seperti ditunjukkan oleh sekurangnya satu dari hal sebagai berikut.
 - a. Terdorong dengan satu atau lebih pola minat yang stereotipik dan terbatas (dalam intensitas maupun fokusnya).
 - b. Ketaatan yang tampaknya tidak fleksibel terhadap rutinitas atau ritual yang spesifik dan nonfungsional.
 - c. Manerisme motorik berulang (misalnya menjentikkan atau memutarakan tangan atau jari atau gerakan kompleks seluruh tubuh).

- d. *Pre*-okupasi yaitu sangat terfokus dan selalu memiliki perhatian dan pikiran yang intens ke bagian-bagian benda tertentu.
- e. Terganggu dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.
- f. Tidak terdapat keterlambatan menyeluruh yang bermakna secara klinis dalam hal bahasa (masialnya menggunakan kata tunggal dalam umur 2 tahun, frase komunikatif digunakan dalam usia 3 tahun).
- g. Tidak terdapat keterlambatan yang bermakna secara klinis dalam kognitif, menolong diri, dan perilaku adaptif yang sesuai usia (kecuali interaksi sosial) dan keingintahuan tentang lingkungan.

19. Tunarungu

Anak dengan tunarungu disebutkan oleh Telford dan Sawrey dengan ciri sebagai berikut.

- a. Ketidakmampuan memusatkan perhatian yang sifatnya kronis.
- b. Kegagalan merespon apabila diajak bicara.
- c. Terlambat berbicara atau melakukan kesalahan artikulasi.
- d. Mengalami keterbelakangan di sekolah.

Anak dengan tunarungu dapat diidentifikasi melalui perilaku yang tampak dengan kecenderungan sebagai berikut.

- a. Ketidakmampuan memberikan perhatian.
- b. Mengarahkan kepala/telinga ke arah pembicara.
- c. Gagal mengikuti instruksi lisan.
- d. Meminta pengulangan terutama untuk pertanyaan.
- e. Memiliki masalah wicara.
- f. Cenderung menarik diri.
- g. Sangat fokus pada wajah atau mulut lawan bicara.
- h. Respon-respon tidak sesuai atau inkonsistensi.

Selain ciri perilaku seperti diuraikan di atas, anak dengan tunarungu juga memiliki kecenderungan ciri fisik sebagai berikut.

- a. Telinga mengeluarkan cairan.
- b. Bernafas melalui mulut.
- c. Sering menggunakan kapas pada telinga.
- d. Ekspresi tampak letih & tertekan.

20. Gangguan Bahasa Ekspresif

Anak dengan gangguan perkembangan bahasa ekspresif dicirikan dengan kondisi sebagai berikut.

- a. Skor rendah dalam tes bahasa reseptif.
- b. Perbendaharaan kata terbatas, membuat kesalahan dalam *tenses*, kesulitan dalam mengingat kosakata atau membentuk kalimat dengan panjang.
- c. Kesulitan dalam bahasa ekspresif mengganggu capaian akademik atau pekerjaan, komunikasi sosial.

21. Gangguan Bahasa Reseptif (Ekspresif Campuran)

Anak dengan gangguan perkembangan bahasa reseptif dicirikan dengan kondisi sebagai berikut.

- a. Nilai tes bahasa reseptif dan ekspresif rendah.
- b. Gangguan bahasa ekspresif, kesulitan mengerti kata, kalimat, atau kata dengan jenis tertentu (istilah uang dan lainnya).
- c. Kesulitan bahasa mengganggu capaian akademik atau pekerjaan atau komunikasi sosial.

22. Kecemasan Berlebihan

Anak dengan kecemasan yang berlebihan dan tidak sesuai cenderung mengalami gangguan terkait dengan kelekatan, baik kelekatan dengan rumah atau kelekatan dengan figur individu tertentu. Anak dengan kecemasan berlebihan memiliki paling sedikit tiga atau lebih dari gejala-gejala yang disebutkan berikut.

- a. Penderitaan berlebihan, jika terjadi atau akan dihadapi perpisahan dari rumah atau tokoh kelekatan utama.
- b. Ketakutan berlebihan tentang kehilangan atau tentang kemungkinan bahaya yang mengenai tokoh lekatnya.
- c. Kekhawatiran berlebihan, bahwa kejadian yang tidak diharapkan akan menyebabkan perpisahan (misalnya, hilang atau diculik).
- d. Ketegangan dan penolakan untuk pergi ke sekolah atau tempat lain, karena rasa takut akan perpisahan.

- e. Secara berlebihan merasa takut atau enggan untuk sendiri atau tanpa tokoh kelekatan utama.
- f. Enggan dan menolak untuk pergi tidur tanpa dekat dengan tokoh lekat.
- g. Mimpi buruk berulang dengan tema perpisahan.
- h. Keluhan gejala fisik yang berulang kali (seperti nyeri kepala, perut mual, atau muntah).
- i. Lama gangguan kurang dari empat minggu.
- j. Menghambat capaian akademik, pekerjaan, dan sosial.

23. Mutisme Selektif

Anak dengan mutisme selektif memiliki gejala-gejala sebagai berikut.

- a. Gangguan berbicara yang konsisten di situasi sosial tertentu (di mana diharapkan untuk berbicara, misalnya di sekolah walaupun berbicara di situasi lain).
- b. Mengganggu pencapaian pendidikan, pekerjaan, atau komunikasi sosial.
- c. Lama gangguan sekurangnya satu bulan (tidak termasuk bulan pertama awal masuk sekolah pada saat anak biasanya malu dan menolak berbicara).
- d. Kegagalan untuk berbicara bukan karena tidak ada pengetahuan atau kenyamana dalam sitausi sosial.
- e. Ganggauan tidak termasuk dalam gangguan komunikasi (misal gagap), dan tidak terjadi karena mengalami gangguan perkembangan pervasif, skizofrenia, atau gangguan psikotik lainnya.

24. Gangguan Pergerakan Stereotipik

Perilaku motorik nonfungsional berulang dan tampaknya dikendalikan (misalnya menggoyang atau mengayunkan tangan, menggoncangkan tubuh, membenturkan kepala, memasukkan benda ke mulut, mengigit diri sendiri, menusuk kulit atau lubang tubuh, atau memukul diri sendiri).

Perilaku mengganggu aktivitas normal atau menyebabkan cedera yang ditimbulkan bagi diri. Jika ada RM, maka perilaku melukai diri akan menjadi

lebih parah. Perilaku tidak diakibatkan oleh OCD atau TIK atau efek dari zat medis. Perilaku menetap selama 4 minggu atau lebih.

25. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) pada Anak

Post Traumatic Stress Disorder pada anak ditandai dengan adanya gejala sebagai berikut.

- a. Ketakutan yang menetap.
- b. Adanya pikiran yang menakutkan setelah kejadian trauma.
- c. Menghindari kejadian yang telah dialami.
- d. Adanya *symptoms of extreme arousal*.

26. Gangguan Mood

Gangguan *mood* pada anak dan remaja dicirikan dengan gejala sebagai berikut.

- a. *Mood* tertekan sepanjang hari, hampir setiap hari, sebagaimana terindikasi oleh catatan yang subjektif (merasa sedih atau kosong) atau observasi oleh yang lain (tampak penuh air mata). Pada anak dan remaja *mood* mudah marah.
- b. Minat dan kenyamanan berkurang secara keseluruhan, atau hampir semua (diindikasikan secara subjektif atau pengamatan orang lain).
- c. Kehilangan berat badan ketika tidak diet (berubah 5% setiap bulan). Bertambah atau berkurang nafsu makan setiap hari. Pada anak dianggap gagal membuat harapan mendapatkan berat badan).
- d. Sulit tidur (insomnia, hipersomnia).

27. Bipolar Disorder

Bipolar merupakan gangguan kecemasan yang sangat ekstrim depresif dan sangat ekstrim bahagia. Bisa terjadi pada siswa remaja khususnya SMA, dengan gejala sebagai berikut.

- a. Cemas.
- b. *Mood* meningkat.
- c. Mudah tersinggung.
- d. Harga diri melambung.
- e. Penurunan kebutuhan akan tidur.

- f. Dorongan bicara.
- g. Pikiran kacau.
- h. Peningkatan aktivitas.
- i. Terlalu bahagia secara berlebihan hingga merasa sakit.
- j. Gangguan *mood*.

28. Gangguan Jiwa pada Anak

Gejala gangguan jiwa pada anak terlihat dari beberapa gejala awal yang muncul sebagai pemicu. Jika gejala awal ini bersifat menetap dan terjadi berulang-ulang, maka ini diindikasikan sebagai embrio bentuk gangguan jiwa berkelanjutan. Gejala awal gangguan jiwa yang muncul pada anak sebagai berikut

- a. Sakit perut, sakit kepala, kurang konsentrasi, agresif, masalah dengan sosial, kenakalan, menentang, dan menyendiri.
- b. Cemas, depresi, menarik diri, merasa tidak berharga, *error thinking* (misalnya berpikir bahwa orang-orang pada jahat sama saya, ingin culik saya). Kondisi ini sering kali mengawali munculnya gangguan psikosis awal pada anak.
- c. Gangguan memori, gangguan tidur, gelisah, sering terbangun dari tidur, tidak tenang, tidak tertarik dengan kegiatan sekolah, dan tidak pintar.
- d. Pikiran, emosi, perilaku berbeda dengan anak lain pada umumnya.

Adapun stres psikologis pada anak ditandai dengan gejala-gejala berikut.

- a. Sering mengamuk tanpa sebab yang jelas.
- b. Susah ditenangkan saat tantrum.
- c. Memiliki ketakutan yang tidak wajar.
- d. Mudah sekali bangun dari tidur.
- e. Mimpi buruk.
- f. Sedih dan perasaan tidak berdaya yang menetap.
- g. Menarik diri dan menghindari teman.
- h. Tidak konsen dan tidak mampu memberi perhatian.
- i. Hidupnya tidak teratur.

Indikator anak dengan tekanan psikologis dapat juga terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Regresi, penurunan standar kerapian/rawat diri.
 - b. Tidak tertarik pada masa depan.
 - c. Tidak mau makan atau terlalu banyak makan.
 - d. Tidak semakin dewasa (dalam tanggung jawab dan peran).
 - e. Menantang resiko.
 - f. Tidak sopan dan merusak.
 - g. Memiliki ide yang tidak umum, pikiran aneh, dan halusinasi.
- Indikasi tekanan psikologis masalah dan kesehatan jiwa dijelaskan sebagai berikut.
- a. Tidak tertarik atau prestasi menurun.
 - b. Tidak dapat akrab dengan anak lain.
 - c. Agresif (*more than typically expected in the situation*).

29. Hiperaktif

Developmental delay or developmental arrest in general or in some areas eg. social skills and independence (Kdsmatter).

30. ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*)

ADHD atau *Attention Deficit Hyperactivity Disorder* (minimal 6 dan berlaku 6 bulan) ditandai dengan munculnya tiga elemen hambatan pada anak berikut.

- a. Sering kali gagal memperhatikan baik-baik terhadap sesuatu yang detail atau membuat kesalahan yang sembrono dalam pekerjaan sekolah dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- b. Sering kali mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas atau kegiatan bermain.
- c. Sering kali tidak mendengarkan, jika diajak bicara secara langsung.
- d. Sering kali tidak mengikuti baik-baik instruksi dan gagal dalam menyelesaikan pekerjaan sekolah, pekerjaan, atau tugas di tempat kerja (bukan disebabkan karena perilaku melawan atau kegagalan untuk mengerti instruksi).
- e. Sering kali mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan kegiatan.

- f. Sering kali kehilangan barang/benda penting untuk tugas-tugas dan kegiatan, misalnya kehilangan permainan atau kehilangan tugas sekolah, kehilangan pensil, buku, dan alat tulis lain.
 - g. Sering kali menghindari, tidak menyukai atau enggan untuk melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan usaha mental yang didukung, seperti menyelesaikan pekerjaan sekolah atau pekerjaan rumah.
 - h. Sering kali bingung/terganggu oleh rangsang dari luar.
 - i. Sering kali lekas lupa dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari.
- Paling sedikit enam atau lebih dari gejala-gejala hiperaktivitas impulsivitas berikutnya bertahan selama paling sedikit 6 bulan.

31. Hiperaktivitas

Berikut adalah tanda dari hiperaktivitas.

- a. Sering kali gelisah tangan atau kaki mereka dan sering menggeliat di kursi.
- b. Sering meninggalkan tempat duduk di dalam kelas atau dalam situasi lainnya, di mana diharapkan agar anak tetap duduk.
- c. Sering berlarian atau naik-naik secara berlebihan dalam situasi di mana hal ini tidak tepat.
- d. Sering mengalami kesulitan dalam bermain atau terlibat dalam kegiatan senggang secara tenang.
- f. Sering 'bergerak' atau bertindak seolah-olah 'dikendalikan oleh motor'.
- g. Sering berbicara berlebihan.

32. Impulsivitas

Berikut adalah tanda dari implusivitas.

- a. Mereka sering memberi jawaban sebelum pertanyaan selesai.
- b. Mereka sering mengalami kesulitan menanti giliran.
- c. Mereka sering menginterupsi atau mengganggu orang lain, misalnya memotong pembicaraan atau permainan.

Terdapat beberapa catatan penting lainnya yang juga perlu dikenali, ketika melakukan asesmen anak dengan ADHD anatar lain sebagai berikut.

- a. Beberapa gejala hiperaktivitas impulsifitas atau kurang perhatian yang menyebabkan gangguan muncul sebelum anak berusia 7 tahun.
- b. Ada suatu gangguan di dua atau lebih *setting*/situasi.
- c. Harus ada gangguan yang secara klinis, signifikan di dalam fungsi sosial, akademik, atau pekerjaan.

ADHD pada anak bisa diungkap melalui tes memori pada WISC yang mengungkap kemampuan memephatikan, mendengar, dan konsentrasi.

33. Gangguan Tingkah Laku

Gangguan tingkah laku pada anak ditandai dengan beberapa ciri berikut.

- a. Sering menggertak, mengancam, atau menak-nakuti orang lain.
- b. Sering memulai perkelahian fisik.
- c. Menggunakan senjata yang dapat menyebabkan bahaya fisik secara serius pada orang lain, misalnya pentungan, batu bata, botol pecah, pisau, dan senjata api.
- d. Kejam secara fisik pada orang lain.
- e. Kejam secara fisik pada binatang.
- f. Mencuri ketika berhadapan dengan korban, misalnya merampok, merampas dompet, pemerasan, dan perampokan bersenjata.
- g. Memaksa seseorang pada aktivitas sosial.

Perusakan barang milik dengan ciri sebagai berikut.

- a. Menggunakan sengaja, menciptakan kebakaran dengan tujuan menyebabkan kerusakan serius.
- b. Menggunakan sengaja untuk merusak barang milik orang lain (selain dengan membakar).
- c. Tidak jujur atau mencuri, dengan ciri sebagai berikut.
 - 1) Membongkar masuk ke rumah, bangunan, atau mobil orang lain.
 - 2) Sering berbohong untuk memperoleh barang-barang, kebaikan hati, atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban.
 - 3) Mencuri barang yang nilainya tidak sedikit tanpa menghadapi korban, misalnya mencuri toko tetapi tanpa merusak dan menyelundup.

Pelanggaran pertauran serius, dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Sering di luar rumah pada malam hari, walaupun dilarang orang tua mulai sebelum berumur 13 tahun.
- b. Meninggalkan rumah orang tua satu kali dan tidak kembali dalam periode yang lama.
- c. Sering membolos dari sekolah sebelum berumur 13 tahun.
- d. Gangguan tingkah laku yang terbatas pada lingkungan keluarga dengan ciri sebagai berikut.
 - 1) Perilaku disosiatif dan agresif.
 - 2) Terjadi di lingkungan rumah dan terbatas pada keluarga inti atau lingkungan rumah.
 - 3) Mencuri di rumah sendiri.
 - 4) Merusak barang milik rumah sendiri.
 - 5) Mengakibatkan kebakaran di rumah sendiri.

34. Gangguan Tingkah Laku Tidak Berkelompok

Berikut ciri-ciri gangguan tingkah laku tidak berkelompok.

- a. Perilaku dissosial dan agresif berkelanjutan.
- b. Berhubungan dengan anak yang bersangkutan (penderita) dengan anak lainnya.
- c. Rusaknya hubungan dengan teman sebaya.
- d. Dikucilkan/ditolak/tidak disenangi oleh teman sebaya.
- f. Perselisihan dengan orang dewasa.
- g. Tindakan kejahatan dilakukan sendiri.
- h. Tingkah laku melecehkan.
- i. Banyak berkelahi (dengan anak yang lebih dewasa).
- j. Pemasaran dan tindak kekerasan.
- k. Membangkang secara berlebihan.
- l. Perbuatan kasar.
- m. Sikap tidak mau bekerja sama.
- n. Melawan otoritas.
- o. Mengadap yang berlebihan dan amarah yang tidak terkendali.
- p. Merusak barang kepunyaan orang lain.
- q. Sengaja membakar.
- r. Perlakuan kejam terhadap sesama anak.

35. Gangguan Tingkah Laku Berkelompok

Gangguan tingkah laku berkelompok ditandai dengan ciri sebagai berikut.

- a. Perilaku dissosiatif dan agresif yang berkelanjutan.
- b. Terjadi pada anak yang umumnya cukup terintegrasi di dalam kelompok sebayanya.
- c. Termasuk dalam kelompok teman sebaya dengan ikatan yang langgeng.
- d. Kurang akrab dengan orang dewasa.
- e. Umumnya terjadi di luar lingkungan keluarga seperti sekolah.

36. Levelisasi Gangguan Tingkah Laku

Lebih lanjut dalam buku panduan diagnostik DSM IV dijelaskan juga tingkatan gangguan tingkah laku pada anak sebagai berikut.

- a. Ringan
Gangguan tingkah laku dikatakan ringan, jika ada masalah tingkah laku yang memenuhi kriteria diagnostik dan menyebabkan bahaya kecil bagi orang lain.
- b. Sedang
Gangguan tingkah laku dikatakan sedang, jika ada masalah tingkah laku yang memenuhi kriteria diagnostik dan berakibat pada orang lain secara ringan dan berat.
- c. Berat
Gangguan tingkah laku dikatakan berat, jika ada masalah tingkah laku yang memenuhi kriteria diagnostik dan menyebabkan bahaya besar bagi yang lain.

37. Gangguan Sikap

ODD atau *Oppositional Defiant Disorder* adalah suatu pola negativistik, permusuhan, dan perilaku menentang yang menerus tanpa adanya pelanggaran yang serius terhadap norma sosial atau hak orang lain (Kaplan dan Sadock, 1997).

Pendapat di atas juga didukung oleh pendapat Wilmhurst (dalam Nurita, 2012) menyatakan bahwa perilaku negativistik yang terkait dengan ODD mencakup ketidakmauan mengikuti arahan, keras kepala, dan

ketidakmauan untuk berkompromi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Selain itu juga mencakup perilaku yang disengaja dan terus menguji kesabaran orang lain, perilaku mengabaikan aturan, perilaku argumentatif, dan ketidakmauan untuk bertanggung jawab atas perilaku yang tidak pantas yang dilakukan. Sementara itu, perilaku bermusuhan/menantang yang terkait dengan ODD yaitu secara sengaja membuat jengkel orang lain dan dapat juga melalui agresi, yang lebih sering dalam bentuk verbal.

Menurut Bandura (Walgitto, 2004), perilaku manusia tidak otomatis terpicu oleh stimulus eksternal. Perilaku muncul melalui situasi sosial, melalui interaksi sosial dengan orang lain yang dilakukan melakukan observasi atau dengan model ataupun contoh yang ada di sekitarnya.

Senada dengan pendapat di atas (Gordon dalam Nurita, 2012) menjelaskan bahwa anak yang tinggal pada lingkungan yang bermasalah, adanya kombinasi antara sosial ekonomi, stres yang tinggi, orang tua bermasalah, isolasi sosial, dan stimulus lingkungan yang kurang mendukung mengakibatkan anak menjadi bermasalah, sehingga munculnya perilaku antisosial. Sependapat dengan pandangan di atas (Belsky dan Hetherington dalam Nurita, 2012) yang menyatakan bahwa banyak faktor terkait dengan keberfungsian keluarga yang terbukti berperan dalam berkembangnya perilaku *disruptive*, meliputi pola asuh, pendisiplinan, kehangatan keluarga, arahan terhadap anak, dan kondisi psikologis orang tua tentu mempengaruhi anak melalui pengasuhan yang mereka terapkan.

Lebih lanjut, ciri anak dengan gangguan sikap disebutkan APA (1987) dalam beberapa gejala sebagai berikut.

- a. Mencuri lebih dari satu kali tanpa konfrontasi dengan korban.
- b. Melarikan diri dari rumah semalaman paling tidak dua kali selama tinggal bersama orang tua, atau sekali tanpa kembali lagi.
- c. Sering berdusta.
- d. Sengaja melakukan pembakaran.
- e. Bolos dari sekolah dan pekerjaan.
- f. Memasuki dengan paksa rumah, gedung, dan mobil orang lain.
- g. Melakukan kekejaman fisik pada binatang.

- h. Memaksa aktivitas seksual.
- i. Menggunakan senjata lebih dari sekali dalam perkelahian.
- j. Sering memulai perkelahian fisik.
- k. Mencuri dengan konfrontasi.
- l. Melakukan kekerasan fisik pada orang lain.

*Senarai sebutan bukan untuk
mendiskriminasikan.*

Sebaliknya, menemukenali kekhususan akan meningkatkan layanan.

BAB 10

Inklusi dari Masa ke Masa



*Gambar 10.1 Audiensi dengan dirjen GTK kemendikbud terkait pembicaraan tentang inklusi.
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.*

A. Sejarah Perkembangan Pendidikan Inklusif Dunia



Gambar 10.2 Paralympic yang diikuti ABK.
Sumber: SIT Darul Abidin Depok Jabar.

Pada dasarnya, pendidikan inklusif telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw.. Hal ini dapat dilihat dari tafsir surah 'Abasa yang memuat kisah tentang orang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Sebagaimana yang telah dibahas di landasan filosofi pendidikan inklusif di atas, bahwa orang cacat pun berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini menunjukkan konsep pendidikan inklusif sesungguhnya telah ada sejak lebih dari 14 abad silam.

Selanjutnya, sejarah mencatat pada abad ke-18, Jean Marc-Gaspard Itard (1775-1838) seorang dokter berkebangsaan Perancis mencoba mendidik seorang ABK yang berusia 12 tahun yang bernama Victor. Kisah tentang pendidikan yang diberikan kepada Victor ini terkenal dengan istilah "Anak liar dari Aveyron". Kemudian, Thomas H. Gallandet dan Louis Braille (1781-1838) memformalkan pendidikan bagi ABK dengan

mendirikan sekolah bagi para penyandang tunanetra dan tunarungu. Sekolah yang mereka dirikan dianggap merupakan cikal bakal pendidikan inklusif. Edouard Seguin (1812-1880) mewarisi semangat dari gurunya, yakni Itard yang memberikan kesempatan bagi para ABK mendapatkan layanan pendidikan. Ia membuat program belajar bagi anak-anak muda yang mempunyai hambatan belajar. Tidak berhenti di situ saja, Seguin memelopori konsep intervensi dini bagi ABK yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul "Idiocy and Its Treatment" oleh *The Pshysiological Method*. Konsep inilah yang kemudian menjadi rujukan Maria Montessori untuk mengembangkan pendidikan bagi kaum miskin urban dan anak-anak tunagrahita.

Memasuki abad ke-19, tepatnya pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Scandinavia untuk mempelajari *mainstreaming* dan *least restrictive environment* (Zimba, 2011). Negara-negara Scandinavia, seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia dianggap sebagai negara-negara yang memprakarsai munculnya konsep pendidikan inklusif. Selanjutnya, di Inggris dalam *Ed. Act. 1991* mulai menggeser model pendidikan segregatif bagi anak *special need* (ABK) dan memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusif.

Perkembangan konsep pendidikan inklusif semakin menggeliat dengan adanya berbagai tuntutan agar penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata. Hal ini dapat dilihat sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan Deklarasi *Education for All*. Implikasi dari *statement* ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak, tanpa kecuali mendapatkan layanan pendidikan yang sama.

Sebagai tindak lanjut Deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif dan dikenal dengan *The Salamanca Statement on Inclusive Education* yang telah dibahas di atas.

B. Sejarah Pendidikan Inklusif di Indonesia



Gambar 10.3 Memanfaatkan layanan PDDK inklusif.
Sumber: Lembaga AI Uswah Pamekasan.

Sejak awal tahun 2000, Indonesia telah mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang. Namun, mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia dan menggunakan konsep pendidikan inklusif (Syahrul, 2012).

Proses menuju pendidikan inklusif bagi ABK di Indonesia hakikatnya sudah berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1960-an yang ditandai dengan berhasil diterimanya beberapa lulusan SLB Tunanetra di Bandung masuk ke sekolah umum, meskipun ada upaya penolakan dari pihak sekolah. Lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Selanjutnya, pada akhir tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi, dan mengundang *Helen Keller International, Inc.* untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi.

Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 002/U/1986 tentang Pendidikan Terpadu bagi Anak Cacat. Seiring berakhirnya proyek sekolah integrasi, aplikasi penerapannya pun lambat laun mulai tidak tampak. Pada akhir tahun 1990-an, upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerja sama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braillo Norway dan Direktorat PLB.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif bagi penyandang cacat, pada tahun 2002 secara resmi pemerintah mulai melakukan proyek uji coba di berbagai provinsi yang memiliki pusat sumber. Sejak saat itu, lebih dari 1.500 siswa berkelainan telah bersekolah di sekolah reguler. Kemudian, pada tahun 2005, meningkat menjadi 5,11% (6.000) siswa dari seluruh jumlah anak berkebutuhan khusus. Sedangkan, pada tahun 2007, meningkat menjadi 7,5% (15.181) siswa yang tersebar pada 796 sekolah inklusif yang terdiri dari 17 TK, 648 SD, 75 SLTP, dan 56 SLTA.

Selanjutnya, untuk mendorong implementasi pendidikan inklusi secara lebih luas, pada tahun 2004, di Bandung diadakan lokakarya nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung. Isinya tentang himbauan kepada pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha, industri, serta masyarakat untuk dapat menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Kemudian, dilanjutkan dengan simposium internasional di Bukittinggi pada tahun 2005 dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya tentang perlunya dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Guna terus mengembangkan pendidikan inklusif, pemerintah juga telah mengambil berbagai strategi, baik melalui diseminasi ideologi pendidikan inklusif, mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber, penataran atau pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru sekolah reguler, reorientasi pendidikan guru LPTK, desentralisasi dalam

implementasi pendidikan inklusif, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusi, sampai pada pembukaan program magister dalam bidang inklusi, dan pendidikan kebutuhan khusus. Hasilnya, pada kisaran tahun 2004-2007 muncul apresiasi dan antusiasme kuat di kalangan masyarakat untuk mengimplementasikannya. Misalnya, pada tahun 2005 cukup banyak sekolah reguler yang mengajukan untuk menjadi sekolah inklusi, yakni 1.200 sekolah. Namun, yang disetujui oleh pemerintah untuk dilaksanakan hanya 504 sekolah, karena konsekuensinya pemerintah harus memberikan subsidi dan fasilitas lain penunjang proses pembelajaran. Meningkatnya implementasi pendidikan inklusi waktu itu, menjadikan Indonesia berada pada urutan ke-58 dari 130 negara. Kemudian, pada tahun 2008 dalam rencana strategi Kemendikbud, dalam Pendidikan Menengah, dipaparkan data UNESCO mengenai peringkat negara Indonesia dalam kaitannya dengan sekolah inklusif bahwa Indonesia turun ke peringkat ke-63 dari 130 negara. Pada tahun 2009, peringkat Indonesia semakin merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara. Peringkat yang merosot ini diduga karena jumlah ABK yang tidak banyak mendaftar ke sekolah reguler.

Pemerintah mencoba meningkatkan animo masyarakat untuk memanfaatkan layanan pendidikan inklusif dengan memberikan tambahan insentif bagi guru pembimbing khusus dan biaya operasional bagi sekolah yang menangani ABK. Namun, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp330 miliar per tahun dari total anggaran Kemendikbud yang berjumlah sekitar Rp55 triliun (Syahrudin, 2012). Anggaran itu sebagian besar dialokasikan untuk pemberian beasiswa dan *block grant* khusus untuk anak autis. Kemendikbud menyediakan beasiswa Rp2,5 juta per tahun untuk 6.000 anak autis yang terdaftar di sekolah. Selain itu, ada pula beasiswa Rp750.000,00 per tahun bagi anak berkebutuhan khusus.

C. Perkembangan Model Sekolah di Indonesia

Kebutuhan ABK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang akan membantu mereka mendapatkan bekal keterampilan hidup, tentu tidak hanya cukup dengan hadirnya sekolah-sekolah inklusif. Dengan kata lain,

kehadiran sekolah inklusif bukan berarti menggantikan atau menghapus model sekolah lain yang selama ini telah menampung ABK. Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, telah ada model sekolah segregasi dan model sekolah integrasi (pendidikan terpadu).

D. Sekolah Segregasi

Sekolah segregasi adalah sistem persekolahan yang memisahkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari sistem persekolahan reguler (Agustywati, 2009). Di Indonesia, bentuk sekolah segregasi ini berupa satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras), dan lain-lain. Satuan pendidikan khusus atau SLB terdiri atas jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Sebagai satuan pendidikan khusus, maka sistem pendidikan yang digunakan terpisah sama sekali dari sistem pendidikan di sekolah reguler, baik kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, sampai pada sistem pembelajaran, dan evaluasinya. Tujuan model pendidikan khusus ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman ABK, serta memungkinkan anak tersebut memasuki dunia luar dan aktif bermasyarakat setelah mengikuti pendidikan formal di sekolah khusus (Zimba, 2011). Tujuan tersebut diharapkan dapat tercapai dengan mengkhususkan dan memisahkan ABK dengan anak reguler.

Pada awalnya, model pendidikan segregasi dianggap memiliki banyak kelebihan. Kelebihan tersebut, di antaranya PDBK merasa tenang tidak didiskriminasikan, metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa, dan sarana prasarana yang sesuai. Namun, seiring dengan pengetahuan yang berkembang, sistem persekolahan segregasi mulai dikritisi. Ada beberapa kelemahan yang dikhawatirkan akan menghambat perkembangan PDBK. Kelemahan yang paling menonjol dari model sekolah segregasi, yaitu biaya

yang relatif mahal. PDBK tidak mendapatkan pergaulan yang lebih luas. Mereka tumbuh dan berkembang dengan lingkungan yang terbatas, yakni bersama PDBK lainnya. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya perkembangan emosi dan sosial PDBK. Mereka tidak dilatih untuk masuk ke situasi dan lingkungan yang lebih beragam. Hal ini dapat berpengaruh pada kemampuan mereka untuk dapat hidup dan diterima dengan wajar di masyarakat yang heterogen. Sebaliknya, masyarakat pun tidak dilatih pula untuk dapat bersosialisasi dengan ABK, sehingga mereka tidak cukup bijak menerima ABK di lingkungannya. Namun, model segregasi masih dibutuhkan ABK yang memang masih sangat butuh bantuan layanan pendidikan dengan penanganan yang sangat khusus dan berada di lingkungan yang terbatas hingga mereka dianggap siap untuk masuk ke model sekolah lainnya.

E. Sekolah Integrasi

Sekolah integrasi atau terpadu adalah model sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler bersama dengan anak normal dengan satuan pendidikan sekolah reguler. Model sekolah integrasi yaitu sekolah yang memiliki pusat sumber daya atau unit khusus yang melekat pada sekolah tersebut. Sumber daya atau unit khusus ini adalah unit yang melakukan pengaturan instruksional bagi PDBK termasuk memberi pengajaran khusus PDBK pada waktu tertentu (Zimba, 2011).

Perbedaan dengan sekolah reguler, di sekolah integrasi disediakan seorang guru pembimbing khusus (guru PLB) dan ruangan khusus untuk melayani PDBK. Pelayanan yang didapat PDBK yang sedikit berbeda dengan anak lainnya, yaitu bimbingan dari guru PLB berupa bantuan untuk lebih memahami materi pelajaran, pengayaan, dan rehabilitasi sosial yang mengalami masalah sosialisasi dengan lingkungan sekolah.

Sekolah integrasi tidak memberikan perlakuan khusus atau kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Sekolah tetap menggunakan kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta sistem pembelajaran reguler untuk semua peserta

didik. Jika ada peserta didik tertentu mengalami kesulitan dalam mengikuti pendidikan, maka konsekuensinya peserta didik itu sendiri yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dituntut di sekolah reguler. Dengan kata lain, pendidikan integrasi menuntut anak yang harus menyesuaikan dengan sistem yang dipersyaratkan sekolah reguler, bukan sekolah yang berupaya menyesuaikan sistem yang sesuai dengan masing-masing kebutuhan siswa. Kondisi ini menyebabkan kegagalan PDBK untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini yang menjadi kelemahan model terpadu.

F. Sekolah Inklusif

Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan integrasi atau terpadu. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, serta pada sistem penilaiannya. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing.

Pendekatan inklusif mampu mengidentifikasi hambatan belajar yang dimiliki peserta didik. Melalui identifikasi inilah akan didapatkan solusi kreatif untuk mengatasinya (Zimba, 2011). Melalui pendekatan inklusif ini, guru kelas bertanggung jawab untuk mengajar PDBK di kelas *mainstream*. Hal ini dapat dicapai dengan berfokus pada intervensi kelas dan melakukan adaptasi serta modifikasi dalam rangka untuk mendorong keterlibatan yang lebih responsif antara pendidik dan peserta didik.

Pada dasarnya sekolah inklusif adalah sekolah reguler yang merancang standar sekolah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik yang

normal maupun yang berkebutuhan khusus. Layanan pendidikan di sekolah inklusif harus memperhatikan beberapa hal berikut.

1. Kebutuhan dan kemampuan anak.
2. Satu sekolah untuk semua.
3. Tempat belajar yang sama bagi semua anak.
4. Pembelajaran didasarkan kepada hasil *assessment*.
5. Tersedia aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak merasa aman dan nyaman.
6. Lingkungan kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.
7. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum fleksibel.

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Perubahan tersebut yang menjadi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan model sekolah inklusif.

*Di Indonesia, di dunia, sejak
zaman nabi hingga kini,
mari kita pelajari agar banyak
ibrah yang didapati!*

BAB 11

Manajemen Pendidikan Inklusif



*Gambar 11.1 Tim divisi pendidikan inklusi.
Sumber: Rakornas JSIT Indonesia Divisi Pendidikan Inklusif.*

JSIT Indonesia
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusif

A. Kekhasan Manajemen Pendidikan Inklusif



Gambar 11.2 Sarana dan prasarana dalam pendidikan inklusi.
Sumber: SIT Lentera Insan Depok.

Sejak dicanangkannya pendidikan inklusif di Indonesia, sekolah-sekolah reguler/umum mulai beralih menjadi sekolah inklusif. Kekhasan manajemen pendidikan inklusif yang berbeda dengan manajemen sekolah umum, di antaranya sebagai berikut.

1. Membangun kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keanekaragaman, dan keunikan setiap peserta didik serta menghargai perbedaan.
2. Kesiapan mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual.
3. Guru senantiasa berupaya untuk menerapkan pembelajaran yang interaktif.
4. Guru diharapkan mampu melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Guru pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diminta melibatkan orang tua secara aktif dan bermakna dalam proses pendidikan.

Secara lebih terinci, manajemen pendidikan inklusif merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan

pendidikan inklusif. Sesuai dengan konsep manajemen pendidikan secara umum, pengelolaan manajemen pendidikan inklusi meliputi perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi. Pada manajemen pendidikan inklusif titik tekan pengelolaannya pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodir semua keunikan peserta didik tanpa terkecuali. Pada tataran mikro manajemen pendidikan inklusif diselenggarakan dengan maksud agar terwujudnya proses pembelajaran yang kondusif dengan suasana belajar yang menciptakan teroptimalisasinya setiap potensi diri seorang anak.

B. Prinsip Pengelolaan Pendidikan Inklusif



Gambar 11.3 Proses pembelajaran inklusi pada anak ABK.
Sumber: SIT Ummul Quro Depok.

Di bawah ini merupakan prinsip pengelolaan pendidikan inklusif.

1. Prinsip Pemerataan dan Peningkatan Mutu

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun strategi upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, karena terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya.

2. Prinsip Kebutuhan Individual

Setiap anak memiliki kesempatan dan kebutuhan yang berbeda-beda oleh karena itu pendidikan harus diusahakan untuk menyesuaikan dengan kondisi anak.

3. Prinsip Kebermaknaan

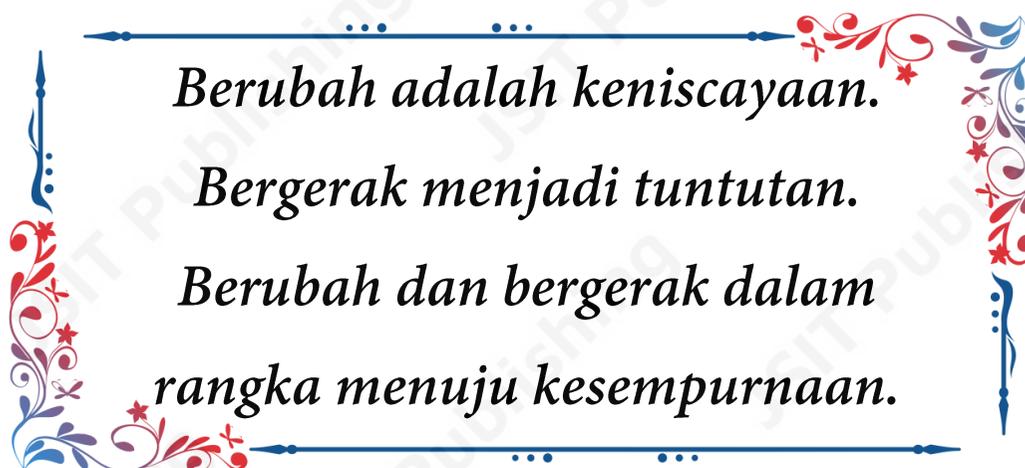
Prinsip inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan.

4. Prinsip Keberlanjutan

Pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan.

5. Prinsip Keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.



BAB 12

Kurikulum Pendidikan Inklusi



*Gambar 12.1 Sekolah inklusif jenjang menengah pertama.
Sumber: solo.tribunnews.com*

JSIT Indonesia
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusi

A. Kurikulum dalam Pendidikan Inklusi

Kurikulum sejatinya menyesuaikan diri dengan peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan kurikulum. Kurikulum yang tidak sesuai dan diterapkan di sekolah inklusif, menjadi penghambat yang paling signifikan dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran bagi PDBK (Hindle, 2009). Hambatan belajar tersebut timbul karena adanya aspek yang berbeda dari kurikulum reguler, seperti konten (yakni apa yang diajarkan), gaya bahasa atau pengantar, bagaimana kelas diatur dan dikelola, metode dan proses yang digunakan dalam mengajar, laju pengajaran dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan kurikulum, bahan belajar dan peralatan yang digunakan, serta bagaimana pembelajaran dinilai dan dilaporkan.



Gambar 12.2 Modifikasi media sebagai pendukung belajar.

Sumber: Sekolah Baruku Malang.

Di Indonesia, pada dasarnya kurikulum yang digunakan sekolah inklusif mengacu pada kurikulum sekolah reguler, yaitu kurikulum nasional. Kurikulum standar nasional ini, kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik tiap peserta didik melalui beberapa modifikasi. Modifikasi yang dapat dilakukan, yakni modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi metode atau pendekatan pembelajaran, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan belajar, serta modifikasi pengelolaan kelas (Agustywati, 2009).

1. Modifikasi Alokasi Waktu

Modifikasi alokasi waktu mengacu pada kecepatan belajar peserta didik. Modifikasi ini dilakukan dengan tujuan memberi kesempatan lebih bagi PDBK untuk dapat mengerjakan tugas belajar dengan durasi waktu yang lebih lama dibanding peserta didik lainnya. Sebagai gambaran, seorang PDBK diberi kesempatan untuk dapat mengerjakan tugas belajarnya selama 20 menit, di saat peserta didik lainnya hanya diberi waktu 10 menit. Kelebihan waktu itu diharapkan dapat

membantu PDBK untuk dapat mengerjakannya dengan baik dan tuntas sesuai dengan ritme belajar yang mereka sanggupi.

2. Modifikasi Isi/Materi

Modifikasi isi/materi yaitu memodifikasi materi pembelajaran yang disesuaikan dengan daya serap PDBK. Bagi PDBK yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, maka perlu adanya perluasan dan pendalaman materi pelajaran. Penambahan materi pun dapat dilakukan. Sebaliknya, bagi PDBK yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, maka secara umum PDBK belum dapat memahami materi pembelajaran yang bersifat kompleks, sehingga perlu ada penyesuaian materi pelajaran agar PDBK dapat lebih mudah memahaminya.

3. Modifikasi Metode dan Pembelajaran

Modifikasi metode dan pembelajaran dilakukan untuk memudahkan PDBK memahami pembelajaran yang diberikan. Setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing apalagi PDBK. Ada yang dapat lebih cepat menangkap materi pembelajaran melalui berbagai permainan dibandingkan dengan metode ceramah. Ada pula yang lebih suka, jika materi pembelajaran disampaikan dengan cara bermain peran dibandingkan menonton film. Berbagai metode dan pendekatan pembelajaran perlu diberikan dalam kelas, agar setiap peserta didik mendapatkan suasana belajar yang menggairahkan.

4. Modifikasi Media Pembelajaran

Modifikasi media pembelajaran dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi media pembelajaran sebagai alat bantu belajar. Penggunaan kertas dan pensil saja, sebagaimana umumnya digunakan di sekolah-sekolah, sudah sepatutnya ditinggalkan. Berbagai media pembelajaran yang ada harus mulai dioptimalkan penggunaannya. Dari media elektronik *gadget* hingga alat-alat sederhana, seperti barang daur ulang dapat dijadikan media pembelajaran. PDBK akan lebih tertarik dan terbantu dalam mengikuti proses pembelajaran dengan adanya berbagai media pembelajaran yang sesuai.

5. Modifikasi Sarana dan Prasarana

Modifikasi sarana prasarana khususnya yang spesifik dibutuhkan PDBK perlu diupayakan. Jika sebuah sekolah menerima PDBK dengan spesifikasi tunanetra, maka perlu adanya alat Braille. Bagi PDBK yang menggunakan kursi roda, maka desain sekolah harus disesuaikan dengan mereka, agar mereka dapat secara mandiri beraktivitas dengan mudah.

6. Modifikasi Lingkungan Belajar

Modifikasi lingkungan belajar yakni pembangunan suasana belajar yang kondusif bagi kelas yang diisi oleh berbagai karakteristik peserta didik. Suasana belajar yang kondusif maksudnya adalah suasana belajar yang membuat setiap peserta didik merasa aman dan nyaman mengikuti pembelajaran, tidak terkecuali PDBK. Tidak ada diskriminasi bagi mereka yang dianggap minoritas. Tidak ada kata atau perilaku *bully* yang diarahkan kepada para PDBK. Suasana ini dapat diciptakan dengan memberi pemahaman inklusi ke setiap warga kelas.

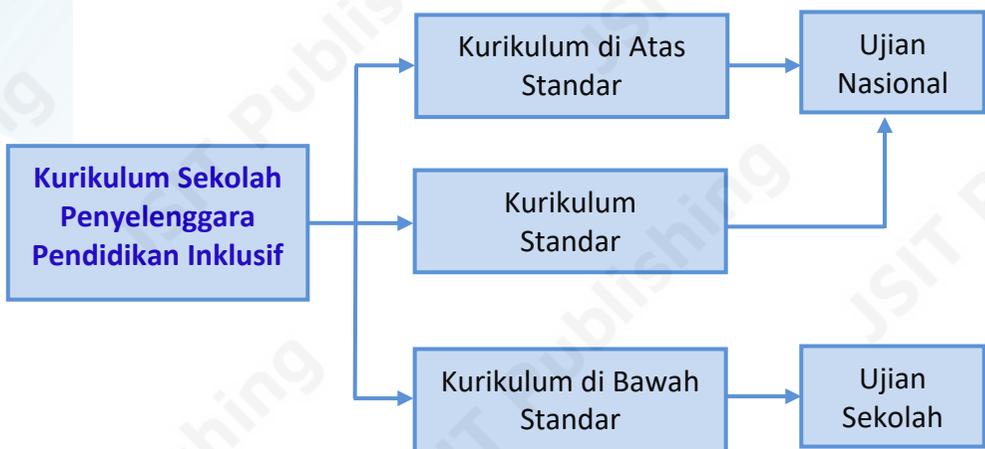
Prinsip dalam pendidikan inklusif ialah kurikulum dirancang dan dikembangkan secara fleksibel. Kurikulum fleksibel yaitu adanya penyesuaian-penyesuaian dengan model eskalasi (ditingkatkan), duplikasi (sama/meniru/menggandakan), modifikasi (mengubah untuk disesuaikan), substitusi (mengganti), dan omisi (menghilangkan) (Kustawan, 2012).

Selain itu, kegiatan pembelajaran *setting* pendidikan inklusif menerapkan prinsip pembelajaran PAIKEM. PAIKEM merupakan model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, seperti berikut.

1. Guru menghargai keunikan peserta didik, memahami karakteristik, dan kompetensinya.
2. Guru dan peserta didik bersama-sama mengikuti proses pembelajaran secara aktif, inovatif, dan kreatif dengan bahagia.
3. Tujuan pembelajaran disusun dengan simpel, namun dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
4. Berbagai tugas disajikan secara praktis, dan mengeksplorasi lingkungan sekitar, baik sosial maupun alamnya.

5. Melatih peserta didik untuk dapat aktif terlibat, berpendapat dan bertanya.
6. Hasil belajar atau karya peserta didik ditampilkan atau diperlihatkan di depan kelas.
7. Membangun keberanian peserta didik untuk dapat berekspresi, menunjukkan perasaan, dan mengutarakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.
8. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dengan tehnik yang bervariasi.

Berikut adalah bagan penggunaan kurikulum sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (Kustawan, 2012).



Manajemen kurikulum sekolah inklusif, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan Kurikulum Inklusif

Perencanaan kurikulum inklusif mengacu pada kurikulum reguler yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Secara lebih khusus, sekolah inklusif dapat memilih kurikulum model mana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut model kurikulum pendidikan inklusif menurut Direktorat Pendidikan Dasar Nasional yang terdiri dari hal berikut.

a. Model kurikulum reguler

Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan lainnya dalam kelas yang sama.

b. Model kurikulum reguler dengan modifikasi
Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

c. Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI)
Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Perumusan PPI yang ideal adalah dengan kolaborasi ke semua unsur di atas, yakni pihak sekolah, orang tua, dan spesialis dari internal sekolah dan eksternal sekolah (Team Polytechnic West, 20019).

Kurikulum PPI atau dalam bahasa Inggris *Individualized Education Program (IEP)* merupakan komponen kurikulum yang paling khas dari pendidikan inklusif. IEP merupakan pengelolaan yang melayani kebutuhan unik peserta didik dan merupakan layanan yang disediakan dalam rangka pencapaian tujuan yang diinginkan serta bagaimana efektivitas program tersebut akan ditentukan.

Perencanaan yang dibuat dilandasi dengan karakteristik atau kekhasan masing-masing peserta didik. Untuk mengetahui karakteristik peserta didik perlu adanya identifikasi dan asesmen di awal penerimaan peserta didik, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam perencanaan itu pula, pendidik memilih pendekatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan kemampuan, serta kebutuhan peserta didik berdasarkan asesmen awal tersebut (Hindle, 2009).

2. Pengorganisasian Kurikulum Inklusif

Setelah perencanaan kurikulum inklusif diselesaikan, maka tahap selanjutnya tidak jauh berbeda dengan proses organisasi di manajemen pendidikan pada umumnya. Pimpinan sekolah mulai

mengelola dan mengatur berbagai hal, seperti model kalender akademik, jadwal pelajaran, tugas dan kewajiban guru, serta program kegiatan berdasarkan penetapan kurikulum fleksibel yang akan digunakan.

Dalam sebuah kelas inklusif, berdasarkan hasil asesmen awal diketahui terdapat 3 PDBK dengan kategori, *slow learner*, *low vision*, dan autisme. Kemudian, dirancang perencanaan kurikulum inklusif bagi PDBK tersebut. Selanjutnya, pendidik berupaya melakukan proses organisasi kurikulum sebagai berikut.

- a. Pendidik menetapkan seorang *shadow teacher* untuk mendampingi PDBK dengan kategori autisme.
- b. Kemudian menunjuk seorang tutor sebaya dari peserta didik yang terbaik untuk melakukan *tutoring* PDBK dengan kategori *slow learner*. Sedangkan untuk PDBK *low vision*, pendidik menata ruang kelas dan menentukan posisi duduk yang dianggap paling nyaman bagi PDBK tersebut untuk mengikuti kegiatan kelas.

B. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Inklusi

Dalam pelaksanaannya, proses pembelajaran pun harus memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik. Dalam proses pembelajaran yang ramah bagi semua anak, kita harus memastikan bahwa kurikulum yang digunakan harus fleksibel dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan semua anak dan tidak sebaliknya sesuai salah satu butir dalam *Salamanca*.



Gambar 12.3 Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
Sumber: SIT Sekolah Alam Palangkaraya.

Guru tidak boleh melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan yang sama bagi semua peserta didik. Guru harus dapat melaksanakan pembelajaran dengan berbagai model pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sesuai buku pedoman pembelajaran bagi PDBK. Inilah yang disebut dengan kurikulum fleksibel,

yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan keunikan peserta didik (Hindle, 2009).

Selanjutnya, bagi beberapa PDBK yang membutuhkan bantuan tenaga khusus, selama proses pembelajaran disarankan untuk didampingi tenaga bantu, seperti *shadow teacher* atau *teacher's aide*. Tenaga bantu inilah yang akan membantu secara individual PDBK dalam mengikuti pembelajaran di sekolah.

Kegiatan yang dilaksanakan di dalam kelas juga diberikan secara variatif, disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, baik secara individual ataupun secara berkelompok. Sebagai contoh, saat pendidik mengajar matematika, dibuat beberapa kelompok kerja, berdasarkan kemampuan peserta didik. Masing-masing kelompok diberi tugas dengan disesuaikan kemampuan kelompok tersebut. Kegiatan yang diberikan pun disajikan dalam bentuk kegiatan yang kreatif. Misalnya, untuk pembelajaran matematika, tidak melulu mengerjakan soal, tapi bisa dalam permainan, percobaan, proyek, atau kegiatan di luar ruangan. Hal ini membantu peserta didik yang memiliki gaya belajar yang berbeda.

Bagi PDBK yang dinyatakan harus dibuatkan PPI (Program Pembelajaran Individual), maka perlu disusun PPI tersebut. Perumusan PPI meliputi enam komponen, yaitu *elicitors*, *behaviors*, *reinforcers*, *entering behavior*, *terminal objective*, dan *enroute* (Delphie, 2006). Secara terperinci, keenam komponen tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. *Elicitors* yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan atau menyebabkan perilaku.
2. *Behaviors* merupakan kegiatan peserta didik terhadap sesuatu yang dapat ia lakukan.
3. *Reinforcers* yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang muncul sebagai akibat dari perilaku dan dapat menguatkan perilaku tertentu yang dianggap baik.
4. *Entering behavior* yaitu kesiapan menerima pelajaran.
5. *Terminal objective* yaitu sasaran dari pencapaian suatu tujuan pembelajaran yang bersifat tahunan.
6. *Enroute* yakni langkah dari *entering behavior* menuju ke *terminal objective*.

C. Pengawasan dan Evaluasi Kurikulum Inklusif

Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Pengawasan dalam proses pembelajaran ditujukan untuk dapat menjamin berjalannya proses pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan kaidah pendidikan inklusif. Tugas pengawasan ini dapat dilakukan secara internal oleh kepala sekolah atau pimpinan lainnya dan komite sekolah atau orang tua peserta didik.

Evaluasi dilakukan secara intensif dan komperhensif. Evaluasi yang intensif diperlukan untuk melihat apakah kurikulum yang diterapkan efektif pelaksanaannya, karena kurikulum pendidikan inklusif yang bersifat fleksibel, membutuhkan pengamatan terus menerus untuk senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Secara komperhensif, evaluasi harus dilakukan berbagai pihak, baik dari pimpinan sekolah, guru, peserta didik dan orang tua, serta tenaga kependidikan atau tenaga ahli lainnya. Kolaborasi antara semua *stakeholders* termasuk orang tua dari PDBK dalam mengevaluasi proses tumbuh kembang peserta didik, akan sangat membantu menentukan keberhasilan pendidikan peserta didik khususnya PDBK (Salisbury, 2005). Evaluasi kurikulum dapat ditujukan pada tingkat fleksibilitas kurikulum, sistem yang dibangun, partisipasi aktif peserta didik dan orang tua, tenaga pendidik yang mumpuni, dan pilihan pendekatan pembelajaran yang tepat (Acedo, 2011).

Pengawas eksternal yaitu dari dinas kependidikan setempat dan pihak yang berkepentingan lainnya. Secara berkala Dinas Pendidikan Kota melakukan pengawasan, baik melalui laporan berkala yang diserahkan sekolah maupun pengawasan secara langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah binaan. Pengawasan yang dilakukan meliputi delapan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan standar sekolah inklusif yang telah ditetapkan.

Evaluasi eksternal juga dapat dilakukan dengan mengundang tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan (Hindle, 2009). Kunjungan tenaga profesional khusus ini, dapat membantu sekolah mendapatkan evaluasi yang lebih komperhensif untuk kemudian hasil evaluasi ini dapat ditindaklanjuti.

D. Proses Pembelajaran

Di bawah ini merupakan proses pembelajaran pendidikan inklusif.

1. Bentuk Kelas Reguler Penuh

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum sama.

2. Bentuk Kelas Reguler dengan Cluster

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus.

3. Bentuk Kelas Reguler dengan Pull Out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler. Namun, dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus.

4. Bentuk Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out

Anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus.

5. Bentuk Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian

Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Namun, dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler.

6. Bentuk Kelas Khusus Penuh di Sekolah Reguler

Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler.

E. Standar Isi Pendidikan Inklusif

Materi adalah isi atau konten yang harus dipelajari oleh siswa supaya bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran bisa berupa informasi, konsep, teori, dan lain-lain. Materi pembelajaran harus relevan atau mendukung terhadap pencapaian kompetensi dasar dan standar kompetensi/kompetensi inti. Jika menggunakan kurikulum 2006 (KTSP), rumusan materi tidak lagi tersedia dalam kurikulum, tetapi harus

dibuat atau dikembangkan sendiri oleh sekolah/guru. Materi biasanya dikembangkan oleh guru dengan mengacu kepada buku sumber yang relevan.

Pada bagian standar isi ini, disampaikan kurikulum yang menjadi kekhasan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Kekhasan itu mencerminkan pengembangan baik perluasan maupun pendalaman dari kurikulum nasional sesuai dengan semangat memajukan pendidikan Indonesia. Pengembangan yang dimaksud dalam standar isi ini adalah integrasi nilai-nilai keislaman dan memperhatikan keragaman difabel peserta didik yang disesuaikan dengan KI-KD yang ada.

Model kurikulum pada pendidikan inklusi dapat dibagi tiga, yaitu sebagai berikut.

1. Model kurikulum reguler yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.
2. Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.
3. Model kurikulum PPI yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait.

F. Penilaian Hasil Belajar

Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kemajuan seseorang dilihat dari adanya perkembangan positif dari hari ke hari, bukan sekedar membandingkan dengan orang lain. Peserta didik berkebutuhan khusus memiliki hambatan yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam penilaian hasil belajar diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian dengan jenis hambatan yang dialami, penyesuaian tersebut ialah sebagai berikut.

1. Penyesuaian Waktu

Waktu yang diberikan saat dilakukan penilaian bisa berbeda dengan peserta didik regular. PDBK dapat diberi tambahan waktu pengerjaan soal atau ujian yang diberikan.

2. Penyesuaian Cara

Modifikasi cara yang dilakukan oleh pendidik saat ujian atau tes berlangsung yakni dengan membantu dalam proses yang berhubungan dengan fisik. Sebagai contoh, bagi PDBK yang memiliki masalah motorik halus, maka ia diperkenankan menjawab soal secara lisan, tanpa menulis.

3. Penyesuaian Materi

Penyesuaian materi soal disesuaikan dengan hambatan yang dialami PDBK, khususnya yang memiliki keterbatasan dalam bidang kognitif. Soal diberikan dengan tingkat kesulitan yang diturunkan dari soal yang diberikan pada peserta didik regular. Sebaliknya, PDBK yang memiliki IQ di atas rata-rata, bisa diberikan soal atau tugas yang lebih dibandingkan yang lain.

*Bukanlah anak yang dipaksa
mengejar target kurikulum, namun
kurikulum yang hakikatnya
d disesuaikan dengan kondisi anak.*

BAB 13

Manajemen Peserta Didik Pendidikan Inklusif



Gambar 13.1 Asesmen awal pada ABK.
Sumber: SDIT Al Kamil Dedak Jabar.

A. Manajemen Peserta Didik dalam Sekolah Inklusif

Manajemen peserta didik menjadi hal penting diperhatikan pengelolaannya, setelah manajemen kurikulum. Pada sekolah inklusif, peserta didik yang bergabung lebih majemuk dengan berbagai karakteristiknya, dibandingkan sekolah reguler. Merujuk pada Panduan Pendidikan Inklusif dalam *Education White Paper 6*, secara garis besar, hal yang terkait dengan pengelolaan peserta didik di sekolah inklusif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. *Enrolment and attendance at neighbourhood schools is a priority for all learners.*
2. *All learners have an identified home base and are on the roll of the ordinary classroom.*
3. *Special education is viewed by all stakeholders as a service, not a place.*
4. *Emphasis is placed on supporting learners in ordinary/general education classrooms.*
5. *Service delivery options are flexible. How learners receive special education services is based on their changing needs according to a flexible schedule.*
6. *The ISP teams directly and deliberately determine decisions about the type, quantity and intensity of support services.*
7. *Paraprofessionals' roles and responsibilities in general education classrooms (e.g., therapists, learning and social support and counselling personnel) are articulated and implemented.*
8. *Special education, teacher assistants, daily living skills, technical assistants, bilingual/SASL, and other service providers are integral to the school's functioning and are never made to feel that they are second-class personnel.*
9. *Team or co-teaching is supported as a service delivery option.*
10. *Although professionals are primarily responsible for providing services, peer tutors, volunteers, paraprofessionals, and others may participate in supporting all learners.*

11. *Information about learners with disabilities is made available to all individuals entitled to that information in order to work effectively with learners. Confidentiality is a high priority.*
12. *Personnel evaluation takes into account the increasing array of approaches through which special education services are provided (e.g., co-educators may be observed together).*
13. *The school must have measures in place for alternative or adaptive assessments in line with the Policy on Support and Adaptations for Learners who Experience Barriers in Assessment—this would include staff identified to coordinate and manage the procedures, additional spaces and equipment needed.*
14. *Guidelines for introducing more functional, vocational and skills orientated content in the delivery of the curriculum must be applied for identified learners.*

Prinsip-prinsip di atas, senada dengan manajemen pendidikan inklusif yang dikembangkan di Indonesia. Di Indonesia, di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen peserta didik meliputi antara lain, sebagai berikut.

1. Penerimaan peserta didik baru.
2. Program bimbingan dan penyuluhan.
3. Pengelompokan belajar peserta didik.
4. Kehadiran peserta didik.
5. Mutasi peserta didik.
6. Papan statistik peserta didik.
7. Buku induk peserta didik.

Berikut tahapan manajemen peserta didik pada pendidikan inklusif.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sebelum penerimaan peserta didik baru, sekolah inklusif disyaratkan membuat panitia atau tim khusus PPDB. Secara rinci, berikut langkah-langkah dalam melaksanakan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus, yakni sebagai berikut.

- a. Membentuk panitia peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilengkapi dengan tenaga yang sudah memahami tentang pendidikan inklusif dan keberagaman karakteristik peserta berkebutuhan khusus.
- b. Menyusun panduan penerimaan peserta didik baru yang menyertakan atau mengakomodasi peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus. Persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus perlu disusun pada pedoman penerimaan peserta didik baru untuk setiap tahun pelajaran.

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) perlu dituangkan pada pedoman tersebut. Misalnya, setiap calon peserta didik baru, ketika mendaftar harus menyerahkan atau melampirkan hasil pemeriksaan dokter umum atau dokter spesialis mata untuk calon peserta didik yang mempunyai hambatan gangguan penglihatan (tunanetra). Untuk peserta didik yang mempunyai hambatan atau gangguan pendengaran (tunarungu) harus menyerahkan atau melampirkan hasil pemeriksaan dari dokter umum atau dokter THT. Untuk peserta didik yang mempunyai hambatan atau gangguan kecerdasan (tunagrahita) harus menyerahkan atau melampirkan hasil pemeriksaan IQ dari psikolog.

- c. Model penerimaan calon peserta didik di sekolah inklusif bukan berdasarkan sistem tes yang menyeleksi para calon peserta didik. Istilah tes lebih tepat diganti dengan observasi. Observasi yang dilaksanakan ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi awal mengenai calon siswa. Data dan info tersebut akan digunakan untuk menjadi landasan rancangan rencana pembelajaran yang akan diberikan pada masing-masing peserta didik. Model penerimaan ini, akan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk diterima di sekolah tersebut. Hal ini sesuai

dengan yang dikomitmenkan pada sekolah dengan konsep inklusif, bahwa pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah reguler terdekat bersama-sama dengan teman seusianya.

- d. Untuk dapat mengetahui data yang akurat, panitia PPDB perlu memiliki kemampuan mengobservasi peserta didik. Kemampuan observasi ini selain akan membantu guru mengetahui latar belakang mereka juga dapat melihat potensi sekaligus mendeteksi adanya kondisi khusus pada setiap siswa, baik di awal pendaftaran ataupun sepanjang proses pembelajaran. Kemampuan asesmen untuk guru, biasanya hanya pada jenis asesmen fungsional. Melalui model asesmen ini, akan diketahui sejauh mana kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam melakukan aktifitas tertentu, seperti kemampuan berbahasa seorang anak. Sedangkan jenis asesmen klinis, biasanya dilakukan oleh tenaga khusus yang profesional dan ahli di bidang tersebut, seperti psikolog, dokter anak, atau psikiater. Sebagai contoh, untuk mengetahui *treatment* apa yang harus dilakukan bagi anak yang terdeteksi autisme, maka dibutuhkan asesmen dari seorang psikolog klinis. Dokter dibutuhkan untuk menentukan alat bantu dengar yang akan diberikan pada anak yang terdiagnosa memiliki hambatan audio/pendengaran.

2. Pengelompokan Belajar

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerima peserta didik dan mengalokasikan kursi/kuota untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Dalam buku panduan pendidikan inklusif yang dikeluarkan Depdiknas, tiap sekolah inklusif, minimal dapat menampung satu PDBK di setiap kelasnya. Sebagai gambaran, peserta didik baru yang akan diterima di sebuah sekolah/satuan pendidikan adalah lima rombongan belajar, maka minimal sekolah tersebut harus menerima 5 (lima) peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, apabila

sekolah dinilai memiliki sumber daya yang memadai, disarankan untuk dapat menerima 3-4 PDBK pada setiap rombongan belajar.

Bagi sekolah yang baru menjalankan model inklusif, disarankan untuk membatasi jumlah atau kuota anak berkebutuhan khusus. Hal ini dimaksudkan agar sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang optimal bagi seluruh peserta didik.

Selanjutnya, ditetapkan penempatan PDBK tersebut. Tiap kelas, ditempatkan PDBK secara merata dari sisi kategori maupun tingkatannya (berat/ringan). *Teacher's aide* dan *shadow teacher* difasilitasi sesuai hasil kesepakatan sekolah dan orang tua pada saat PPDB. GPK didelegasikan untuk melakukan pembimbingan maupun pengawasan kepada guru kelas yang mengajar PDBK tersebut termasuk *teacher's aide* dan *shadow teacher*.

Mengategorikan karakteristik PDBK juga dapat dilihat dari kekhasan dan hambatan sebagai berikut.

- a. *Earning difficulties* yaitu anak dengan kesulitan belajar.
- b. *Physical difficulties* yaitu anak yang memiliki kesulitan bergerak secara fisik.
- c. *Intellectual disabilities* yakni anak yang memiliki kesulitan belajar yang disebabkan banyak faktor, seperti masalah kelahiran, kelaianan bawaan, autisme, *down syndrome*, dan lain sebagainya.
- d. *Sensory disabilities* yaitu anak yang memiliki masalah *sensory*, umumnya mempunyai masalah pada penglihatan dan pendengaran.
- e. *Language impairment* yakni adanya kesulitan berbahasa pada anak.
- f. *Psycho-emotional-disorder* yakni penyimpangan emosi yang terjadi pada anak.
- g. *Giftednes* atau anak berbakat atau yang saat ini lebih dikenal dengan istilah CIBI, cerdas istimewa berbakat istimewa.
- h. *Psychiatric disorders* adalah penyimpangan psikologis atau perilaku yang bisa disebabkan genetika atau pengaruh lingkungan.

- i. *Cultural background* yakni latar belakang budaya perlu diperhatikan, khususnya di sekolah internasional.
- j. *Family issues* yaitu latar belakang keluarga pun dapat dijadikan pertimbangan pengelompokan peserta didik, sehingga setiap kelas memiliki beragam latar.
- k. *Educational background* demikian pula latar belakang pendidikan.
- l. *Socio cultural disadvantage* yaitu anak-anak dengan pengalaman sosial budaya yang kurang baik, perlu menjadi perhatian pula dalam pengelolaan peserta didik.

Pada proses pelaksanaan pembelajaran, pengelompokan peserta didik dibagi menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut.

- a. *Friendship grouping*, yakni pengelompokan siswa berdasarkan kesukaan dalam memilih teman, di antaranya peserta didik itu sendiri.
- b. *Achievement grouping*, yaitu pengelompokan belajar campuran antara anak yang berprestasi tinggi dan siswa yang berprestasi kurang.
- c. *Aptitude grouping*, yaitu pengelompokan siswa berdasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri.
- d. *Attention or interest grouping*, yaitu pengelompokan peserta didik berdasarkan atas perhatian atau minat yang didasari oleh kesenangan peserta didik itu sendiri.
- e. *Intelligence grouping*, yaitu pengelompokan yang didasarkan atas hasil tes inteligensi yang diberikan kepada peserta didik.

3. Program Pembinaan Peserta Didik

Sebagaimana prinsip pengembangan manajemen peserta didik di atas, maka dipersyaratkan berbagai layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik. Layanan yang paling khusus yang ada di sekolah inklusif adalah layanan Bimbingan Konseling (BK) atau layanan unit khusus. Unit layanan khusus ini terdiri dari tenaga-tenaga pendidik dan

kependidikan khusus. Mereka bekerja sama untuk merancang program pembinaan yang sesuai bagi tiap-tiap PDBK (Hindle, 2009).

Berikut beberapa contoh program yang dapat diberikan kepada peserta didik sebagai bentuk layanan pembinaan khusus.

a. *Peer tutoring*

Model tutor secara berkelompok bermanfaat bagi peserta didik yang membutuhkan pendampingan dalam kelompok kecil. Ada kelompok anak yang dapat mengikuti belajar dengan cepat, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama. Keberhasilan model ini sangat tergantung pengetahuan, keterampilan, dan perilaku atau gaya mengajar seorang tutor. Kelebihan dari model ini, di antaranya memungkinkan instruksi belajar yang individual, memungkinkan peserta didik memakai gaya belajar mereka, mendorong peserta didik meningkatkan kemampuannya, mengakselerasi keterampilan belajar, bersegera mendapat umpan balik, dan menjadikan peserta didik yang bertindak sebagai tutor sebagai contoh atau panutan.

b. *Cooperative learning*

Pembelajaran kooperatif adalah sebuah metode pembelajaran yang melibatkan semua anak dari berbagai karakteristik, level yang berbeda dapat bekerja bersama dalam satu kegiatan atau tugas belajar. Pendekatan ini mempromosikan suasana positif, lingkungan yang mendukung meningkatnya penghargaan diri, respek sesama teman yang memiliki latar belakang, dan kondisi serta kemampuan yang berbeda. Pengelompokan kerja dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan tugas, homogenitas kemampuan, keberagaman, pertemanan, *random*, dan kecenderungan atau kesukaan.

c. *Modelling*

Mencontohkan adalah sebuah proses membentuk peserta didik untuk dapat melakukan hal yang harus dikuasai melalui demonstrasi. Hal ini diberikan saat peserta didik mengalami kesulitan untuk memahami bahasa verbal.

d. *Cross curricular learning*

Pembelajaran silang antar bidang ajar akan memperkaya pemahaman peserta didik. Peserta didik akan dapat bereksplorasi lebih, tidak hanya terfokus di satu bidang atau di bidang akademik saja. Namun, memperoleh pengetahuan lainnya dan nilai-nilai kehidupan. Pembelajaran silang berbasis tema. Di Indonesia kita mengenalnya dengan istilah integrasi atau pembelajaran tematik.

e. *Multi level teaching*

Pembelajaran yang dilakukan di kelas, menggunakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan level kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga memungkinkan setiap peserta didik termasuk PDBK mengeksplorasi potensinya dengan optimal (Hindle, 2009).

B. Evaluasi Peserta Didik Pendidikan Inklusif

Evaluasi perkembangan peserta didik diawali dengan kegiatan asesmen atau penilaian. Penilaian menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam pendidikan inklusif. Penilaian di sekolah inklusif tidak hanya pada sisi akademik. Penilaian perlu multidimensi atau sistemik, yang disesuaikan dengan hambatan peserta didik maupun pendidik, kurikulum, lembaga, keluarga, dan masyarakat. Proses penilaian juga dilakukan semua unsur, yakni pendidik atau sekolah, peserta didik, dan orang tuanya (Hindle, 2009).

Penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi yang telah dimiliki peserta didik setelah dilakukannya proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkala dengan berbagai teknik penilaian. Penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik, tidak terbatas hanya pada penilain kemampuan kognitif semata, namun juga kemampuan afektif dan motorik. Hasil penilaian akan digunakan sebagai umpan balik bagi pembelajaran selanjutnya, juga dapat diperlukan sebagai keperluan administratif dan merupakan bahan pelaporan hasil pendidikan yang sudah berlangsung.

Penilaian dalam pendidikan inklusif dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan masing-masing peserta didik (Hindle, 2009). Penilaian tidak disamaratakan untuk setiap anak. Bagi anak rata-rata dapat diberikan standar penilaian yang sama. Sedangkan, PDBK memiliki standar penilaian yang berbeda. Umumnya penilaian PDBK tidak untuk dibandingkan dengan nilai peserta didik lainnya ataupun dengan KKM. Penilaian PDBK dilihat berdasarkan progres capaian dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Capaian saat ini, dibandingkan dengan capaian sebelumnya. Dari sinilah, dapat dilihat apakah PDBK tersebut mengalami perkembangan positif atau sebaliknya.

Pada pendidikan inklusif, penilaian yang dilakukan tergantung dari bentuk kurikulum yang digunakan. Untuk peserta didik non-PDBK, maka penilaian yang dilakukan mengacu dengan kurikulum standar yang diberlakukan di sekolah. Menurut Kustawan (2012), terdapat tiga model peserta didik PDBK seperti berikut.

1. Jika PDBK mengikuti kurikulum umum, maka penilaiannya menggunakan sistem penilaian yang berlaku umum pula.
2. Apabila PDBK mengikuti kurikulum umum yang dimodifikasi, maka sistem penilaiannya pun merupakan modifikasi dari sistem penilaian umum.
3. Jika PDBK yang mengikuti program pembelajaran individual (PPI), maka penilaian yang dilakukan pun bersifat individual dan berdasarkan pada kemampuan dasar yang dimiliki setiap PDBK.

Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar PDBK menurut Kustawan (2012), yakni sebagai berikut.

1. Sahih, penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. Objektif, penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas.
3. Adil, penilaian tidak diskriminatif sehingga merugikan peserta didik atau sebaliknya, penilaian yang memihak sehingga seolah-olah menguntungkan peserta didik.
4. Terpadu, penilaian harus dipahami merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran bukan sesuatu yang terpisah.

5. Terbuka/transparan, semua pihak dapat mengetahui prosedur, kriteria, dan dasar penilaian.
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian mencakup aspek akademik maupun nonakademik dan dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
7. Sistematis, penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan standar baku.
8. Beracuan kriteria, penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian yang mencerminkan penguasaan kompetensi yang ditetapkan sesuai kondisi PDBK.
9. Akuntabel, penilaian dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

...

*Setiap peserta didik unik,
tak pernah ditemui yang identik,
tantangan buat para pendidik
untuk senantiasa cerdas.*

...

BAB 14

Manajemen

Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Inklusif



Gambar 14.1 FGD.

Sumber: Dokumen JSIT Indonesia.

JSIT Indonesia
Tata Kelola Layanan Pendidikan di Sekolah Inklusif

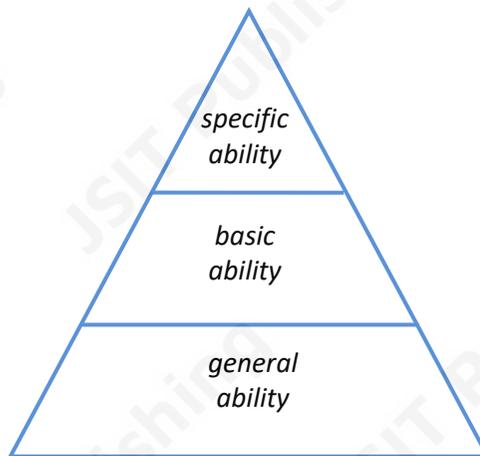
Manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan komponen berikutnya yang menjadi penentu keberhasilan pendidikan di sekolah inklusif. Selain tenaga pendidik, terdapat tenaga kependidikan di sekolah. Pada sekolah reguler, pendidik dan tenaga kependidikan yang disyaratkan sekurang-kurangnya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, laboran, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan sekolah. Untuk sekolah inklusif, selain yang disyaratkan di sekolah reguler, ditambahkan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus.

Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sekolah inklusif mengacu pada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan reguler. Hal yang berbeda terletak pada rekrutmen tenaga khusus, seperti GPK, *shadow teacher*, dan lain-lain. Berikutnya adalah di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan yang berlatar belakang pendidikan umum, perlu diberikan pembinaan khusus terkait dengan meningkatkan kemampuan mendidik di sekolah inklusif. Berikut penjabaran kekhasan manajemen sekolah inklusif.

A. Perencanaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Sebagai sekolah inklusif, hal penting yang dilakukan di awal terkait dengan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga khusus yang mampu membantu terlaksananya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Perencanaan yang dilakukan untuk menentukan kebutuhan tenaga khusus baik dari sisi jumlah maupun kapasitas.

Selain unsur pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah reguler, di sekolah inklusif dikenal istilah GPK (Guru Pembimbing Khusus). GPK adalah pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan khusus atau biasa disebut Pendidikan Luar Biasa (PLB), atau guru yang telah mendapatkan pelatihan tentang penanganan PDBK. Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjadi kebutuhan mendasar di sekolah inklusif.



Gambar 14.2 Diagram kemampuan GPK.
Sumber: Dokumen penerbit.

Kompetensi Guru Pendidikan Khusus yang termaktub dalam panduan sekolah inklusif, selain dilandasi oleh empat kompetensi utama (pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial), secara khusus juga berorientasi pada tiga kemampuan utama, yaitu kemampuan umum (*general ability*), kemampuan dasar (*basic ability*), dan kemampuan khusus (*specific ability*). Ketiganya dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti di atas.

Kemampuan umum adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik pada umumnya, sedangkan kemampuan dasar adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus, kemudian kemampuan khusus adalah kemampuan yang diperlukan untuk mendidik peserta didik kebutuhan khusus jenis tertentu (spesialis).

Berikut ini ketentuan kompetensi yang harus dimiliki tenaga pendidik berdasarkan pedoman sekolah inklusif yang dikeluarkan Kemendiknas.

1. Kemampuan Umum (*General Ability*)

Berikut ialah kemampuan umum yang harus dimiliki tenaga pendidik.

- a. Memiliki ciri warga negara yang religius dan berkepribadian.
- b. Memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri sebagai warga negara.
- c. Memiliki sikap dan kemampuan mengembangkan profesi sesuai dengan pandangan hidup bangsa.
- d. Memahami konsep dasar kurikulum dan cara pengembangannya.

- e. Memahami desain pembelajaran kelompok dan individual.
- f. Mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam melaksanakan dan mengembangkan profesinya.

2. Kemampuan Dasar (*Basic Ability*)

Berikut ialah kemampuan dasar yang harus dimiliki tenaga pendidik.

- a. Memahami dan mampu mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus.
- b. Memahami konsep dan mampu mengembangkan alat asesmen serta melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus.
- c. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran bagi anak berkebutuhan khusus.
- d. Mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus.
- e. Mampu melaksanakan manajemen pendidikan khusus.
- f. Mampu mengembangkan kurikulum pendidikan khusus sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus serta dinamika masyarakat.
- g. Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek medis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus.
- h. Memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek psikologis dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan khusus.
- i. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan khusus.
- j. Memiliki sikap dan perilaku empati terhadap anak berkebutuhan khusus.
- k. Memiliki sikap profesional di bidang pendidikan khusus.
- l. Mampu merancang dan melaksanakan program kampanye kepedulian PLB di masyarakat.
- m. Mampu merancang program advokasi.

3. Kemampuan Khusus (*Specific Ability*)

Kemampuan khusus merupakan kemampuan keahlian yang dipilih sesuai dengan minat masing-masing tenaga kependidikan. Pada umumnya masing-masing guru memiliki satu kemampuan khusus (*specific ability*). Kemampuan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. Mampu melakukan modifikasi perilaku.
- b. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan penglihatan.
- c. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan pendengaran/komunikasi.
- d. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan intelektual.
- e. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan anggota tubuh dan gerakan.
- f. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami gangguan/kelainan perilaku sosial.
- g. Menguasai konsep dan keterampilan pembelajaran bagi anak yang mengalami kesulitan belajar.

Tenaga-tenaga ahli khusus atau profesional yang dapat diminta kerja sama dan bantuannya, yakni *paediatrician, education aides, guidance consellers, occupational therapists, speech pathologists, community workers, dan shadower teacher* (Hindle, 2009).

Dokter spesialis anak memiliki kapasitas untuk mendiagnosa dan menangani kelainan bawaan anak sejak lahir. Mereka dapat mendiagnosa masalah yang terkait dengan fisik, psikis/mental, penyimpangan dan trauma, serta lainnya. Psikolog adalah tenaga ahli dapat membantu membuat merumuskan asesmen bagi PDBK, memberikan intervensi, dan layanan konseling yang terkait dengan hambatan belajar yang dialami peserta didik. Guru bantu berfungsi sebagai asisten guru kelas melalui penanganan nonkependidikan. Mereka dapat membantu peserta didik yang memiliki hambatan intelektual, fisik, dan perilaku agar dapat mengerjakan tugas akademik dengan lebih baik. Konselor pembimbing membantu peserta didik membuat kesepakatan-kesepakatan yang terkait masalah personal, hubungan sosial, dan pendidikan dengan cara memfasilitasi pengembangan diri pada sisi personaliti, sosial, pendidikan, dan pemecahan masalah. Tugas terapis okupasi adalah melakukan asesmen dan menangani anak yang memiliki keterbatasan kemampuan, sehingga menghambat kegiatan sehari-hari. Keterbatasan ini bisa

diakibatkan penyakit, kecelakaan, atau lainnya. Terapis wicara bertugas mendiagnosa dan menangani anak yang memiliki masalah dalam komunikasi, termasuk bicara, berbahasa, suara, kefasihan, dan kesulitan literasi atau anak yang memiliki masalah makan dan menelan. Komunitas pekerja membantu menghubungkan anak dengan keluarga melalui berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Shadower teacher* yaitu orang yang ditugaskan untuk membantu guru kelas atau guru mata pelajaran dengan mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus saat kegiatan pembelajaran.

B. Pengadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Setelah perencanaan sumber daya manusia, selanjutnya pengadaan pegawai, khususnya tenaga khusus. Secara umum, pola rekrutmen yang dilakukan sama dengan pola yang ada di manajemen pendidikan umum. Perbedaannya hanya berupa asesmen khusus yang dapat menilai kapasitas atau keahlian calon pegawai dengan spesialisasi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, untuk merekrut seorang GPK maka harus memenuhi kualifikasi akademik minimum diploma (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa disebutkan, bahwa Pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus. Pentingnya GPK juga termaktub dalam Pasal 41 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa *“Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.”*

Secara umum pembimbing khusus ditugaskan oleh kepala sekolah/kepala dinas/kepala pusat sumber untuk memberikan

bimbingan/advokasi/konsultasi kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Tugas guru pembimbing khusus (Kustawan, 2012), antara lain sebagai berikut.

1. Menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
2. Melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
3. Memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
4. Memberikan bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi peserta didik.
5. Memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibilitas.
6. Menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
7. Melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, dan pihak terkait lainnya.
8. Menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

Dalam pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dirjen SLB Tahun 2007, secara administrasi status kepegawaian, ada beberapa alternatif yang memungkinkan pengadaan GPK.

1. Alternatif 1

Guru Pendidikan Khusus (GPK) yaitu guru tetap pada satuan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (SLB) sebagai basis kedudukannya dan atasan langsung yang bertanggung jawab terhadap pembina guru pendidikan khusus adalah kepala SLB tersebut.

Sekolah umum tempat anak berkebutuhan khusus belajar, diupayakan yang jaraknya berdekatan dengan SLB atau secara akomodasi dari transportasi terjangkau, sehingga guru pendidikan khusus dari sekolah basis dapat melayani beberapa sekolah umum yang ada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan tugas yang dibebankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi kepadanya. Secara organisatoris dapat dilihat pada diagram berikut.



Keterangan:

- = Garis koordinasi
- ➔ = Garis komando/pembinaan
- GPK = Guru Pendidikan Khusus

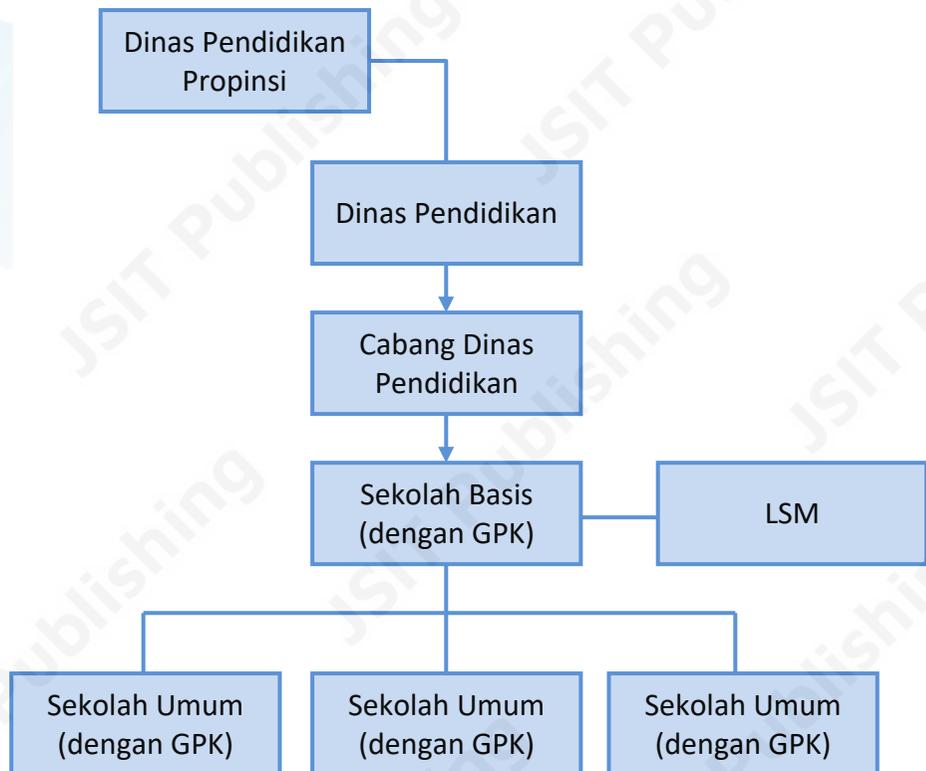
2. Alternatif 2

Guru pendidikan khusus adalah guru tetap pada sekolah umum, yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, atau latar belakang pendidikan umum, namun telah mengikuti sertifikasi tentang pendidikan luar biasa.

Sekolah umum tempat kedudukannya disebut sekolah umum basis. Dengan kedudukannya itu, atasan langsung yang bertanggung

jawab terhadap pembina guru pendidikan khusus adalah kepala sekolah basis.

Guru pendidikan khusus ini dapat melayani beberapa sekolah umum yang jaraknya terjangkau dari sekolah umum basis. Guru pendidikan khusus ini memperoleh tugas dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Cabang Dinas Pendidikan) yang dibebankan kepadanya. Secara organisatoris dapat dilihat pada diagram berikut.



Keterangan:

- = Garis koordinasi
- ➔ = Garis komando/pembinaan
- GPK = Guru Pendidikan Khusus
- LSM = Lembaga Swadaya Masyarakat

3. Alternatif 3

Guru pendidikan khusus yaitu guru-guru yang ada di klinik-klinik pendidikan atau pusat-pusat pengembangan anak. Guru-guru ini lebih banyak berperan sebagai konsultan pendidikan. Anak-anak yang sering

ditangani di klinik-klinik pendidikan ini biasanya yang mengalami gangguan perilaku, perhatian, dan komunikasi, misalnya anak-anak autis dan berkesulitan belajar.

Klinik-klinik pendidikan atau pusat-pusat pengembangan anak berkolaborasi dengan sekolah umum untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah tersebut. Guru pendidikan khusus bersama-sama dengan guru kelas dan orang tua anak bersama-sama menyusun program pendidikan.

Untuk pengadaan tenaga khusus lainnya, sekolah dapat mengupayakan pengadaannya melalui beberapa cara. Pengadaan seorang *shadower teacher*, misalnya dengan beberapa syarat. *Shadower teacher* tidak mesti dari pendidik yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, namun harus memiliki kualifikasi tertentu. Kualifikasi tersebut, di antaranya cinta dengan PDBK, berusaha belajar, memiliki dedikasi tinggi, tidak mudah menyerah, empati, dan dapat bersikap tegas, serta konsisten, sehingga dapat diterima baik oleh PDBK, namun tetap segan dan hormat. Tugas *shadower teacher* secara umum yakni menjembatani instruksi antara guru dan peserta didik berkebutuhan khusus, mengendalikan perilaku dan interaksi, konsentrasi, serta informasi ketertinggalan pelajaran. Berikut ialah tugas *shadower teacher* secara khusus (Kustawan, 2012).

1. Membantu guru kelas mempersiapkan kegiatan.
2. Membimbing penyelesaian tugas PDBK.
3. Menyiapkan program bermain terstruktur baik di dalam kelas maupun luar kelas.
4. Mengalihkan perhatian PDBK terhadap benda tertentu yang membuat terganggunya konsentrasi.
5. Mengurangi perilaku mengulang-ulang yang biasa dilakukan PDBK.
6. Bersama guru kelas dan GPK melaporkan perkembangan belajar PDBK.

Untuk pengadaan *shadower teacher* atau *teacher's aide*, sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua, khususnya dalam pembiayaan. Sekolah memfasilitasi rekrutmennya, namun insentif ditanggung orang tua PDBK.

C. Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Mengacu pada tugas yang diembannya, maka pembinaan pada tenaga kependidikan menurut buku Panduan Pendidikan Inklusif, difokuskan pada dua sasaran, yaitu pembinaan profesi yaitu pembinaan profesi diarahkan pada peningkatan kompetensi (pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial), dan pembinaan karir diarahkan pada peningkatan jenjang aktualisasi diri, mencakup penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

1. Pembinaan Profesi

Pembinaan profesi dibedakan atas pembinaan profesi yang bersifat umum (*general*) dan pembinaan yang bersifat khusus (spesifikasi). Sebelum kedua pembina itu diberikan, ada satu hal yang harus dimunculkan dan dikembangkan pada diri guru-guru, yaitu kesadaran dan kemauan untuk maju, keinginan untuk berubah, dan selalu mempunyai keinginan untuk berprestasi.

Pembinaan profesional yang bersifat umum berorientasi pada empat kompetensi (pedagogis, kepribadian, profesional, dan sosial), dan secara substansial profesional lebih diarahkan pada kajian mengenai pengenalan dan pemahaman anak-anak berkebutuhan khusus secara komprehensif. Peningkatan profesi selain dilakukan secara formal dalam bentuk penyetaraan, sertifikasi, pelatihan, ataupun penataran, dapat juga dilakukan secara nonformal melalui organisasi profesi ataupun kelompok-kelompok kerja yang relevan. Untuk mendalami kajian anak-anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah, dan Kelompok Kerja Pengawas, di bawah koordinasi Kepala Cabang Dinas ataupun Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, yang dilakukan secara rutin dengan menggunakan strategi yang inovatif sehingga menumbuhkan kreativitas para pesertanya.

Tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menularkan ilmu yang telah diperolehnya kepada guru-guru di sekitarnya. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para guru dalam

meningkatkan mutu keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus.

- b. Mengadakan pertemuan guru-guru yang sama-sama mengikuti kegiatan untuk mendapatkan kesamaan langkah kesepakatan yang berkaitan dengan layanan pendidikan, seperti pembuatan program, penggunaan metode-metode khusus, evaluasi pembelajaran, dan keterampilan melakukan asesmen pada anak-anak yang di didiknya.

Sedangkan, pembinaan profesional yang bersifat spesifik lebih ditekankan pada keterampilan khusus, seperti keterampilan berbahasa, berkomunikasi, dan mengelola perilaku anak-anak yang tergolong hiperaktif.

Di samping menggunakan media pertemuan tersebut, ada model kajian yang dapat dilakukan oleh guru-guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pendidikan khusus di bawah koordinasi kepala sekolah, yaitu mengadakan pertemuan bersama secara rutin seminggu sekali kurang lebih satu jam, membahas hal-hal yang ditemui selama melakukan kegiatan pembelajaran.

Pada setiap pembelajaran bersama-sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus selalu menemukan masalah-masalah baru. Ada kalanya masalah tersebut dapat diatasi sendiri, tetapi sering kali menghendaki kajian bersama-sama antara guru dan juga perlu melibatkan orang tua anak. Kegiatan seperti ini di kalangan medis disebutnya dengan *case conference*, yaitu membahas masalah-masalah secara bersama-sama sehingga dapat ditemukan solusinya.

Pembinaan profesi dapat pula dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menempuh pendidikan melalui program sertifikasi. Dalam menempuh program sertifikasi, guru-guru diberi dispensasi untuk mengajar pada hari-hari tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga terkait, dan jika kondisi sekolah memungkinkan guru yang mengambil program sertifikasi dibebaskan dari tugas-tugas mengajar.

2. Pembinaan Karir

Pembina karir yang diarahkan pada aktualisasi kemampuan guru diharapkan dapat mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya dengan keyakinan dan kepercayaan diri, yang terkait dengan penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan.

Pengembangan tenaga pendidik pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif pada hakikatnya sama dengan pengembangan ketenagaan di sekolah-sekolah pada umumnya. Selain harus memiliki kualifikasi akademik dan profesional mereka juga harus memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pendidik. Khusus bagi pendidik di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang di dalamnya ada anak-anak berkebutuhan khusus mereka harus mampu melayaninya secara akademis, psikologis, dan pedagogis. Berkenaan dengan pengembangan kemampuan yang diperlukan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu pengembangan profesional ketenagaan dapat ditempuh melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

Selain itu, dalam rangka mengembangkan kemampuan tenaga pendidik lembaga satuan pendidikan penyelenggara program inklusif wajib melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan serta dikembangkan. Hal tersebut meliputi empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial serta kemampuan khusus yang berkenaan dengan pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara.

Selain dengan perguruan tinggi tersebut, juga diperlukan kerja sama dengan lembaga lain, seperti direktorat terkait, Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kecamatan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Penataran Guru, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

*Guru juga manusia, punya rasa, dan
punya gaya yang berbeda.
Bekerja sama berbeda dengan sama-
sama kerja. Mengelola antar sumber daya
yang ada akan membuat kerja menjadi
lebih bahagia.*

BAB 15

Pengelolaan Sekolah Inklusif



*Gambar 15.1 Jalur pemandu adalah salah satu fasilitas sekolah inklusif.
Sumber: SDIT Ummul Quro Depok.*

A. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Proses PPDB secara umum mengacu pada peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Secara khusus teknis sistem PPDB sekolah swasta diatur masing-masing sekolah. Berikut hasil *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai alur PPDB sekolah inklusi. Sebelum penerimaan peserta didik baru, sekolah inklusif disyaratkan membuat panitia atau tim khusus PPDB. Secara rinci, berikut langkah-langkah dalam melaksanakan PPDB yang mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus.

1. Membentuk panitia penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilengkapi dengan tenaga yang sudah memahami tentang pendidikan inklusif dan keberagaman karakteristik peserta berkebutuhan khusus.
2. Menyusun panduan penerimaan peserta didik baru yang menyertakan atau mengakomodasi peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus. Persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus perlu disusun pada pedoman penerimaan peserta didik baru untuk setiap tahun pelajaran.

Persyaratan penerimaan peserta didik baru bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) perlu dituangkan pada pedoman tersebut, misalnya setiap calon peserta didik baru, ketika mendaftar harus menyerahkan/melampirkan hasil pemeriksaan dokter umum/dokter spesialis mata untuk calon peserta didik yang mempunyai hambatan gangguan penglihatan (tunanetra). Untuk peserta didik yang mempunyai hambatan/gangguan pendengaran (tunarungu) harus menyerahkan atau melampirkan hasil pemeriksaan dari dokter umum/dokter THT. Untuk peserta didik yang mempunyai hambatan atau gangguan kecerdasan (tunagrahita) harus menyerahkan hasil pemeriksaan IQ dari psikolog.

Model penerimaan calon peserta didik di sekolah inklusif bukan berdasarkan sistem tes yang menyeleksi para calon peserta didik. Istilah tes lebih tepat diganti dengan observasi. Observasi yang dilaksanakan ditujukan untuk mendapatkan data dan informasi awal mengenai calon siswa. Data dan info tersebut akan digunakan untuk menjadi landasan

rancangan rencana pembelajaran yang akan diberikan pada masing-masing peserta didik. Model penerimaan ini, akan memberi kesempatan bagi siapa saja untuk diterima di sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan komitmen sekolah inklusif, bahwa pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah reguler terdekat dengan teman seusianya.

Untuk dapat mengetahui data yang akurat, tentu panitia PPDB perlu memiliki kemampuan mengobservasi peserta didik. Kemampuan observasi ini selain akan membantu guru mengetahui latar belakang mereka, juga dapat melihat potensi sekaligus mendeteksi adanya kondisi khusus pada setiap siswa, baik di awal pendaftaran ataupun sepanjang proses pembelajaran. Kemampuan asesmen untuk guru, biasanya hanya pada jenis asesmen fungsional. Melalui model asesmen ini, akan diketahui sejauh mana kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam melakukan aktifitas tertentu, seperti kemampuan berbahasa seorang anak. Sedangkan, jenis asesmen klinis biasanya dilakukan oleh tenaga khusus yang profesional dan ahli di bidang tersebut, seperti psikolog, dokter anak, atau psikiater. Sebagai contoh, untuk mengetahui *treatment* apa yang harus dilakukan bagi anak yang terdeteksi autisme, maka dibutuhkan asesmen dari seorang psikolog klinis. Dokter dibutuhkan untuk menentukan jenis alat bantu dengar yang akan diberikan pada seorang anak yang terdiagnosa memiliki hambatan audio atau pendengaran.

B. Struktur Organisasi Sekolah Inklusif

Model pendidikan inklusi dapat berjalan optimal, jika organisasi sekolah memiliki badan khusus yang menangani hal yang berhubungan dengan inklusi. Hal ini dengan cara menambahkan divisi pendidikan khusus atau istilah lainnya yang serupa. Divisi ini minimal terdiri dari tiga unsur, yakni psikolog, guru Bimbingan Konseling (BK), dan Guru Pendamping Khusus (GPK). Keberadaan psikolog sekolah tidak harus *full time*, namun cukup secara berkala sesuai kebutuhan sekolah. Guru BK dan GPK dapat disesuaikan kebutuhan dan porsi jumlah siswa yang ada. Guru BK minimal 1 orang tiap sekolah. Guru GPK disesuaikan dengan jumlah ABK yang membutuhkan pendampingan khusus.

C. Sarana dan Prasarana



*Gambar 15.2 Sarana ruang kartasis.
Sumber: Sekolah Lentera Insan Depok.*

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan menjamin kelancaran program pendidikan. Sarana dan prasarana harus dapat diakses bagi semua peserta didik, khususnya peserta didik yang memiliki hambatan penglihatan, fisik, dan fungsi gerak, agar mewujudkan kemandirian bagi semua orang termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Aksesibilitas sangat penting guna memberikan kemudahan dalam beraktivitas, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan fasilitas umum seperti di sekolah, sehingga siswa berkebutuhan khusus dapat melakukan kegiatan/aktivitas dengan mudah, aman, dan mandiri.

Selain mengacu dengan standar sarana dan prasarana dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), berikut ialah kekhususan sarana dan prasarana sekolah inklusi yang perlu diperhatikan dan diupayakan ketersediannya.

1. Standar Jamban

Jamban khusus yang sesuai standar jamban bagi penyandang difabel.

2. Standar Ruang Layanan Inklusi

Disiapkan satu ruang khusus yang dapat melayani ABK, baik untuk kebutuhan konseling maupun terapi.

3. Jalur Jalan Difabel

Jalur difabel secara khusus diperuntukan ABK dengan kategori tunanetra dan pengguna kursi roda.

D. Media Belajar Khusus untuk Intervensi

Alat asesmen dan terapi sederhana disiapkan di ruang layanan inklusi yang akan digunakan psikolog, guru BK, atau GPK. Modifikasi sarana dan prasarana, khususnya yang spesifik dibutuhkan PDBK perlu diupayakan. Jika sebuah sekolah menerima PDBK dengan spesifikasi tunanetra, maka perlu adanya alat Braille. Bagi PDBK yang menggunakan kursi roda, maka desain sekolah harus disesuaikan dengan mereka, agar mereka dapat secara mandiri beraktivitas dengan mudah.

E. Tanda-tanda Khusus Sekolah di Lingkungan

Berikut ini adalah pengaturan kelas bagi pendidikan inklusif.

1. Faktor mobilitas (bergerak).
2. Peserta didik tunanetra duduk dekat papan tulis.
3. Peserta didik tunarungu duduk di baris depan, agar mudah membaca bibir guru.
4. Peserta didik tunadaksa duduk di baris pinggir dekat dengan pintu, agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat atau kursi roda.
5. Faktor dukungan teman sekelas, misalnya guru harus mendorong atau merangsang teman lain untuk mendukung peserta didik ABK di kelas tersebut agar aktif berpartisipasi di kelas.

Sedangkan, tata tertib siswa dibuat untuk menjadi acuan bagi seluruh peserta didik selama berada di sekolah dan mengikuti proses belajar mengajar (ramah bagi semua peserta) dan mempertimbangkan dengan kondisi siswa, misalnya hiperaktif, gangguan emosi, autisme, dan sebagainya.

F. Sumber Pendanaan

Sekolah inklusi membutuhkan pendanaan khusus untuk memenuhi kebutuhan standar lainnya. Beberapa sumber dana yang bisa didapatkan, yakni sebagai berikut.

1. Orang tua ABK dapat dimintai dana tambahan untuk layanan khusus anaknya, seperti pengadaan *shadow teacher*, asesmen, terapi di sekolah, dan lainnya.
2. Pemerintah menyediakan pos pendanaan untuk sekolah inklusi, seperti pelatihan guru, pengadaan media pembelajaran, bantuan langsung ABK untuk perlengkapan sekolah, dan lainnya.
3. Donatur yang berasal dari perseorangan maupun lembaga.

G. Strategi Pembiayaan

Sekolah swasta mempunyai kesempatan untuk mengambil dana dari para orang tua khususnya ABK. Namun demikian, diupayakan alternatif sumber pendanaan lainnya yang tidak membebani orang tua siswa, seperti berikut.

1. Menawarkan program orang tua asuh buat anak tidak mampu (untuk anak reguler dan ABK yang tidak mampu).
2. Merencanakan alokasi dan layanan pendidikan inklusi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
3. Mengalokasikan dana layanan pendidikan inklusif pada setiap sumber dana bantuan.
4. Menawarkan pendidikan inklusif pada setiap sumber dana (donatur).
5. Adanya komitmen pembayaran secara berkala antara orang tua dan sekolah.

6. Bekerja sama dengan lembaga yang menangani ABK untuk mendapatkan layanan secara cuma-cuma, seperti FORKASI (Forum Komunikasi Orang Tua Anak Spesial Indonesia).

H. Kerja Sama

Kerja sama dapat dijalin dalam rangka menyukseskan pelaksanaan model pendidikan inklusi, khususnya di sekolah swasta. Kerja sama yang utama adalah dengan pemerintah melalui dinas pendidikan setempat. Kerja sama dengan dinas pendidikan memperoleh manfaat berupa berbagai bantuan dan kordinasi termasuk pengawasan. Secara berkala Dinas Pendidikan Kota melakukan pengawasan, baik melalui laporan berkala yang diserahkan sekolah maupun pengawasan secara langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah binaan. Pengawasan yang dilakukan meliputi delapan standar nasional pendidikan yang disesuaikan dengan standar sekolah inklusif yang telah ditetapkan.

Direktorat terkait di pemerintahan yang dapat dilakukan kerja sama juga, yakni Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Pembinaan SLB, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kecamatan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Pusat Pengembangan Penataran Guru, dan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Selain itu, dapat dijalin pula kerja sama dengan lembaga lain sesuai arahan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, seperti:

1. puskesmas;
2. layanan tumbuh kembang;
3. NGO/LSM;
4. rumah sakit;
5. SLB;
6. perguruan tinggi.

Perguruan tinggi khususnya yang memiliki program yang relevan dengan jenis kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan serta

dikembangkan, meliputi empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogis, professional, kepribadian, dan sosial serta kemampuan khusus yang berkenaan dengan pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenis kebutuhan satuan pendidikan penyelenggara.



*Teruslah belajar untuk tetap bisa
optimal mengajar.*

BAB 16

Filsafat *School Well-Being*



*Gambar 16.1 Gedung SMAIT Cahaya Bangsa Lombok.
Sumber: Dokumen SMAIT Cahaya Bangsa Lombok.*

Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, tidak selalu sekolah. Rumah adalah yang utama dan pertama, utama karena orang tua lah yang kelak akan ditanya dan pertama karena sejak di janin hingga awal kehidupan bersua dengan segenap keluarga. Semua anggota rumah berpeluang melakukan pendidikan bagi anggota barunya. Sejatinya, pendidikan dimaknai sebagai upaya memunculkan potensi yang telah ada di masing-masing individu yang belum tergal. Melalui pendidikan itulah, potensi akan terlihat, dan selanjutnya diberdayakan secara optimal dan menyeluruh agar memberi kebermanfaatn bagi dirinya maupun orang lain di sekitarnya dalam rangka ketakwaan pada Tuhannya. Saat di rumah, anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Ketika di sekolah, ia mengikuti apa yang diajarkan gurunya bahkan teman sebaya. Waktu berpergian, anak belajar dari perilaku orang yang dilihatnya. Di mana pun ia berada, banyak hal yang akan mempengaruhi perkembangan dirinya. Indahnnya, jika setiap sudut tempat dan waktu terdapat pelajaran kebaikan yang dapat dipetik. Bahagianya, jika disadari bahwa setiap insan adalah pendidik. Titisan mandat dari Allah Sang Pendidik Semesta Alam, *Allah Rabbul 'ālamīn*. Hakikatnya, siapa saja mempunyai tugas mendidik, mendidik dirinya, anaknya, keluarganya, dan juga masyarakat di sekelilingnya. Jika demikian terjalankan, maka wacana akan melahirkan realita, dan tentu tidak akan lagi ditemui manusia tidak terdidik di negeri ini. Mari wujudkan mimpi!



Gambar 16.2 Komunikasi guru dan orang tua wali murid.
Sumber: SIT Sekolah Alam Palangkaraya.

Dalam menciptakan *school well-being*, diperlukan sebuah sistem layanan pendidikan di sekolah yang tidak hanya mengandalkan layanan pembelajaran

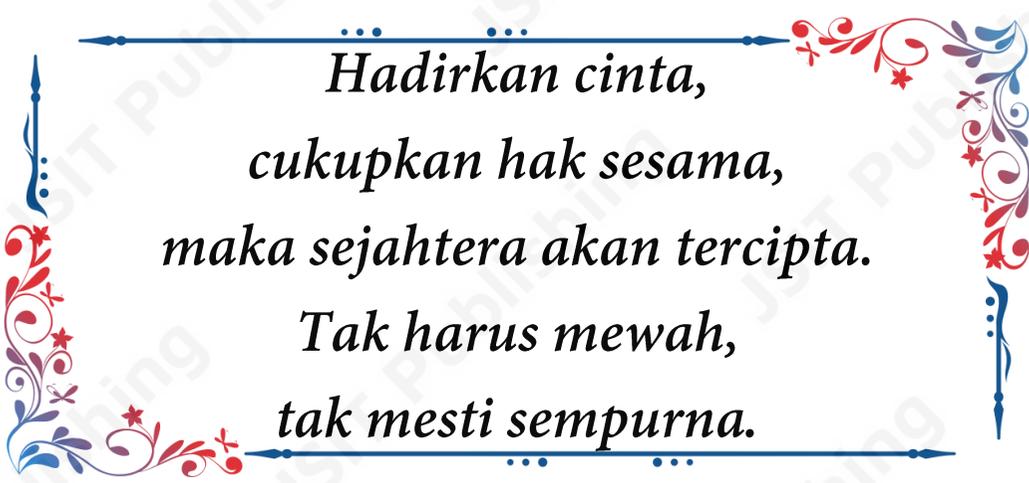
akademik, seperti matematika, bahasa, dan mata pelajaran lainnya. Namun, diperlukan juga layanan khusus yang bersifat psiko-edukatif melalui layanan bimbingan dan konseling. Konsep *school well-being* mensyaratkan empat komponen sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu *having, loving, being, dan health*. Jika komponen-komponen tersebut tidak ada di sekolah, dapat menyebabkan peserta didik tidak nyaman selama di sekolah, yang pada akhirnya bisa menimbulkan gangguan perilaku. *School well-being* merupakan sebuah model yang berdasar konsep *well-being* itu sendiri, berasal dari khazanah tradisi sosiologi. Allardt mendefinisikan *well-being* sebagai sebuah keadaan yang memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan dasar memiliki empat kategori, yakni *having, loving, being, dan health*.

Konsep *well-being* dapat dilihat dari dua indikator, yakni indikator objektif dan indikator subjektif. Indikator objektif didasarkan pada observasi eksternal, dan indikator subjektif didasarkan pada ekspresi orang terhadap sikap mereka dan persepsi mereka terhadap kondisi lingkungannya. Menurut Papalia dkk (2007), peserta didik yang menyukai sekolahnya akan cenderung melakukan kegiatan akademis dengan lebih baik. Namun, jika peserta didik tidak merasakan kepuasan pada sekolahnya, maka akan berdampak negatif pada prestasi dan perilaku buruk di sekolah. Karenanya, peserta didik membutuhkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki konsep *school well-being* yang baik.



Gambar 16.3 Suasana sekolah yang nyaman.
Sumber: liputan6.com

Dalam menciptakan *school well-being* diperlukan peran pimpinan sekolah membangun sistem manajemen yang mendukung, mulai dari sumber daya manusia, fasilitas, hingga atmosfer sekolah. Kenyamanan dan kesehatan mental peserta didik di sekolah dapat dioptimalkan, jika adanya dukungan eksternal, yaitu suasana sekolah, hubungan sosial di sekolah, kesempatan aktualisasi diri, dan layanan kesehatan. Suasana sekolah bisa mempengaruhi perkembangan peserta didik, antara lain pada aspek identitas diri, keyakinan akan kemampuan diri, gambaran mengenai kehidupan, hubungan antar pribadi, batasan norma antara yang baik dan buruk, serta konsep sistem sosial. *School well-being* merupakan keadaan sekolah yang memungkinkan individu memuaskan kebutuhan dasarnya, yang meliputi *having*, *loving*, *being*, dan *health*. *Having* merupakan kondisi sekolah, *loving* adalah bagaimana hubungan sosial siswa di sekolah, *being* bagaimana peluang pengembangan diri siswa, dan *health* adalah status kesehatan siswa. Alhasil, siswa yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan rentan menimbulkan masalah dan melakukan perilaku-perilaku menyimpang. Namun, jika manajemen sekolah diperbaiki dan peran guru dioptimalkan, maka permasalahan terkait gangguan psikologis anggota sekolah dapat meminimalkan bahkan dapat dicegah.



*Hadirkan cinta,
cukupkan hak sesama,
maka sejahtera akan tercipta.
Tak harus mewah,
tak mesti sempurna.*

BAB 17

Sinergi Orang Tua Membangun Sekolah Fitrah



Gambar 17.1 Orang tua berperan penting dalam pendidikan anaknya.
Sumber: Dokumen penerbit.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيَنْصَرَانِهِ وَيَمَجْسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولَا أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَقْرَعُوا إِنْ شِئْتُمْ (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ) الْآيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَاءَ (رواه مسلم ٤٨٠٣)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, ‘Rasulullah saw. telah bersabda, ‘Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi-sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat?’ Lalu Abu Hurairah berkata, ‘Apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, ‘... Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah,’ (Q.S. ar-Rum: 30). Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Alaa, Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami ‘Abd bin Humaid, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdurazzaq, keduanya dari Ma‘mar dari Az Zuhri dengan sanad ini dan dia berkata, ‘Sebagaimana hewan ternak melahirkan anaknya. -tanpa menyebutkan cacat.’” (H.R. Muslim no. 4803)

Setiap anak terlahir fitrah. Inilah salah satu bukti kemahaadilan Allah Swt.. Bayangkan, jika seorang bayi lahir ke bumi bukan atas kemauannya sendiri dan kuasanya menunjuk orang tua mana yang ia pilih, lalu ia divonis dan tidak baik, karena ia dilahirkan dari orang tua kafir atau yang bermaksiat. Mari kita lihat asal mula mengapa hadis di atas diucapkan Rasulullah saw.!

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيحٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةَ يَوْمِ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الدَّرِيَّةِ فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى قَتْلِ الدَّرِيَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوْهَلُ خِيَارِكُمْ إِلَّا أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهَا لِسَانُهَا (رواه أحمد)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami (Yunus) telah menceritakan kepada kami (Aban) dari (Qatadah) dari (Al-Hasan) dari (Al-Aswad bin Sari'), Rasulullah saw. mengutus sebuah satuan perang pada Perang Hunain, lalu mereka memerangi orang-orang musyrik dan mereka berlebihan dalam membunuh sampai kepada para wanita dan anak-anak. Tatkala mereka datang, Rasulullah saw. bersabda. 'Apa yang membuat kalian membunuh kaum wanita dan anak-anak?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, mereka hanyalah anak-anak orang-orang musyrik.' Rasulullah saw. bersabda, 'Bukankah orang-orang pilihan kalian sebenarnya juga anak-anak orang musyrik?' Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya tidaklah setiap ruh yang dilahirkan kecuali di atas fitrah Islam, sehingga lidahnya yang mengikrarkannya." (H.R. Ahmad)

Betapa indahnya Islam. Pada tiap-tiap jiwa yang diberi kesempatan hidup di dunia, dibekali kefitrahan dalam dirinya. Fitrah inilah yang menjadi modalitas setiap manusia untuk bertauhid. Fitrah ini pula yang akan membimbingnya memilih-milah yang hanif. Tugas orang tua menjaga fitrah ini. Jika fitrah tidak terjaga dengan baik, maka seorang anak kehilangan fitrahnya.

Ilustrasi Yahudi, Nasrani, dan Majusi merepresentasikan tiga agama yang dianut sebagian besar manusia pada zaman dahulu. Tiga agama pada zaman sebelum Islam. Yahudi dan Nasrani merupakan agama samawi, yang kitab sucinya mengalami perubahan oleh tangan manusia. Majusi yang menyembah api, menggambarkan kaum yang mengambil makhluk lainnya sebagai

sesembahan. Demikianlah perumpaan anak-anak manusia, fitrahnya ialah hanif yang menyembah hanya kepada Penciptanya. Senantiasa berupaya melaksanakna perintah-Nya dan membekali diri dengan ilmu sebelum amal, sehingga fitrah itu terjaga. Namun, jika orang tua dan lingkungannya lalai dalam penjagaan fitrah mereka, maka akan masuklah mereka dalam satu di antara tiga golongan tersebut.

Fitrah itu tidak sama dengan secarik kertas kosong dan putih yang belum terisi. Teori empirisme menyatakan, bahwa lingkunganlah satu-satunya yang berperan menorehkan tinta pada jiwa-jiwa anak manusa. Fitrah itu merupakan hadiah suci yang dianugrahi Pencipta sejak anak terlahir. Kebalikannya, teori nativisme lebih menekankan pada faktor bawaan yang dominan mempengaruhi hidup seseorang. Sungguh kasihan, para bayi yang terlahir dari orang tua yang kurang baik, dan dipastikan mereka akan meniru profil orang tuanya. Syukurlah, kemahaadilan Pencipta memberikan fitrah pada tiap-tiap jiwa.

Sekilas, teori konvergensi yang lebih dekat dengan hadis di atas. Fitrah menjadi modalitas manusia untuk tumbuh dan berkembang dengan baik sebagai faktor internal. Sebagai makhluk yang hidup dalam kehidupan sosial, faktor eksternal akan memberi kontribusi terhadap terjaganya atau tidaknya fitrah yang telah ada tersebut. Kedua faktor itu saling terkait. Namun, secara prinsip ada perbedaan antara teori konvergensi tersebut dengan konsep pendidikan Islam, khususnya ditilik dari hadis di atas. Terdapat satu faktor lain yang tidak tersebut di dalamnya. Faktor yang paling mendonimasi dua faktor, yakni bawaan dan lingkungan. Faktor kehendak Sang Pencipta yang pada akhirnya menentukan apakah fitrah ini akan mampu bertahan pada kesuciannya dalam lingkaran lingkungan buruk sekalipun.

Mari kita cermati kembali! Pada hadis tersebut ditegaskan, bahwa setiap anak terlahir fitrah, suci, dan mengantongi potensi baik. Namun, ia akan berubah menjadi tidak baik, karena orang tua dan lingkungan yang membentuknya. Penekanan yang tampak, peran orang tua dalam mempengaruhi perubahan negatif anak, tidak disebutkan peran orang tua dalam membentuk kesalehan anak. Dengan kata lain, kebaikan yang ada pada diri manusia itu merupakan hadiah dari Allah, bukan rekayasa manusia, termasuk orang tuanya. Jadi, tidak cukup alasan bagi orang tua untuk bertepuk

dada dan berbangga, jika anaknya berhasil dengan sederet prestasi gemilang dan predikat kesalehan, seperti *al-hafizh*, *al-ustadz*, *'ulama*, atau gelar lainnya. Semua itu semata kemurahan Allah *ar-Rahman ar-Rahīm*.

Dalam kajian pendidikan Islam, kata fitrah dimaknai dengan potensi. Potensi adalah kekuatan manusia yang masih tersembunyi dalam dirinya. Potensi akan berubah menjadi kemampuan, jika ia telah muncul. Tugas para pendidik, orang tua, dan guru adalah memfasilitasi agar potensi pada diri anak tergali dan tumbuh berkembang. Berbagai potensi yang ada pada seorang anak, di antaranya potensi spiritual, potensi fisik, potensi intelektual, dan potensi sosial emosi.

Membangun sekolah fitrah bermakna membangun tempat belajar anak-anak yang sesuai dengan fitrahnya. Mulai dari rancangan kurikulum yang berbasis ketuhanan, kualifikasi pendidik yang mumpuni, dan memiliki kekuatan *ruhiyah*, memilih pendekatan pembelajaran yang sesuai, menyiapkan sarana dan prasarana belajar yang ramah dan natural, model penanganan anak yang tepat, melakukan asesmen yang adil dan manfaat, dan yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan para pendidik yang memiliki kapasitas mumpuni serta kekuatan *ruhiyah* yang baik.

*Pada bayi-bayi yang datang
fitriah iman telah terpancang. Potensi telah
dihadiahkan. Semua lahir sebagai
pemenang. Hanya butuh pendidikan agar
Tuhan membalasnya dengan ketakwaan.*

BAB 18

Kajian Fikih

Difabel, Apa Kata
Ulama?



Gambar 18.1 Fikih difabel.
Sumber: Dokumen penerbit.

Sesuatu diciptakan oleh-Nya selalu memiliki maksud dan tujuan, tidak mungkin tanpa keduanya. Tentu sarat akan hikmah, kala tiap jiwa memiliki kemampuan yang berbeda. Masih ingat tentang kisah lima jari manusia? Betapa bangga seseorang, jika diberi jari jempol sebagai simbol hebat. Namun, apakah mau, jika ia ditawarkan jarinya jempol semua? Kenapa tidak? Bukankah makin hebat?



Gambar 18.2 Jari jemari.
Sumber: bernas.id

Sungguh, dalam penciptaan jari jemari ini terdapat pelajaran yang begitu berharga. Perbedaan masing-masing jari, membuat si empunya mampu melakukan banyak hal bernilai. Betapa beratnya jempol tanpa si telunjuk, saat ia harus menggores pena. Tidak mudah melakukan sunah menyuap makanan dengan tiga jari tanpa jari tengah. Mereka berbeda tetapi memiliki makna. Karenanya, tidak perlu ada yang dilebih-lebihkan atau sebaliknya diabaikan.

Dalam Islam, setiap makhluk yang diciptakan tidak dengan sia-sia (Q.S. Ali 'Imran: 91). Tiap jiwa terlahir dalam kondisi fitrah. Manusia ialah sebaik-baik penciptaan Sang Maha Pencipta (Q.S. at-Tin: 4). Tiap insan dicipta berbeda (Q.S. al-Baqarah: 286). Keberbedaan yang terkadang dilihat, sejatinya bagian dari semangat untuk ketersalingan. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan bahwa difabel tidak menanggung

kehidupannya sendiri, juga bukan hanya keluarganya, namun masyarakat secara luas turut bersama-sama membantu terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Istilah konstruksi sosial politik bagi keberadaan difabel dibahas para ulama dalam buku “Fikih Penyandang Disabilitas.” Dalam bab ini akan menyarikan kajian buku tersebut sebagai pelengkap pembahasan tentang pengelolaan pendidikan inklusi, khususnya di sekolah Islam.

A. Berbagai Tantangan bagi Difabel

Di bawah ini merupakan berbagai tantangan bagi difabel.

1. Cara Pandang Orang terhadap Difabel

Ada dua cara pandang dominan yang berkembang secara umum, yakni cara pandang mistis dan naif. Cara pandang mistis, menganggap ini takdir Tuhan yang harus diterima apa adanya, bersabar dan berdoa, tidak boleh menolak, namun juga tak melakukan ikhtiar dan mencari hikmah di baliknya. Masyarakat dengan pandangan ini hanya akan pasrah, berdiam diri, dan meminta sekelilingnya untuk memahami dan mengasihani. Sedangkan, cara pandang naif bertolak belakang, meyakini hal ini merupakan masalah keduniaan belaka. Di mana hal tersebut bisa disebabkan penyakit, kecelakaan, keturunan, dan lainnya. Fenomena manusiawi yang harus disikapi dengan mencari tahu penyebab, lalu mengatasinya dengan pengobatan, terapi, atau pendidikan khusus, agar ia tetap dapat hidup sebagaimana manusia lain pada umumnya. Kedua cara pandang ini harus dijumpatani dengan cara pandang kritis, bahwa fenomena difabel adalah konstruksi sosial-politik. Menerima keberbedaan sebagai takdir, dengan berikhtiar berbagai cara untuk mencari potensi yang ada dengan didukung semua elemen untuk saling bantu-membantu. *Ta’awanu ‘alal birri wattaqwa.*

2. Sikap dan Perlakuan

Masih ada saja masyarakat yang menganggap keterbatasan yang ada pada diri seseorang sebagai aib, atau bahkan buah dari dosa yang telah dilakukan orang tua si anak atau semacam kutukan. Orang enggan untuk mendekati. Hal ini membuat orang tua atau anak itu

sendiri malu dan menahan diri untuk bersosialisasi. Sisi lain difabel dianggap manusia lemah tidak berdaya, dan tidak bisa produktif, sehingga membuat kondisi diskriminatif yang dialami para difabel.

3. Keterbatasan Layanan Publik yang Ramah Difabel

Jika di negara maju, layanan publik bagi difabel sudah lebih baik. Namun, hal tersebut tidak untuk di tanah air, yang kondisinya masih sangat minim. Penyandang tunanetra belum aman berjalan di jalan raya tanpa pendamping, karena belum ada jalur khusus yang tidak terputus. Mobilitas pengguna kursi roda masih terbatas. Untuk bisa menikmati transportasi umum pun masih jauh dari harapan. Termasuk layanan pendidikan formal maupun nonformal bagi ABK, masih belum sebanding dengan jumlah ABK yang semakin meningkat.

4. Keterbatasan Peluang Kerja

Penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan baik di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Orang 'normal' lebih menjadi pilihan dibandingkan disabilitas. Kebijakan pemerintah dibutuhkan, agar memberi ruang bagi para disabilitas untuk mampu mengoptimalkan potensinya dan penyediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan potensi tersebut.

5. Hambatan Pelaksaaan Kewajiban Agama

Mulai dari sulitnya akses mendapatkan pengetahuan agama bagi ABK (kini sudah jauh lebih baik di era digital), tempat kajian yang sulit dijangkau, fasilitas masjid yang belum ramah disabilitas, seperti jalan menuju masjid, toilet, dan tempat wudu. Dai dan ustaz yang membantu memahami agama bagi mereka pun masih minim pemahaman tentang disabilitas, sehingga acap kali belum mampu berempati dengan jamaah khususnya.

B. Pandangan Islam Mengenai Difabel

Di bawah ini adalah pandangan Islam mengenai difabel.

1. Posisi Manusia sebagai Makhluk

Pada dasarnya, manusia dicipta *fī aḥsani taqwīm*, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ia mempunyai misi di dunia sebagai *khalifah fil*

ard. Namun, setiap manusia tercipta berbeda satu dengan lainnya. Dalam literatur fikih, terdapat beberapa istilah untuk ragam disabilitas, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqṭa'* (difabel daksa tangan). Terkait kisah tentang para penyandang disabilitas yang tersebut di beberapa kitab hadis, menunjukkan mereka mendapat kemuliaan yang sama, tidak ada diskriminasi, bahkan sebagian mereka dengan potensi yang ada menjadi para ulama dan cendikia di zamannya.

2. Cakap Hukum dan Cakap Bertindak

Istilah *ahliyyah al-wujub* (cakap hukum) dan *ahliyyah al-ada'* (cakap bertindak) dikenal dalam *ushul fiqh*. *Ahliyyah al-wujub* pada hakikatnya dimiliki setiap manusia, apakah ia memiliki keterbatasan fisik atau bahkan masalah kejiwaan. Tiap insan mempunyai hak yang sama, misalnya terkait warisan. Namun, dalam konteks *ahliyyah al-ada'* disebutkan tidak semua memiliki kemampuan bertindak. Seorang ABK yang memiliki masalah psikologis atau kejiwaan yang berat dan terus menerus, ia tidak dikenakan beban syariat, karena tidak termasuk mukalaf (orang dewasa yang berakal sehingga layak menerima beban syariat). Sedangkan, ABK yang secara kejiwaan tidak terganggu, hanya secara fisik memiliki keterbatasan, maka secara syariat berlaku sama kewajibannya dengan muslim yang telah balig.

3. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Tidak ada hak tanpa penunaian kewajiban dan sebaliknya. Dalam Islam konsep hak dibagi dua, yakni hak Allah Swt. atas manusia (*Haqq Allah*) dan hak manusia atas Allah Swt. (*Haqq al-'Ibād*). Perhatikan sabda Rasulullah berikut!

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: (يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: (حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ

يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا
يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)

Artinya:

“Dari Mu’adz bin Jabal r.a., beliau berkata, ‘Saya pernah dibonceng oleh Nabi saw. di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, ‘Wahai Mu’adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apa hak para hamba atas Allah?’ Saya menjawab, ‘Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui.’ Beliau pun menjawab, ‘Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya, sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepada-Nya.’....” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan, hak manusia atas tanggung jawab sesama dibagi dalam lima kategori, yakni sebagai berikut.

- a. Hak individu terhadap tanggung jawab dirinya sendiri.
- b. Hak individu terhadap tanggung jawab individu lain.
- c. Hak individu atas tanggung jawab masyarakat.
- d. Hak masyarakat atas tanggung jawab individu.
- e. Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat lain.

Dari kelima hak tersebut dibagi lagi menjadi tiga tingkatan berikut.

- a. Hak yang bersifat primer/dasar (*ḍaruri*)
Ḍaruri atau darurat adalah hak yang harus dan mutlak dipenuhi, karena jika tidak akan menimbulkan bahaya dan binasa.
- b. Hak yang bersifat sekunder (*ḥajiyyi*)
Hak *ḥajiyyi* walau tidak sampai fatal jika tidak terpenuhi, namun penting akan menimbulkan kesengsaraan.
- c. Hak yang bersifat tersier (*takmili*)
Hak *takmili* akan membuat kurang sempurna, jika tidak ditunaikan.

4. Kewajiban Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Dalam Islam, berbagai hak yang ada pada individu merupakan tanggung jawabnya sendiri. Namun, jika ia tidak mampu memenuhi,

maka menjadi tanggung jawab keluarga. Jika keluarga tidak mampu membantu, maka menjadi tanggung jawab masyarakat. Ketika masyarakat belum sanggup mendukung, maka pemerintah yang berkuasa, ketika itulah yang wajib menanggung tanggung jawab membantu individu tadi sebagai rakyatnya. Bagi penyandang disabilitas, hak beragama dan menunaikan berbagai kewajiban merupakan hal yang sama dengan masyarakat lain. Ketika ia tidak mampu menunaikannya karena keterbatasan yang ada, maka pemerintah wajib membantu sebisa mungkin. Hal tersebut bukan hanya dengan kebijakan, namun dengan berbagai fasilitas yang membantunya beragama dan beribadah.

5. **Keharaman Stigma dan Diskriminasi**

Berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis terkait keberadaan penyandang disabilitas juga telah dikemukakan di bab sebelumnya. Intinya, stigma tentang disabilitas adalah cacat akibat kutukan, dosa, dan hal senada lainnya tidak dibenarkan dalam Islam. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di mata Allah sebagai manusia. Makhluq Allah Swt. yang dicipta sempurna, sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap mereka.

6. **Prinsip-prinsip Kemudahan dalam Islam**

Allah Swt. berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 185 berikut.

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Artinya:

"... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"

Allah Swt. tidak ingin menyusahkan hamba-Nya. Berbagai kemudahan (*tasyir*) diberikan bagi mereka yang memang memiliki keterbatasan. Kemudahan ini bukan tanpa tujuan. Kemudahan diberikan agar manusia dapat menjalankan agamanya, termotivasi untuk senantiasa semangat dan rajin beribadah. Terlebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan untuk bisa beribadah sebagaimana muslim lain. Terdapat riwayat tentang penyandang disabilitas yang memiliki keinginan untuk bergabung jihad, namun tidak memungkinkan

tersebab keterbatasan fisiknya. Meskipun mereka tidak ikut, Allah tetap memuji mereka (Q.S. al-Afath: 17).

Demikianlah hal-hal yang terkait dengan difabel. Perlunya pendekatan fikih bagi penyandang disabilitas sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi mereka. Fikih dapat merambah pada masalah penyandang disabilitas untuk menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan disabilitas dalam pandangan dan pemahaman ajaran Islam yang diperoleh dari teks Al-Qur'an dan hadis. Tentunya, fikih dalam hal ini bukan sekumpulan ketentuan hukum (legal-formal), melainkan juga kerangka etika moral sosial yang sangat penting untuk memandu kehidupan manusia yang adil, maslahat, manusiawi, dan bijaksana untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fikih sangat mampu mendukung semua strategi mencari solusi masalah hukum keagamaan penyandang disabilitas, karena hakikat fikih yang selalu memperhatikan dasar-dasar kebaikan (kemaslahatan) dan meminimalkan segi risiko keburukan (mafsadah) yang mungkin timbul.

7. Masalah Difabel dalam Fikih

Allah Swt. berfirman yang artinya, *“Tidak ada halangan bagi orang buta (penyandang disabilitas netra), tidak (pula) bagi orang pincang (penyandang disabilitas daksa), tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumahmu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya, atau di rumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini), hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat dan kebaikan. Demikianlah Allah menjelaskan*

ayat-ayatnya(Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.” (Q.S. an-Nūr: 61)

Ayat di atas secara eksplisit memberi penegasan, bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, serta tanpa stigma negatif dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syaikh Ali As-Sabuni dalam “Tafsīr Āyāt al-Ahkām” berikut.

Substansi firman Allah Swt. dalam surat an-Nūr ayat 61 adalah, bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa, dan orang sakit) untuk makan bersama nondisabilitas, sebab Allah Swt. membenci kesombongan dan orang-orang sombong. Allah menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.

Masalah disabilitas dalam fikih yang dikaji dalam buku ini, meliputi berikut.

- a. Pandangan fikih terhadap ibadah penyandang disabilitas.
- b. *Istinja’* yang tak sempurna dari penyandang disabilitas.
- c. Cara bersuci bagi penyandang disabilitas netra.
- d. Hukum kesucian roda kursi roda dan tongkat.
- e. Hukum membawa kursi roda, tongkat, dan protese yang kotor ke dalam masjid.
- f. Salat menggunakan kursi roda atau tongkat najis.
- g. Keringanan hukum kesucian bagi penyandang disabilitas daksa yang bergerak dengan menyeret badan.
- h. Hukum wudu bagi penyandang disabilitas daksa dan pengetahuan gerakan imam bagi disabilitas runtu dan netra.
- i. Kewajiban salat bagi penyandang disabilitas netra sekaligus disabilitas runtu.
- j. Disabilitas netra dalam memperkirakan waktu salat.
- k. Disabilitas netra dalam penentuan kiblat.
- l. Hukum menjadi imam salat bagi disabilitas runtu dan grahita.
- m. Kewajiban Salat Jumat bagi penyandang disabilitas netra.

- n. Kewajiban Salat Jumat bagi penyandang disabilitas rungu.
- o. Penerjemah bahasa isyarat dan *running text* khotbah Jumat.
- p. Hukum menjadi penerjemah bahasa isyarat ketika khotbah Jumat.
- q. Syahadat orang disabilitas wicara.
- r. Salat dengan kateter.
- s. Azan dan imam salat penyandang disabilitas netra.
- t. Fadilat salat jamaah bagi penyandang disabilitas rungu dan netra.
- u. Menjamak salat dengan alasan aksesibilitas.
- v. Membantu penyandang disabilitas dengan pertimbangan kemahraman dan etika islam.
- w. Hukum melecehkan penyandang disabilitas dengan perlakuan tidak manusiawi.
- x. Hukum anjing penuntun (*guiding dog*) bagi penyandang disabilitas netra di tempat ibadah.

8. Hak Pendidikan bagi Penyandang Difabel

Pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang wajib dijamin oleh pemerintah. Islam pun mewajibkan semua umatnya untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai landasan atau dasar dalam hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara tak terkecuali, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 10 terkait pendidikan bagi ABK.

9. Kebijakan Lembaga Pendidikan atau Majelis Taklim

Jika lembaga pendidikan dan/atau majelis secara jelas membuat kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka lembaga dan majelis tersebut wajib menyediakan fasilitator. Namun, jika lembaga pendidikan dan/atau majelis itu tidak mengkhususkan kebijakan menerima penyandang disabilitas, maka tidak diwajibkan menyediakan fasilitator.

10. Pemberian Edukasi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah dan ormas-ormas Islam, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya diharapkan mensosialisasikan kesadaran tentang disabilitas. Masyarakat harus diberi edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas di lembaga-lembaga pendidikan termasuk

pesantren, agar mereka mempunyai sensitivitas yang lebih baik terhadap mereka.

Pemberian edukasi tentang hak-hak penyandang disabilitas ini dianggap penting, karena dalam Islam disabilitas tidak dipandang sebagai cela. Selain itu, Islam memandang orang-orang disabilitas dan nondisabilitas memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan kewajiban.

11. Hukum Memberikan Bahan Ujian Sekolah yang Tidak Aksesibel

Tidak boleh hukumnya guru membuat ujian sekolah yang tidak kompatibel dengan penyandang disabilitas. Misalnya, membuat ujian *listening* (mendengarkan) bagi siswa dengan disabilitas rungu.

12. Tanggung Jawab Negara terhadap Pendidikan Penyandang Disabilitas

Negara bertanggung jawab terhadap pendidikan, terutama pendidikan agama bagi penyandang disabilitas. Apabila negara belum siap atau tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka pihak yang harus bertanggung jawab terhadap disabilitas adalah individu atau pihak-pihak terkait yang memahami masalah disabilitas itu.

Dalam literatur Islam hal ini diatur dalam konsep masalah dan mafsadah yang diketahui oleh sebagian orang. Siapa yang mengetahuinya, maka wajib memperjuangkan masalah itu dan menghindarkan orang dari mafsadah tertentu.

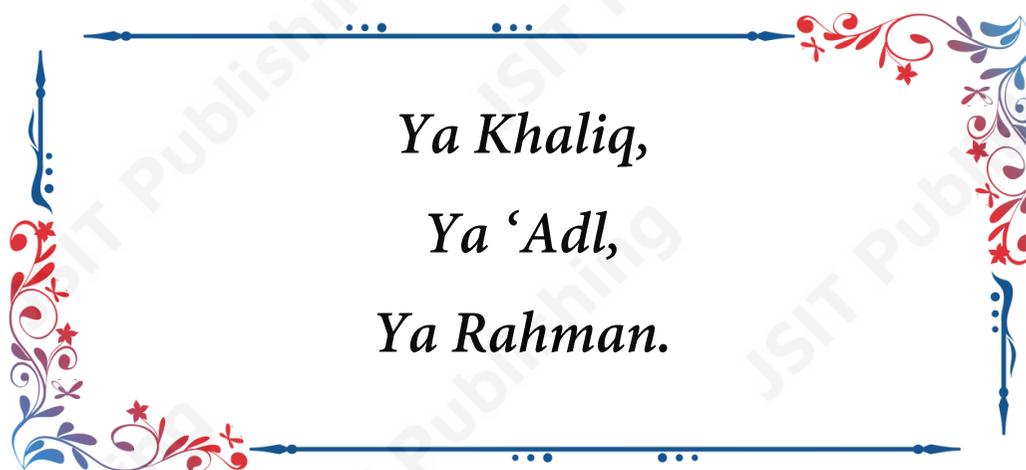
13. Mengapa Fikih Disabilitas?

Setiap insan memiliki hak hidup yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagai berikut.

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.

- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Sebagai warga negara penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama dengan warga lainnya. Namun, undang-undang ini belum diterapkan dengan optimal. Realitanya, penyandang disabilitas masih menemui berbagai hambatan untuk dapat hidup dengan lebih baik. Dalam kehidupan beragama tak terkecuali, tantangan banyak yang ditemui. Untuk itulah, perlu fikih disabilitas ini dikaji oleh para ulama, agar menjadi pijakan teologis sekaligus panduan bagi masyarakat khususnya ABK itu sendiri. Mari mempelajari berbagai buku yang terkait pendidikan inklusi dari perspektif Islam!



Daftar Pustaka

- Acedo, Clementina and Leane Duncombe. 2011. *Open File Inclusive Education*. Paris: International Bureau of Education.
- Achyar. 2018. *Permasalahan Pendidikan Inklusif di Indonesia*.
- Adebayo, A. S., & Ngwenya, K. 2015. *Challenges in the Implementation of Inclusive Education At Elulakeni Cluster Primary Schools in Shiselweni District of Swaziland*. European Scientific Journal.
- Agustyawati & Solicha. 2009. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Universitas Islam Negeri.
- Ahuja, Gayatri (ed). *Curriculum Acomodation and Adaptation. Block III. Advanced Certificate Course in Inclusive Education (Cross Disability)*.
- Aljauzi, Ibnu Qayyim. 2007. *Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud*. Jakarta: Pustaka Akautsar.
- Allen, K. Eileen and Schwartz, Ilene. S. 1996. *The exceptional Child Inclusion in Early Childhood Education*. New York: Delmar Publisher.
- Alur, Mithu and Evans, Jennifer. 2010. *Early in Inclusive Education in Mumbai: Guidelines for the Manuals*, UNICEF.
- Anafiah, S., & Andini, D. W. 2018. *Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Tumbuh 2 Yogyakarta*. Wacana Akademika: Majalah Ilmiah Kependidikan, 2(1), 73–84.
- Braaten, Felopulos. 2014. *Straight Talk Psychological Testing For Kids*. New York: Guilford Press.
- Bryson, John M. 2004. *Strategic Planning for Public & Non Profit Organizations*. San Fransisco: John Wiley & Sons.
- Bubpha, S., Erawan, P., & Saihong, P. 2012. *Model Development for Inclusive Education Management: Practical Guidelines for Inclusive Schools*. Journal of Education and Practice, 3(8), 223–233.
- Bustari, Meilina. 2005. *Manajemen Peserta Didik*. Yogyakarta: FIP-UNY.
- Cresswell, Jhon W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design*. California: SAGE Publications.
- Daft, Richard L. 2009. *New Era of Management*. Boston: CENGAGE Learning.
- Delors, Jacques. 1996. *Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century*. Paris: Unesco Publishing.
- Delors, Jacques. 1998. *Learning: The Treasure Within: Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-First Century*. Paris: Unesco Publishing.
- Delphie, Bandi. *Pembelajaran Anak Tuna Grahita: Suatu Pengantar dalam Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Denzin, Norman K and Lincoln, Yvonna S. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. California: SAGE Publications.
- Desiningrum, Dini R. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Psikosain.
- Efendi, Muhammad. 2009. *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Erwin, E. J., & Guintini, M. (2000). *Inclusion and classroom membership in early childhood*. International Journal of Disability, Development and Education 47, 237-257.
- Farisia, Hernik. (2017). *Strategi Optimalisasi Kemampuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Melalui Program Pembelajaran Individual (PPI)*. Jurnal Program Studi PGRA, 3 (2) , 1-17.
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. 2003. *Educational Research: An Introduction* (7th ed.). Boston, MA: A & B Publications

- Gargiulo Richard and Kilgo, Jennifer. 2005. *Young Children with Special Needs*. Belmont: Delmar Cengage Learning.
- Greenspan, Wieder dan Simons. 2006. *The Children wit Special Needs. Mendorong Pembentukan Intelektual dan Emosional*. Jakarta: Yayasan Ayo Main.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia & Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Hikmat. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hindle, D, et. al. 2009. *Education White Paper 6, Special Needs Education*. Department Basic Education Of South Africa.
- Ishartiwi. (2007). *Model Pembelajaran Terindividualisasikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Makalah. Disajikan dalam Pendidikan dan Pelatihan Model Pengembangan Pembelajaran bagi Guru SLB/SDLB se-Provinsi D.I Yogyakarta, di SLB Negeri pembina, tanggal 3-8 September 2007.
- Jalanidhi, Dayinta Galih. (2017). *Identifikasi Hambatan-hambatan Guru dalam Pembelajaran di Sekolah Inklusif SD Negri 2 Petir Piyungan Bantul*. Jurnal Widia Ortodidaktika, 6(8), 823-833.
- Kartika, Aniva. Suminar, Dewi. dkk. (2018). *Individual Education Program Paper Work: Narrative Review*. International of Engineering and Technology, 7(2.29), 682-687.
- Kelly, A., Devitt, C., O'Keeffe, D., & Donovan, A. M. 2014. *Challenges in Implementing Inclusive Education in Ireland: Principal's Views of The Reasons Students Aged 12+ Are Seeking Enrollment to Special Schools*. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 11(1), 68-81.
- Kemendikbud. 2015. *Buku Khusus Mengenal Perbedaan*.
- Kemendikbud. 2015. *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusi*.
- Khoeriah, Dede. (2017). *Individualized Education Program dalam Implementasi Pendidikan Inklusif*. Inclusive Journal of Special Education, 3(01), 41-49.
- Kumara, dkk . 2014. *Kesulitan Berbahasa pada Anak. Deteksi Dini dan Penanganan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawati, F., Minnaert, A., Mangunsong, F., & Wondimu, A. 2012. *Inclusive Education in Jakarta, Indonesia*. Paper presented at International Conference on Education and Educational Psychology: Social & Behavioural Sciences 69, 1430-1436.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: Luxima.
- Kusumowardhani, Reni. 2000. *Menciptakan Bahan Ajar yang Berpusat Pada Anak*. Jakarta: CRI Indonesia.
- Kusumowardhani, Reni. 2000. *Menciptakan Kelas yang Berpusat Pada Anak*. Jakarta: CRI Indonesia.
- Mahabbati, Aini. (2014). *Kebijakan, Implementasi dan Isu Strategis Pendidikan Bagi Individu Berkebutuhan Khusus*. Jurnal Pendidikan Islam, 3(1).
- Mambela,S. (2010). *Mainstreaming Sebagai Alternatif Penanganan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Indonesia*. Sosiohumaniora, 3(2), 295-304.
- Mangunsong, Frida. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid Kedua*. Depok: LPSP3UI.
- Mangunsong, Frida. 2011. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid Kedua*. Depok: LPSP3UI.
- Mateusi, C. M., Khoaeane, J. T., & Naong, M. N. 2014. *Challenges of Inclusive Education: Lesotho Case Study*. International Journal of Educational Sciences, 6(2), 263-273.

- Mathis, Robert L & Jackson, John H. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Matin. 2013. *Perencanaan Pendidikan: Perspektif dan Teknik dalam Penyusunan Rencana Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Mulyasa, E. 2009. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Abdurrahman. (1998). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nastiti, Try Anugrah. Azizah, Nur. (2018). *A Review on Individualized Educational Program In Some Countries*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 296, 40-46.
- NBP Center. 2017. *Modul Two Weeks Intensive Training on Children with Special Needs*.
- Oktradiksa, Ahwy. (2016). *Analisis Persepsi Guru Madrasah Tentang Konsep Sekolah Inklusi di MI Muhammadiyah Jagalan Kabupaten Magelang*. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 12(2), 11-29.
- Persada, Jaya H; Effendi, M. (2018). *Studi Kasus Layanan Pendidikan Inklusif di Kota Madiun*. *Jurnal Ortopedagogia*, 4 (1), 7-11.
- Ramachandran, Vimala et. al, (ERU Reaserch Team). 2010. *School Management for Quality Inclusive Education and Decentralised School Governance*. New Delhi: New Concept.
- Ramsay, Reynold and Kamphaus. 2002. *Essentials of Behavioral Assessment*. New York: Jhon Wiley dan Sons, Inc.
- Rantsie Jeremiah K and Johnnie Hay. 2013. *Educators Views on management Practices in The implementation of Inclusive Educational And Ecosystemic Approach*. New Delhi: Kamla Raj.
- Rivai, Veithzal dan Murni, Sylviana. 2009. *Education Managemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rochyadi dan Alimin. 2005. *Pengembangan Program Pembelajaran Individual Bagi Anak Tunagrahita*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Saldana, Johny. 2009. *The Coding Manual for Qualitative Researchers*. London: SAGE Publications.
- Salim, Abdul. (2010). *Pengembangan Model Modifikasi Kurikulum Sekolah Inklusif Berbasis Kebutuhan Individu Peserta Didik*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Khusus*, 16(1), 21-34.
- Salisbury. 2005. *Principals of Inclusive Schools*. Chicago: Univ. of Illionis.
- Sarafino, 2012. *Applied Behavior Analysis*. New York: Jhon Wiley dan Sons, Inc.
- Sattler, Jerome. 1986. *Assessment of Children*. New York: Jerome Sattler Publisher.
- Schermerhorn, John R. 2010. *Introduction to Management*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Semiawan, Conny. 2008. *Perspektif Pendidikan Anak Berbakat*. Jakarta: Grasindo.
- Smith, David. 2013. *Konsep Penerapan Pembelajaran Sekolah Inklusi*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suleymanov, Farid. (2015). *Issues of Inclusive Education: Some Aspects to be Considered*. *Electronoc Journal for Inclusive Education*, 3 (4), 1-23.
- Sulistiyawati, Ari. 2014. *Deteksi Tumbuh Kembang Anak*. Depok: Salemba Medica.
- Sunardi, Maryadi, Sugini. 2014. *The Effetiveness of a Two-Day Inclusion Workshopon Teachers' Attitudes, Understanding, and Competence in Inclusive Education*. *World Journal Education*, 4(5), 77-85.
- Sunardi., Yusuf, M., Gunarhadi., Priyono., & Yeager, J. 2011. *The Implementation of Inclusive Education for Students with Special Needs in Indonesia*. *Excellence in Higher Education*, 2, 1-10.

- Suyanto dan Mudjito. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.
- Syahrul, Fitriani F. 2012. *Menggali Potensi di Sekolah Inklusif*. Depok: Lentera Insan.
- Syamsu Taufiq, Temmy. (2017). *Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter Bidang PLB Tuna Rungu*. P4TK dan PLB Bandung.
- Terry, George R & Rue, Leslie W. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen (terjemahan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- The National Council of Educational Research and Training (2015). *Ebook CBSE Class 5 to 12*.
- Tilaar, H. A. R. 2012. *Pendidikan Nasional: Arah ke Mana?* Jakarta: Kompas.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UNY. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Jogja: FIP-UNY.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. 2011. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Wenar dan Kerig. 2006. *Developmental Psychopathology from Infancy Through Adolescence*.
- Widodo, Sri. 2011. *Makalah Pelatihan Layanan Pendidikan Inklusif*. Jawa Barat.
- Yasa, R. B. , & Julianto. 2017. *Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar di Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Pidie*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 3(2), 120–135.
- Yulhaidir, Lalu. 2014. *Laporan Praktik Kerja Profesi Psikologi*. Yogyakarta: Universitas Mercubuana. Tidak Diterbitkan.
- Zimba, Zondani. 2011. *Managing an Inclusive School*. Peritoria: Rhodes University.

Biografi Penulis

Nama Lengkap : Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.
No HP : 08179863540
Email : yessy.syah@uhamka.ac.id

Riwayat Pekerjaan

1. Dosen LTQ Baitul Hikmah, Kalimalang, Jakarta.
2. Guru SDIT Al-Khairaat, Condet, Jakarta.
3. Volunter Panti Asuhan Amal Mulia, Depok.
4. Guru SIT Fajar Hidayah, Cibubur, Jakarta.
5. Dosen PAUD STIT Nurul Fikri, Cimanggis, Depok.
6. Kepala Sekolah TKIT Darul Abidin, Beji, Depok.
7. Wakil Direktur YPI Darul Abidin, Beji, Depok.
8. Dosen Pascasarjana STAI Al-Hikmah, Jakarta.
9. Dosen Sekolah Pascasarjana UHAMKA, Jakarta.
10. Ketua Yayasan Pendidikan Jejak Ilmu.

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Koperasi Syari'ah Bina Umat Mulia, Depok.
2. Pengurus Lembaga ZISWAF Rumah Berbagi, Depok.
3. Staf Litbang Persatuan Guru Sejahtera Indonesia, Depok.
4. Anggota Asia-Europe Foundation.
5. Pengurus Pusat JSIT Indonesia.
6. Staf Ahli Forum PAUD Kota Depok.
7. Tim Sinergitas Ketahanan Keluarga Pemkot Depok.
8. Anggota Pimpinan Majelis Dikdasmen Wilayah Muhammdiyah DKI Jakarta
9. Instruktur Nasional Sekolah Penggerak untuk Pendidikan Anak Usia Dini.

Pendidikan Formal

1. SDN 09 Pagi Jakarta Timur.
2. SMPN 139 Jakarta Timur.
3. SMAN 44 Jakarta Timur.
4. Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Jakarta.
5. Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Pelita Harapan.
6. Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta.

Karya

1. Album Kaset Lagu Bahasa Arab (Tim).
2. Buku Standar Penjaminan Mutu SIT Indonesia (Tim).
3. Buku El-Talaqqi Qu (Metode Menghafal yang Efektif dan Panduan Lembaga Tahfizh).
4. Buku Antologi Puisi Wanita Serumpun Nusantara-Asia Tenggara.
5. Buku 13 Pelangi Cinta (Kisah ABK).
6. Buku Membedik Karakter Hebat.
7. Bunga Rampai Pemikiran Guru dalam Mendidik *Kids Zaman Now* (Antologi).
8. Aplikasi Pendidikan Karakter Berbasis Android "*Parents Up*".
9. Kerangka Kerja Aplikasi Digital: Deteksi dan Solusi Permasalahan Keluarga.
10. Alat Bantu Mobilitas Sepeda Kayu untuk Anak Berkebutuhan Khusus.



Nama Lengkap : Lalu Yulhaidir, M.Psi., Psikolog
Tempat, Tanggal lahir : Anjani, 17 Januari 1983
Alamat : Jl. Melati Pedaleman Anjani
Kecamatan Suralaga Lombok
Timur NTB.
No HP : 081997961705
Web : www.inspirasilombok.com
Email : chaidiryull@yahoo.co.id



Riwayat Organisasi dan Pengabdian

1. Kepala SMAIT Cahaya Bangsa Lombok Timur.
2. Ketua HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) Wilayah NTB (2017-2021).
3. *Founder* KREN (Komunitas *Parenting*) Lombok.
4. Pengurus Wilayah Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia.
5. Tenaga Ahli dalam Bidang Psikologi Pendidikan dan Pengasuhan.

Riwayat Pendidikan Formal dan Informal

1. S3 Psikologi Universitas Negeri Malang.
2. S2 Magister Profesi Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (2011).
3. S1 Psikologi Universitas Negeri Malang (2001).
4. *Certified* Hipnoterapis PPT Metamorfosa Yogyakarta (2012).
5. *Certified* Praktisi Neuro Linguistic Program INSIGHT Institute (2015).
6. *Certified* Master Neuro Linguistic Program INSIGHT Institute (2015).

Hasil dan Karya

1. Hubungan Kreativitas Figural terhadap Prestasi Belajar Matematika (2005).
2. Teropong Guru dalam Pendidikan Karakter (2012).
3. Bijak Menghukum Siswa (*Textbook*, 2012).
4. Lelaki Langit (Naskah Novel, 2013).
5. Pengaruh Atribusi Internal Siswa terhadap Prestasi UN (2014).
6. Kamus *Parenting* Sudut Pandang Psikologi Islam dan Barat (2019).
7. Modul Komunitas *Parenting* untuk Kasus *Trafficking* Anak (Tim Ahli Modul, 2018).
8. Modul Aplikasi *Parenting* untuk Kasus *Trafficking* Anak (Tim Ahli Modul, 2018).
9. Modul Pengasuhan Gemilang (2019).
10. Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus (2019).
11. Pengembangan Materi Inti BKB Berbasis Kearifan Lokal (2020).

Nama Lengkap : Dr. Sri Susanti Tjahja Dini, M.Pd.
Alamat : Jl. Bantaran VG No. 3 Tulusrejo,
Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.
No HP : 081233160459
Email : santimylife@gmail.com
Pendidikan Terakhir : S3 Psikologi Pendidikan Universitas
Negeri Malang

Pendidikan Nonformal

1. *The International Workshop of Theory and Practice of Family Therapy.*
2. *International Conference on Counseling and Education*
3. *International Conference and Workshop on School Counseling: The Role of School Counselors in Dealing with students with Special Needs in Inclusive Schools.*
4. *International Seminar on Counseling and Educational Psychology.*
5. Workshop Pembuatan Kurikulum Individual.
6. *Asia Youth Conference.*
7. *Special Children Therapist.*
8. *International Conference in Education.*
9. Seminar Nasional Psikologi Indigeneus Indonesia.
10. *Tallent Mapping Assesment.*
11. *Workshop Inclusive School Seminar.*
12. *Intensive Training on Children with Special Needs.*
13. *Workshop Working Together to Prevent Suicide.*
14. *Workshop Positive Behavior Support.*
15. *Workshop Intensive Training Dyslexia.*
16. *FIRST Trainer.*

Aktivitas

1. Ibu dari 4 Anak dan Juga Menjadi Orang Tua dari Anak Berkebutuhan Khusus (Tunarungu).
2. Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri.
3. Pendamping Layanan Inklusi.
4. Konsultan Pendidikan.
5. Pengurus Pusat JSIT.
6. Ketua Yayasan Pendidikan Cita Kita.
7. *Founder* dan Pendamping Sekolah Baruku.
8. Kadiv Pendidikan Bina Umat Indonesia.
9. Pendamping Sekolah Langkah Gemilang.
10. Ketua Dyslexia Parents Support Group Jawa Timur.
11. Anggota Assosiasi Pemerhati Difabel.
12. Anggota Rumah Produktif Indonesia Divisi Bimbingan Konseling.



Biografi Editor

Nama Lengkap : Rafita Arum Sari, S.Hum.
Bidang Keahlian : Sastra Inggris
Alamat Kantor : Wirodigan RT 01/RW 01, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Riwayat Pekerjaan

2018-2019 : Tutor Geniuschool Surakarta.
2019-sekarang : Editor di Nur Hidayah Press Surakarta.

Riwayat Perguruan Tinggi dan Tahun Belajar

S1 : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Nama Lengkap : Eka Lilik Nurindah Sari, S.E., S.H.
Alamat Kantor : Wirodigan RT 01/RW 01, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah

Riwayat Pekerjaan

2018-sekarang : Editor di Nur Hidayah Press Surakarta.

Riwayat Perguruan Tinggi dan Tahun Belajar

S1 : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Agama Islam (Twinning Program)/Universitas Muhammadiyah Surakarta.

